Katalog: 2101033

PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS2015

http://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK

SUPAS2015

PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS2015

http://www.bps.go.id

PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS

2015

ISBN: 978-602-438-027-4

Nomor Publikasi: 04110.1613

Katalog: 2101033

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 131 halaman

Naskah:
Subdirektorat Statistik Demografi

Gambar Kulit:
Subdirektorat Statistik Demografi

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik
Dicetak oleh: -

.....
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

http://www.bps.go.id

Penyusun Naskah:

Penanggung Jawab:
Dr. Indra Murty Surbakti
Rini Savitridina, MA

Editor:
Dendy Handiyatmo, M.Si
Parwoto, SST, M.Stat
Widaryatmo, SST, M.Si

Penulis:
Nuraini, SST, MA
Sri Wahyuni, SST, SE, M.Si
Tri Windiarto, S.Si, M.Si
Evi Oktavia, S.Si, M.T
Yoyo Karyono, SST

Pengolah Data:
Ikhsan Fahmi, SST

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) merupakan salah satu sumber utama data kependudukan di Indonesia, dan dilaksanakan di antara dua waktu sensus penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) telah empat kali melakukan SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005. Pada tahun 2015, BPS melaksanakan SUPAS yang kelima. Pendataan SUPAS tahun 2015 dilaksanakan dalam periode waktu 1 hingga 31 Mei 2015.

Kegiatan SUPAS 2015 bertujuan untuk memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, menyediakan data dan penghitungan parameter demografi, sebagai koreksi terhadap hasil proyeksi penduduk 2010-2035, dan sebagai bahan perencanaan serta evaluasi terakhir MDGs. Data kependudukan yang dikumpulkan pada SUPAS 2015 mencakup: keterangan pokok penduduk, lansia, kelahiran, kematian, kematian ibu, perpindahan penduduk, ketenagakerjaan, fasilitas perumahan, dan juga informasi mengenai: migrasi keluar internasional, perubahan iklim, dan disabilitas.

Profil kependudukan hasil SUPAS 2015 ini merupakan gambaran komprehensif keadaan kependudukan Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015. Diharapkan isi publikasi ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, dunia usaha maupun para pembuat kebijakan dalam menetapkan langkah ke depan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

http://www.bps.go.id

Jakarta, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Suhariyanto

http://www.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar	.....	v
Daftar Isi	.....	vii
Daftar Tabel	.....	x
Daftar Gambar	.....	xii
1.	**Pendahuluan**	1
2.	**Keadaan Geografi dan Iklim**	5
3.	**Gambaran Umum Kependudukan**	11
3.1	Jumlah Penduduk	13
3.2	Komposisi Penduduk	15
3.3	Laju Pertumbuhan Penduduk	18
3.4	Rasio Jenis Kelamin	21
3.5	Kepadatan Penduduk	23
3.6	Distribusi Penduduk	24
3.7	Dinamika Kependudukan	25
	3.7.1 Bonus Demografi	25
	3.7.2 Penduduk Lanjut Usia	27
3.8	Keluarga	29
	Ringkasan	35
4.	**Fertilitas dan Keluarga Berencana**	37
4.1	Fertilitas	39
	4.1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)	39
	4.1.2 *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)	40
	4.1.3 *Singulate Mean Age At Marriage* (SMAM)	40
4.2	Keluarga Berencana	42
	4.2.1 Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB	42
	4.2.2 Keinginan Mempunyai Anak	43
	Ringkasan	45

http://www.bps.go.id

5. **Mortalitas** 47
5.1 Kematian Bayi 49
5.2 Angka Harapan Hidup 50
5.3 Kematian Anak 51
5.4 Kematian Balita 51
5.5 Kematian Dewasa 51
5.6 Kematian Ibu 52
Ringkasan 53

6. **Mobilitas** 55
6.1 Mobilitas Permanen 58
6.1.1 Migrasi Seumur Hidup 58
6.1.2 Migrasi Risen 60
6.1.3 Migrasi Total 64
6.2 Mobilitas Non Permanen 66
6.2.1 Komuter 66
6.2.2 Mobilitas Musiman 68
Ringkasan 69

7. **Disabilitas** 71
7.1 Konsep dan Definisi Disabilitas 73
7.2 Keterbatasan Data Disabilitas 75
7.3 Gambaran Penyandang Disabilitas 75
7.3.1 Kesulitan Melihat 77
7.3.2 Kesulitan Mendengar 78
7.3.3 Kesulitan Berjalan/Naik Tangga 80
7.3.4 Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari 82
7.3.5 Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi 84
7.3.6 Gangguan Perilaku dan atau Emosional 86
7.3.7 Kesulitan Berbicara dan atau Memahami/Berkomunikasi dengan Orang Lain 88
7.3.8 Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 90
Ringkasan 93

8. **Perumahan** 95
8.1 Keadaan Perumahan 98
8.2 Pemenuhan Kebutuhan untuk Perumahan 108
Ringkasan 109

https://www.bps.go.id

9. **Perubahan Iklim** 111
9.1 Pengetahuan Tentang Perubahan Iklim 113
9.1.1 Rumah Tangga yang Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim 116
9.1.2 Rumah Tangga yang Mengetahui tentang Perubahan Iklim..... 117
9.2 Adaptasi Perubahan Iklim 121
9.2.1 Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim 121
9.2.2 Menanam/Pemeliharaan Tanaman di Pekarangan Rumah 125
9.2.3 Penyediaan Area Resapan Air 126
Ringkasan 128

10. **Penutup** 131

http://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel L2.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2014	10
Tabel 3.1	Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar Berdasarkan Hasil SUPAS 2015	14
Tabel 3. 2	Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil Berdasarkan Hasil SUPAS 2015	14
Tabel L.3.1	Jumlah Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015	31
Tabel L.3.2	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi Tahun 1990-2000, 2000-2010 dan 2010-2015 (Persen)	32
Tabel L.3.3	Distribusi Penduduk menurut Pulau Tahun 2015	33
Tabel L.3.4	Kepadatan Penduduk menurut Provinsi Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015	34
Tabel 6.1	Jumlah dan Angka Migrasi Masuk, Keluar, dan Neto Seumur Hidup menurut Provinsi HASIL SUPAS 2015	59
Tabel 6.2	Jumlah dan Angka Migrasi Masuk, Keluar dan Neto Risen menurut Provinsi Hasil SUPAS 2015	62
Tabel 6.3	Karakteristik Migran Risen	63
Tabel 6.4	Jumlah dan Angka Migrasi Total Masuk, Keluar, dan Neto Menurut Provinsi Hasil SUPAS 2015	65
Tabel 6.5	Persentase Komuter dan Mobilitas Musiman Hasil SUPAS 2015	67
Tabel 7.1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan	76
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat	78
Tabel 7.3	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar	79
Tabel 7.4	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan/Naik Tangga	81
Tabel 7.5	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Menggunakan/ Menggerakkan Tangan/Jari	83
Tabel 7.6	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/ Berkonsentrasi	85

http://www.bps.go.id

Tabel 7.7 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Gangguan Perilaku dan atau Emosional 87
Tabel 7.8 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kesulitan Berbicara dan atau Memahami/Berkomunikasi dengan Orang Lain 89
Tabel 7.9 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 91
Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan (m^2) dan Tipe Daerah 98
Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita (m^2) dan Tipe Daerah 99
Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Rumah Terluas dan Tipe Daerah 100
Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas dan Tipe Daerah 101
Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas dan Tipe Daerah 101
Tabel 8.6 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah 102
Tabel 8.7 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-Hari dan Tipe Daerah 103
Tabel 8.8 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah 104
Tabel 8.9 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Utama Pompa, Sumur, atau Mata Air Menurut Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat dan Tipe Daerah 105
Tabel 8.10 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah 105
Tabel 8.11 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah 106
Tabel 8.12 Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Barang dan Tipe Daerah 107
Tabel 8.13 Tabel Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan Tipe Daerah 108

http://www.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Penduduk Indonesia Tahun 2000- 2015 (Jutaan)	13
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Indonesia, 2015	15
Gambar 3.3	Piramida Penduduk Indonesia, 1971	16
Gambar 3.4	Piramida Penduduk Indonesia, 1980	16
Gambar 3.5	Piramida Penduduk Indonesia, 1990	17
Gambar 3.6	Piramida Penduduk Indonesia, 2000	17
Gambar 3.7	Piramida Penduduk Indonesia, 2010	18
Gambar 3.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1990-2000, 2000-2010, 2010-2015	19
Gambar 3.9	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010- 2015 menurut Provinsi.....	20
Gambar 3.10	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015	21
Gambar 3.11	Rasio Jenis Kelamin menurut Provinsi Tahun 2015	22
Gambar 3.12	Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015.....	23
Gambar 3.13	Distribusi Penduduk menurut Wilayah Tahun 2015	24
Gambar 3.14	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015	25
Gambar 3.15	Rasio Ketergantungan Penduduk menurut Provinsi, 2015	26
Gambar 3.16	Persentase Penduduk Lanjut Usia di Indonesia Tahun 1971-2015	27
Gambar 3.17	Persentase Penduduk Lanjut Usia menurut Provinsi, 2015	28
Gambar 4.1	Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia	39
Gambar 4.2	Angka Fertilitas menurut Kelompok Umur (ASFR) Indonesia	40
Gambar 4.3	Umur Kawin Pertama (SMAM) Wanita menurut Pendidikan, Tahun 2010-2015	41
Gambar 4.4	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Wanita Indonesia Tahun 2015	43
Gambar 4.5	Keinginan Mempunyai Anak di Indonesia, 2015	44
Gambar 5.1	Angka Kematian Bayi (*IMR*) Indonesia	49
Gambar 5.2	Angka Harapan Hidup Indonesia Tahun 2015	50
Gambar 6.1	Persentase Alasan Pindah Migran Risen	61

http://www.bps.go.id

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Melihat menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 77
Gambar 7.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mendengar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 80
Gambar 7.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 82
Gambar 7.4 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 84
Gambar 7.5 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mengingat/ Berkonsentrasi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 86
Gambar 7.6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Gangguan Perilaku dan atau Emosional menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 88
Gambar 7.7 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Gangguan Perilaku dan atau Emosional menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 90
Gambar 7.8 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mengurus Diri Sendiri menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 92
Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara yang Lebih Panas Selama Lima Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal 114
Gambar 9.2 Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan yang Tidak Menentu Selama Lima Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal 115
Gambar 9.3 Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Kelangkaan Air Bersih Selama Lima Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal 115
Gambar 9.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Provinsi 118

http://www.bps.go.id

Gambar 9.5 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Jenis Kelamin Responden 119
Gambar 9.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Pendidikan Responden 119
Gambar 9.7 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Kelompok Umur Responden 120
Gambar 9.8 Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara yang Lebih Panas Selama Lima Tahun Terakhir dan Rumah Tangga yang Melakukan Upaya 122
Gambar 9.9 Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan yang Tidak Menentu Selama Lima Tahun Terakhir dan Rumah Tangga yang Melakukan Upaya 123
Gambar 9.10 Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Kelangkaan Air Bersih Selama Lima Tahun Terakhir dan Rumah Tangga Biasa Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain 124
Gambar 9.11 Persentase Rumah Tangga yang Menanam/Memelihara Tanaman Tahunan Di Pekarangan Rumah Menurut Daerah Tempat Tinggal 126
Gambar 9.12 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumur Resapan Menurut Daerah Tempat Tinggal 127

http://www.bps.go.id

1. Pendahuluan

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Pendahuluan

KEBERHASILAN pembangunan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan kondisi penduduk. Dalam pembangunan, peran penduduk (manusia) adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan. Sementara itu sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, perlu pemahaman yang komprehensif mengenai potensi, hambatan, peluang dan tantangan kependudukan. Di Indonesia, topik kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan) dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional). Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah, dan jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula di antaranya kebutuhan pangan dan energi. Informasi mengenai komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan jika disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan bagi keberlangsungan pembangunan, karena akan menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Contoh lain adalah komposisi jumlah penduduk usia sekolah dibutuhkan bagi perencanaan dan penyediaan sarana, prasarana juga kebijakan di bidang pendidikan.

Selain itu, parameter demografi seperti Angka Kelahiran/*Total Fertility Rate* (TFR), Angka Kematian Bayi/*Infant Mortality Rate* (IMR) dan migrasi merupakan indikator kependudukan yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan juga digunakan sebagai komponen dalam proyeksi jumlah penduduk ke depan. Dengan demikian, sangat nyata bahwa data kependudukan sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan, *monitoring* target pembangunan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Data dan informasi kependudukan menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan Indonesia terutama karena potensi penduduk yang besar dan persebaran penduduk yang tidak merata dan tersebar di arera yang tidak mudah dijangkau.

http://www.bps.go.id

2. Keadaan Geografi dan Iklim

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Keadaan Geografi dan Iklim

SECARA astronomis, Indonesia terletak antara 6^0 08' Lintang Utara dan 11^0 15' Lintang Selatan dan antara 94^0 45' – 141^0 05' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0^0.

Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara - Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Laut Cina Selatan; Selatan – Negara Australia, Timor Leste dan Samudra Hindia; Timur – Negara Papua Nugini, dan Samudera Pasifik; Barat – India dan Samudera Hindia. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Indonesia terdiri dari 34 Provinsi yang terletak di lima pulau besar dan tiga kepulauan, yaitu:

- **Pulau Sumatera**: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
- **Kepulauan di Sumatera**: Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.
- **Pulau Jawa**: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- **Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil)**: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
- **Pulau Kalimantan**: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- **Pulau Sulawesi**: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- **Kepulauan Maluku**: Maluku dan Maluku Utara.
- **Pulau Papua**: Papua dan Papua Barat

Luas wilayah terbesar di Indonesia adalah Provinsi Papua sebesar 319 036,05 Km2 atau sebesar 16,70 persen dari total luas wilayah Indonesia, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur masing-masing sebesar 153 564,50 Km2; 147 307,00 Km2 dan 128 066,64 Km2.. Jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17 504, Kepulauan Riau memiliki jumlah pulau terbanyak 2 408, diikuti oleh Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Indonesia karena terletak di daerah tropis, maka hanya dibagi menjadi dua musim saja, yaitu: musim hujan dan musim kemarau.

http://www.bps.go.id

Pada tahun 2015 di berbagai daerah di Indonesia mengalami bencana kekeringan, musim kemarau ekstrem, dan bahkan disebut-sebut sebagai musim kemarau terburuk yang diduga kuat akibat dari pengaruh fenomena El Nino. El Nino adalah gejala gangguan iklim yang diakibatkan oleh naiknya suhu permukaan laut Samudera Pasifik sekitar khatulistiwa bagian tengah dan timur dan berlangsung hingga awal tahun 2016. Naiknya suhu di Samudera Pasifik ini mengakibatkan perubahan pola angin dan curah hujan yang ada di atasnya.

Setelah melewati derita kemarau panjang di tahun 2015 maka di tahun 2016 bencana jenis hidrometerologi atau bencana akibat limpahan air dan fenomena angin kencang mengancam hampir seluruh wilayah Indonesia. El Nino berakhir berganti dengan fenomena La Nina yang berawal dari menguatnya Angin Pasat Tenggara, sedangkan suhu muka air laut di Samudera Pasifik sebelah Barat lebih hangat daripada suhu tropis di Timur Pasifik yang berada pada kondisi lebih dingin. La Nina adalah fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik yang lebih rendah dari wilayah sekitarnya. Akibat dari La Nina adalah hujan turun lebih banyak di Samudera Pasifik sebelah barat Australia dan Indonesia. Dengan demikian di daerah ini akan terjadi hujan lebat dan banjir di mana-mana.

http://www.bps.go.id

LAMPIRAN

http://www.bps.go.id

Tabel L2.1

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Luas Area (km^2/sq.km)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,03	663
12 Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,82	419
13 Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,20	391
14 Riau	Pekan Baru	87.023,66	4,55	139
15 Jambi	Jambi	50.058,16	2,62	19
16 Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,79	53
17 Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	47
18 Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81	188
19 Kepulauan Bangka	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	950
21 Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	2.408
31 DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
32 Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	131
33 Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,72	296
34 DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	23
35 Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,50	287
36 Banten	Serang	9.662,92	0,51	131
51 Bali	Denpasar	5.780,06	0,30	85
52 Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	864
53 Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,55	1.192
61 Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,71	339
62 Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153.564,50	8,04	32
63 Kalimantan Selatan	Banjarmasing	38.744,23	2,03	320
64 Kalimantan Timur	Samarinda	129.066,64	6,75	370
65 Kalimantan Utara	Bulungan	75.467,70	3,95	-
71 Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	668
72 Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,24	750
73 Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44	295
74 Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	651
75 Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	136
76 Sulawesi Barat	Mamuju	16.787,18	0,88	-
81 Maluku	Ambon	46.914,03	2,46	1.422
82 Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	1.474
91 Papua Barat	Manokwari	97.024,27	5,08	1.945
94 Papua	Jayapura	319.036,05	16,70	598
Indonesia		**1.910.931,32**	**100,00**	**17.504**

Sumber data: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri

http://www.bps.go.id

3. Gambaran Umum Kependudukan

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

3.1 Jumlah Penduduk

JUMLAH penduduk Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015 sebanyak 255,18 juta jiwa. Dibandingkan dengan sensus maupun survei penduduk sebelumnya, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu lima belas tahun yaitu tahun 2000 hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia mengalami penambahan sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun (Gambar 3.1.)

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015 sebanyak 255,18 juta jiwa.

Gambar 3.1
Penduduk Indonesia Tahun 2000- 2015 (Jutaan)

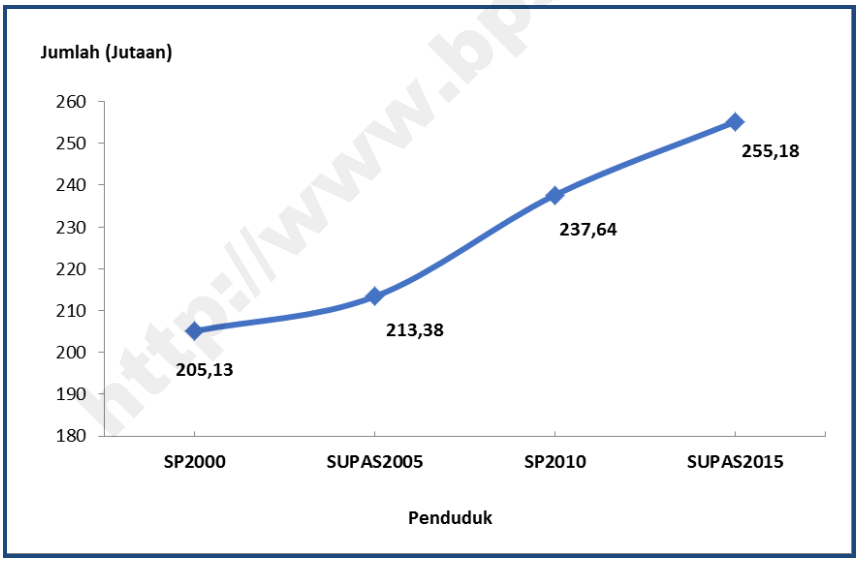

Sumber data: Sensus Penduduk 2000, 2010 dan SUPAS 2005, 2015

Berdasarkan hasil SUPAS 2015, tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di antara tiga provinsi tersebut yang mengalami penambahan jumlah penduduk terbesar adalah Provinsi Jawa Barat, sedangkan penambahan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur (lihat Tabel 3.1).

http://www.bps.go.id

Tabel 3.1
Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar
Berdasarkan Hasil SUPAS 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)		Penambahan Jumlah
	SP 2010	SUPAS 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Barat	43.053.732	46.668.214	3.614.482
Jawa Timur	37.476.757	38.828.061	1.351.304
Jawa Tengah	32.382.657	33.753.023	1.370.366

Sumber data: SP 2010, SUPAS 2015

Tiga provinsi dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kalimantan Utara, diikuti Papua Barat dan Gorontalo. Penambahan jumlah penduduk terbanyak adalah Kalimantan Utara kemudian Gorontalo dan Papua Barat.

http://www.bps.go.id

Tabel 3. 2
Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil
Berdasarkan Hasil SUPAS 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)		Penambahan Jumlah
	SP 2010	SUPAS 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Utara	524.656	639.639	114.983
Papua Barat	760.422	868.819	108.397
Gorontalo	1.040.164	1.131.670	91.506

Sumber data: SP 2010, SUPAS 2015

3.2 Komposisi Penduduk

KOMPOSISI penduduk menurut umur dan jenis kelamin suatu wilayah dapat diketahui dengan gambar piramida penduduk. Sumbu horizontal penduduk menunjukkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk laki-laki ditampilkan di sebelah kiri. Sedangkan jumlah penduduk perempuan di sebelah kanan. Sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan, ditampilkan dari yang termuda di bawah berurutan hingga yang lebih tua di atasnya.

Bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2015 termasuk tipe ekspansif.

Gambar 3.2
Piramida Penduduk Indonesia, 2015

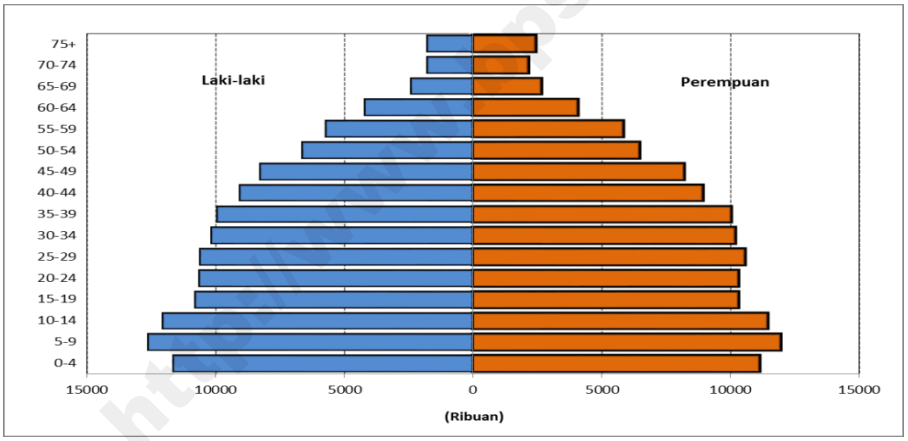

Sumber data: SUPAS 2015

Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dilihat bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2015 termasuk tipe ekspansif, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun.

Dibandingkan dengan piramida penduduk sebelumnya, dari tahun 1971-2015 penduduk Indonesia telah mengalami perubahan struktur umur. Pada tahun 1971 bentuk piramida melebar di bagian bawah dan lebih runcing di bagian atas. Seiring

dengan bertambahnya waktu bentuk piramida semakin cembung di tengah yang berarti proporsi penduduk muda semakin berkurang, sedangkan proporsi penduduk dewasa semakin meningkat. Bagian atas piramida yang sedikit melebar menunjukkan semakin banyaknya proporsi penduduk lanjut usia (umur 60 tahun ke atas).

Gambar 3.3
Piramida Penduduk Indonesia, 1971

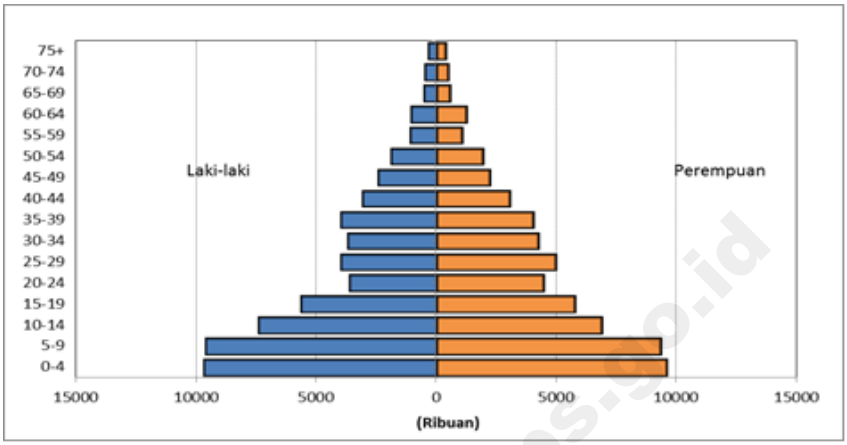

Sumber data: SP 1971

Gambar 3.4
Piramida Penduduk Indonesia, 1980

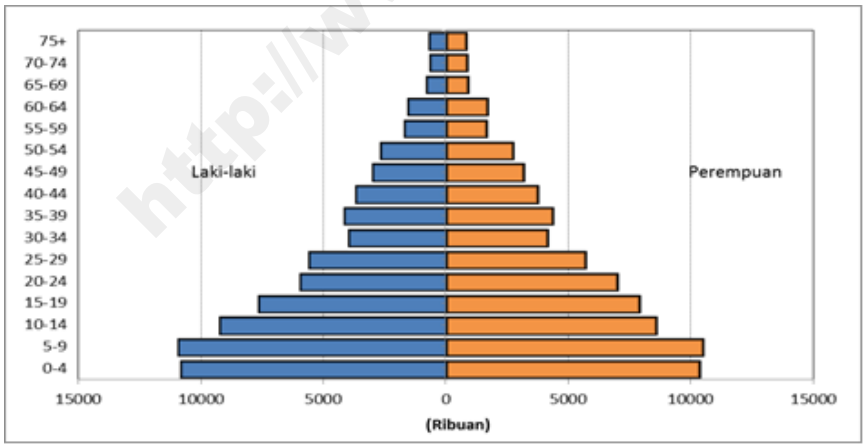

Sumber data: SP 1980

http://www.bps.go.id

Gambar 3.5
Piramida Penduduk Indonesia, 1990

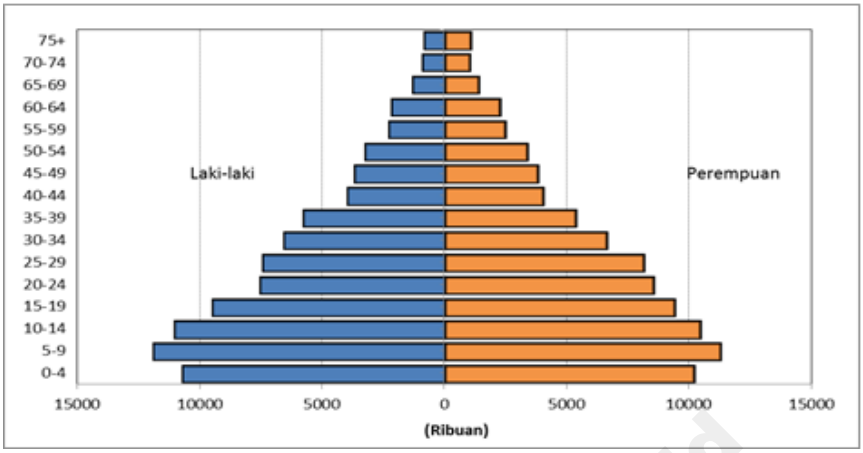

Sumber data: SP 1990

Gambar 3.6
Piramida Penduduk Indonesia, 2000

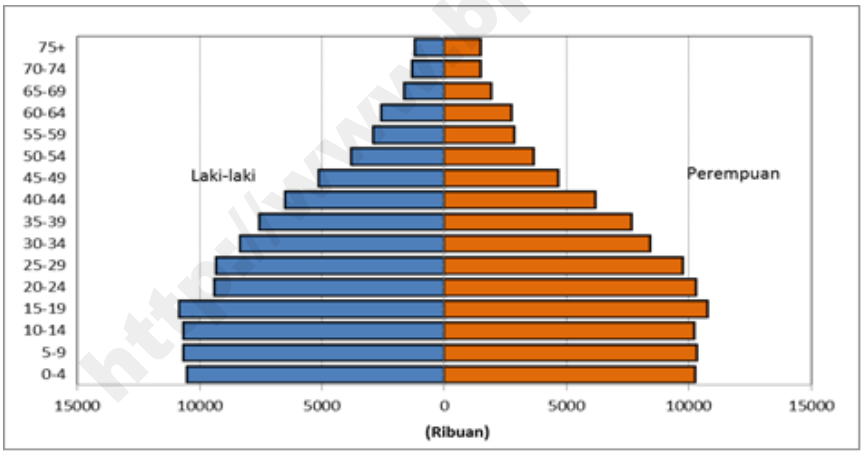

Sumber data: SP 2000

http://www.bps.go.id

Gambar 3.7
Piramida Penduduk Indonesia, 2010

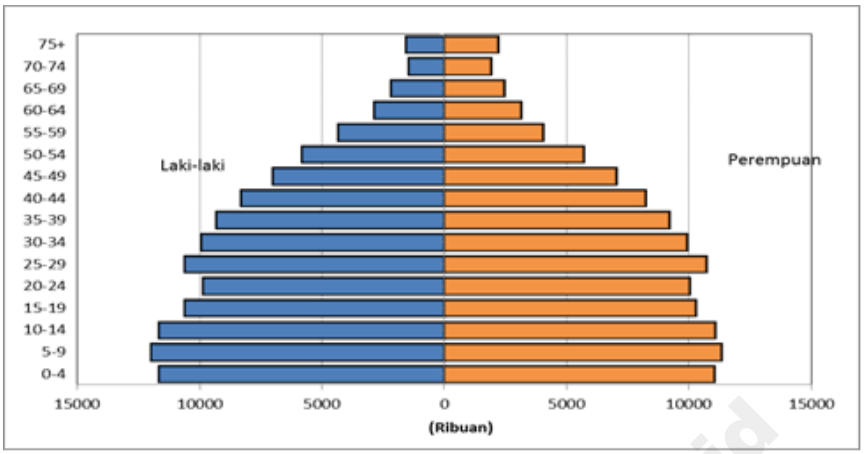

Sumber data: SP 2010

Perubahan struktur umur penduduk sangat terkait dengan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah menunjukkan tingginya tingkat kelahiran, sedangkan bagian atas yang lebih runcing menunjukkan tingginya tingkat kematian. Bentuk piramida yang semakin cembung di bagian tengah dan melebar di bagian atas menunjukkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang semakin menurun.

http://www.bps.go.id

3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2010-2015 sebesar 1,43 persen

LAJU pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia memiliki kecenderungan menurun. Kebijakan pemerintah untuk menekan LPP dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan pada tahun 1980an semakin nyata hasilnya. Pada tahun 1971-1980 pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi sekitar 2,33 persen. Pertumbuhan penduduk ini kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 1,44 persen pada 1990-2000. Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran

sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Namun pada periode sepuluh tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000-2010 laju pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan sekitar 0,05 persen. Laju pertumbuhan penduduk apabila tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015) laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 1,43 persen.

Gambar 3.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Tahun 1990-2000, 2000-2010, 2010-2015

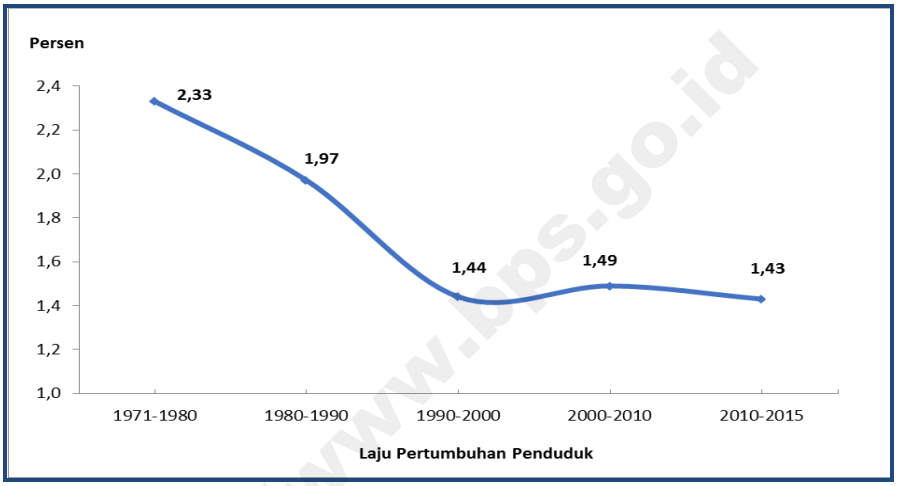

Sumber data: Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan SUPAS 2015

Dilihat menurut provinsi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau adalah tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar. Sementara itu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta adalah tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil. Berdasarkan hasil SUPAS 2015 terdapat 11 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah angka nasional, sementara 23 provinsi lainnya di atas angka nasional.

http://www.bps.go.id

Gambar 3.9
Laju Pertumbuhan Penduduk 2010- 2015 menurut Provinsi

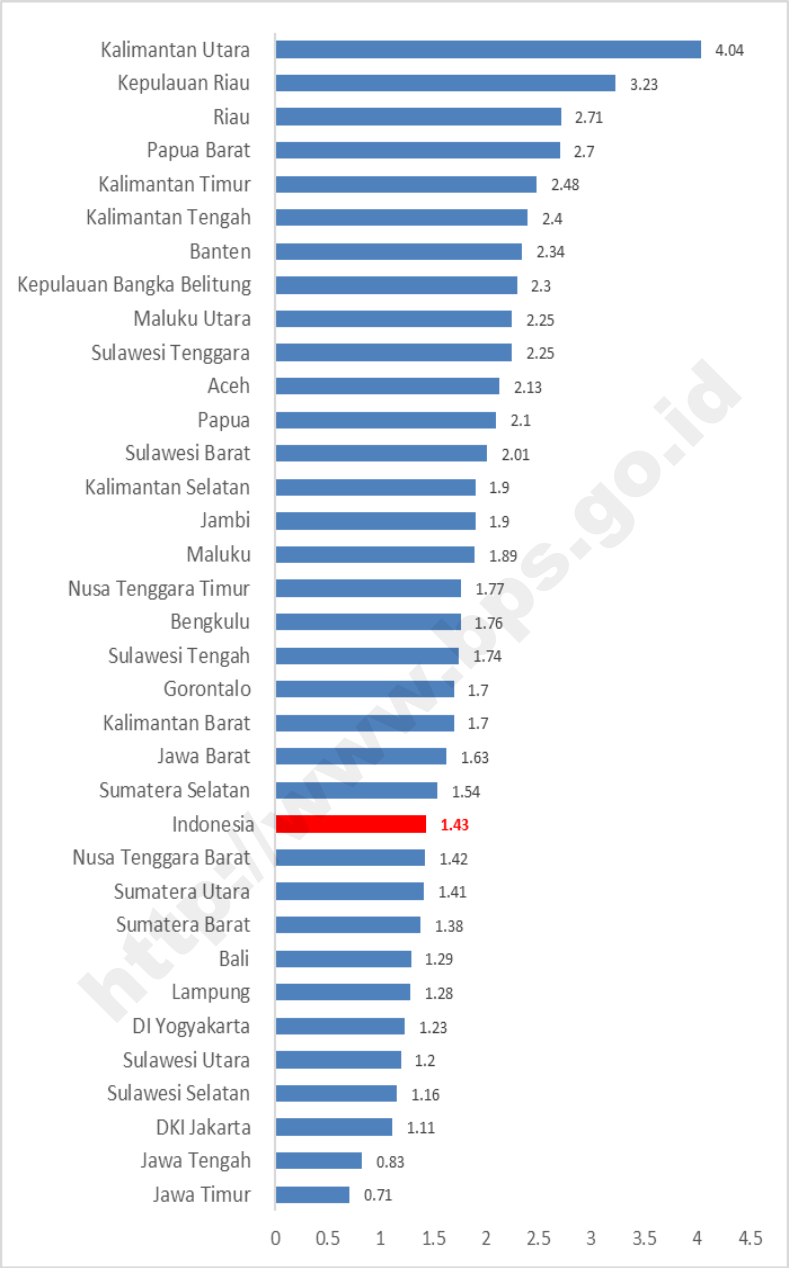

Sumber data: SUPAS 2015

3.4 Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin tahun 2015 secara nasional sebesar 101,01

RASIO jenis kelamin (RJK) menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan. RJK bervariasi menurut kelompok umur. Baik dua sensus terdahulu yaitu SP2000 dan SP 2010 maupun SUPAS 2015 terlihat mempunyai pola yang serupa. Pada kelompok usia muda (0-14 tahun) RJK seperti rasio jenis kelamin saat lahir yaitu laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pada kelompok usia remaja hingga menjelang 40 tahun, yang diduga mempunyai mobilitas cukup tinggi, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Pada kelompok usia 40-59 tahun laki-laki kembali menjadi lebih banyak. Pada kelompok umur 60 tahun ke atas merupakan saat yang rentan bagi laki-laki, sehingga laki-laki lebih sedikit daripada perempuan.

Gambar 3.10
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur
Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015

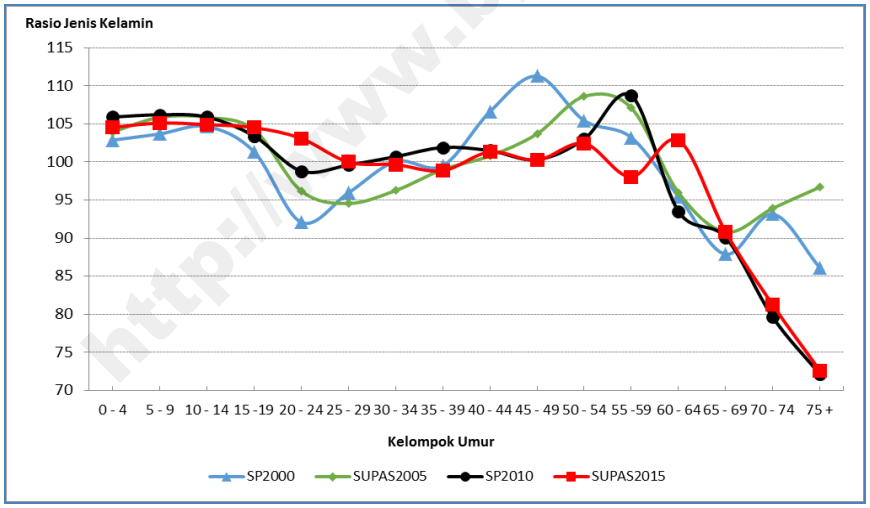

Sumber data: Sensus Penduduk 2000, 2010 dan SUPAS 2005, 2015

Pada tingkat provinsi, hasil SUPAS 2015 menunjukkan rasio jenis kelamin secara umum selaras dengan rasio jenis kelamin pada tingkat nasional, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Provinsi tersebut antara lain di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DI

Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, dimana rasio jenis kelamin kurang dari 100. Sebagai contoh rasio jenis kelamin di NTB adalah 94,15 yang berarti terdapat 94 laki-laki per 100 perempuan. Pada tahun 2015, rasio jenis kelamin tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 3.11
Rasio Jenis Kelamin menurut Provinsi Tahun 2015

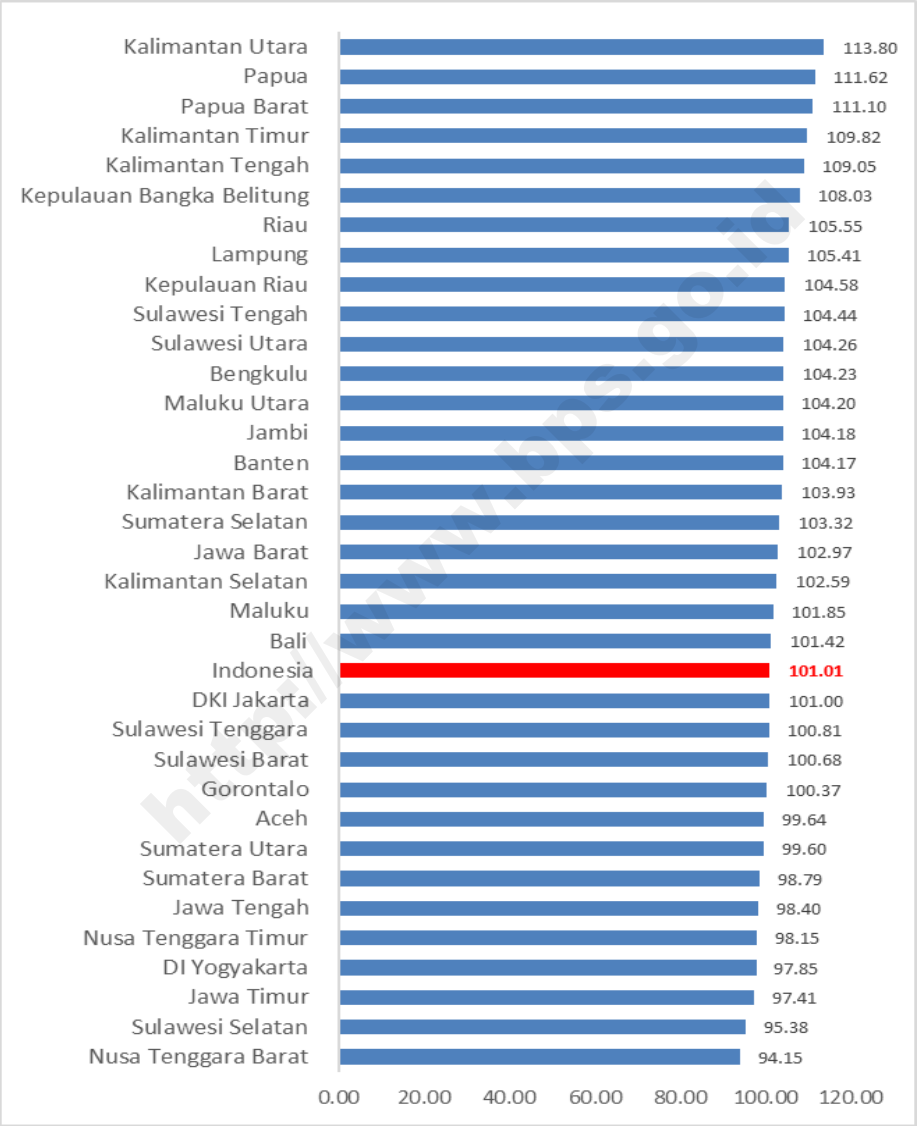

Sumber data: SUPAS 2015

3.5 Kepadatan Penduduk

KEPADATAN penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Wilayah Indonesia semakin padat penduduk, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk.

Kepadatan penduduk tahun 2015 secara nasional mencapai 134 jiwa per km persegi.

Berdasarkan hasil SP 2000 kepadatan penduduk Indonesia sebesar 107 jiwa per kilometer persegi, angka ini meningkat hingga mencapai 124 pada tahun 2010 dan 134 pada tahun 2015. Angka tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Indonesia menjadi lebih dari dua kali lipat kepadatan penduduk pada tahun 1971, sekitar 45 tahun yang lalu, dimana saat itu masih 62 jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi. Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, sedang tingkat kepadatan terendah adalah Kalimantan Utara. Kepadatan DKI Jakarta mencapai 15.292 jiwa per kilometer persegi, sementara kepadatan Kalimantan Utara hanya 8 jiwa per kilometer persegi.

http://www.bps.go.id

Gambar 3.12
Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015

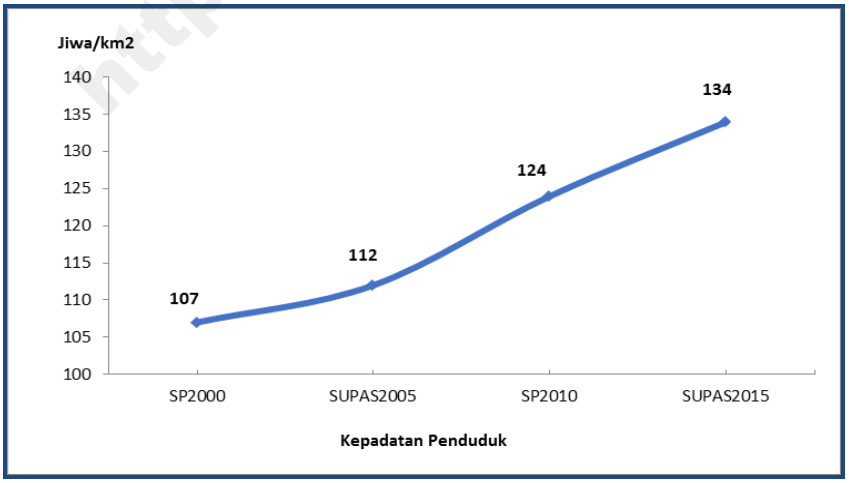

Sumber data: Sensus Penduduk 2000, 2010 dan SUPAS 2005, 2015

3.6 Distribusi Penduduk

PERSEBARAN penduduk menurut wilayah geografis dipakai untuk mengetahui tingkat pemerataan, kepadatan dan daya dukung penduduk terhadap suatu wilayah. Pemerataan persebaran penduduk diperlukan tidak hanya dari sisi ketahanan suatu negara, tetapi juga berguna untuk mendukung seluruh kegiatan ekonomi yang berlaku di negara tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Fenomena persebaran penduduk yang tidak merata masih menjadi ciri demografis Indonesia, seperti terlihat pada gambar 3.13.

Penduduk Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa, luas geografis sebesar 7 persen dihuni oleh 57 persen penduduk Indonesia.

- Di Pulau Jawa yang luas geografisnya 7 persen terdapat penduduk 57 persen.
- Di pulau Sumatera yang luasnya 25 persen terdapat penduduk 22 persen.
- Di pulau Kalimantan yang luasnya 28 persen terdapat penduduk hanya 6 persen.
- Di pulau Sulawesi yang luasnya 10 persen terdapat penduduk 7 persen.
- Di pulau lainnya (Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) yang luasnya 30 persen hanya 9 persen penduduk.

Gambar 3.13
Distribusi Penduduk menurut Wilayah Tahun 2015

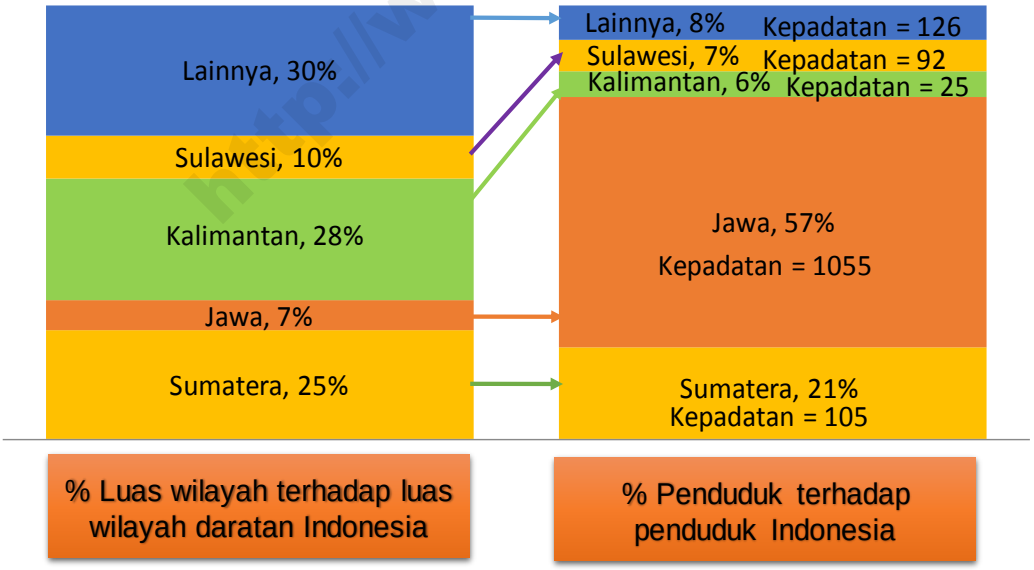

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambaran distribusi penduduk tersebut sudah berlangsung lama. Konsentrasi penduduk di pulau Jawa berkurang sangat lambat. Sejak tahun 1971 hingga sekarang distribusi penduduk di pulau Jawa hanya menurun sebesar 7 persen.

3.7 Dinamika Kependudukan

3.7.1 Bonus Demografi

Pada tahun 2015, Indonesia mengalami Era Bonus Demografi, dengan rasio ketergantungan sebesar 49,2

BONUS demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau rasio ketergantungan di bawah 50. Rasio ketergantungan secara nasional cenderung menurun. Gambar 3.14 menunjukkan rasio ketergantungan pada tahun 2000 sebesar 53,76 dan menurun pada tahun 2005 menjadi sebesar 50,8. Pada tahun 2010 mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,33 dan hasil SUPAS 2015 menunjukkan angka beban ketergantungan sebesar 49,2 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 49,2 penduduk usia non-produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Keadaan ini bisa diartikan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami era bonus demografi.

http://www.bps.go.id

Gambar 3.14
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia
Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015

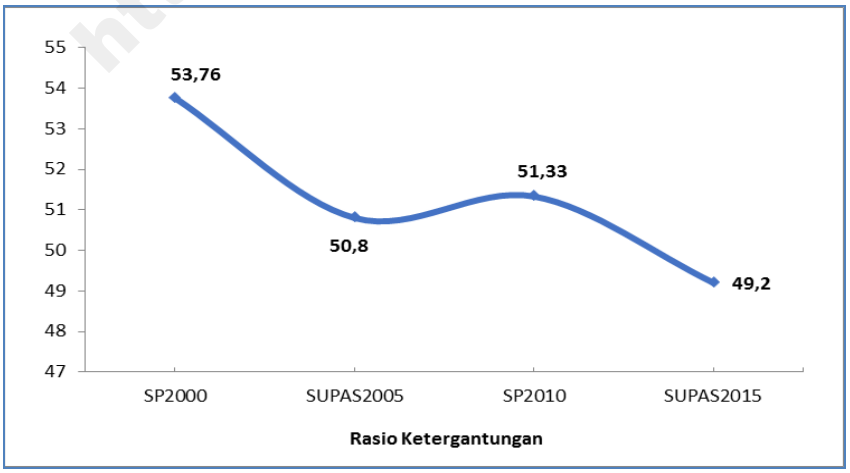

Sumber data: Sensus Penduduk 2000, 2010 dan SUPAS 2005, 2015

Provinsi yang mengalami masa bonus demografi pada tahun 2015 sudah mencapai 50 persen. Tujuh belas provinsi yang mengalami bonus demografi adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung, sedangkan 17 provinsi lainnya belum mengalami bonus demografi.

Gambar 3.15
Rasio Ketergantungan Penduduk menurut Provinsi, 2015

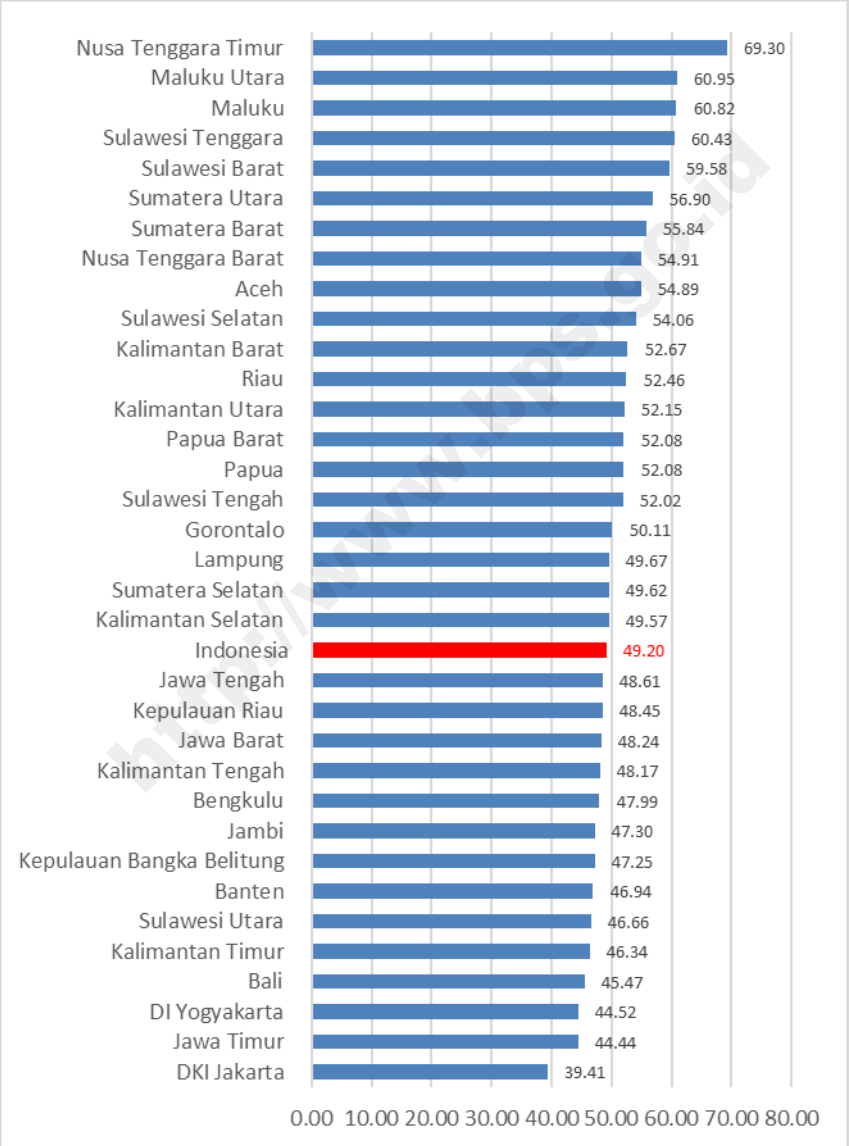

Sumber data: SUPAS 2015

3.7.2 Penduduk Lanjut Usia

ANGKA harapan hidup penduduk yang makin meningkat akan berdampak pada meningkatnya persentase penduduk lanjut usia. Jika pada tahun 1971 penduduk lansia sebesar 4,5 persen maka pada tahun 2015 meningkat menjadi hampir dua kali lipat yaitu 8,47 persen. Dengan demikian beberapa tahun ke depan Indonesia akan memasuki *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai 10 persen.

Pada tahun 2015 proporsi penduduk lanjut usia sebesar 8,47 persen pada tahun 2015

Gambar 3.16
Persentase Penduduk Lanjut Usia di Indonesia
Tahun 1971 - 2015

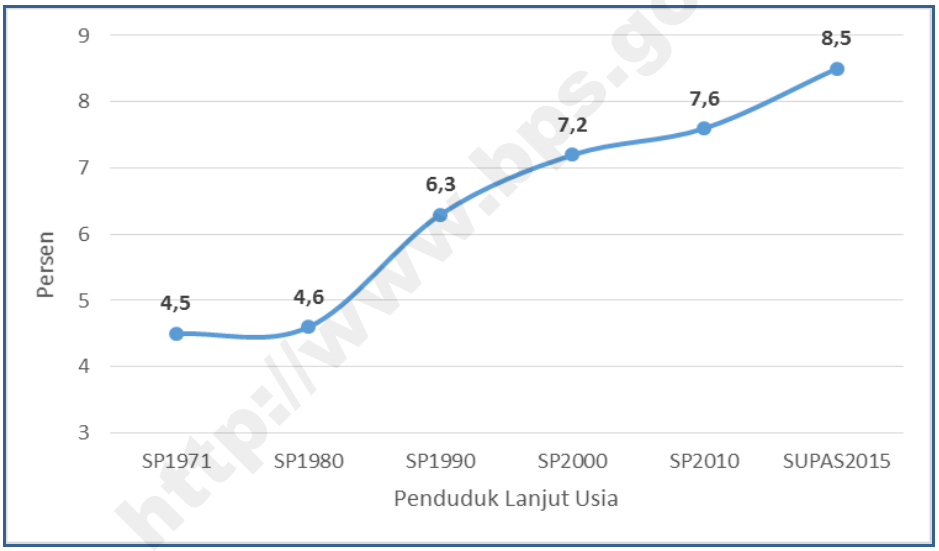

Sumber data: Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan SUPAS 2015

Dilihat menurut provinsi, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali adalah provinsi yang telah mengalami *ageing population*, dan provinsi yang hampir memasuki *ageing population* adalah Sulawesi Utara. Sementara itu provinsi dengan persentase penduduk lansia terkecil adalah Papua, Papua Barat dan Kepulauan Riau (Lihat Gambar 3.17).

Gambar 3.17
Persentase Penduduk Lanjut Usia menurut Provinsi, 2015

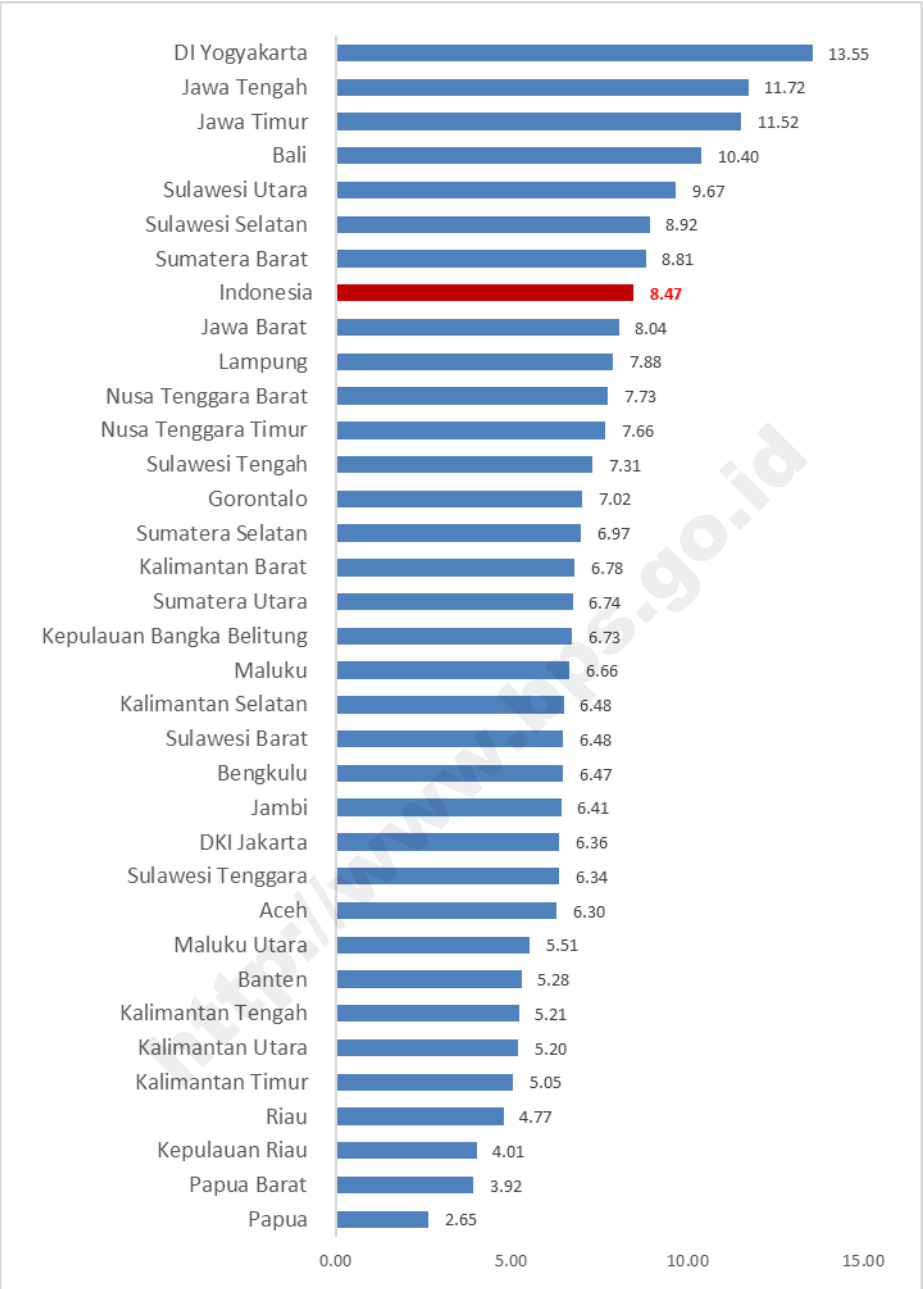

Sumber data : SUPAS 2015

3.8 Keluarga

SUPAS 2015 juga mengumpulkan data tentang keluarga yang tinggal dalam rumah tangga sampel. Data keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam perencanaan pembangunan keluarga, karena selama ini data yang tersedia dari BPS berbasis rumah tangga, sementara dalam program yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan data keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Rumah tangga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal dalam suatu bangunan dan melakukan pengelolaan makan secara bersama.

Dari hasil SUPAS 2015 tercatat jumlah keluarga di Indonesia sebanyak 81,21 juta keluarga, angka ini lebih besar dibandingkan jumlah rumah tangga yang hanya 66,2 juta. Dengan demikian rasio rumah tangga terhadap keluarga adalah 1,23, artinya dalam setiap rumah tangga di Indonesia terdapat 1,23 keluarga.

Secara umum keluarga di Indonesia menganut sistem kekerabatan Patriakal di mana laki-laki diakui sebagai kepala keluarga. Dari jumlah keluarga tersebut, kepala keluarga laki-laki sebesar 76,05 persen dan kepala keluarga perempuan sebesar 23,95 persen. Kepala keluarga dibedakan menurut umur di mana sebagian besar atau 77,8 persen kepala keluarga berumur 18–60 tahun dan 20 persen kepala keluarga berumur lebih dari 60 tahun, sementara masih terdapat 2,18 persen kepala keluarga berumur di bawah 18 tahun.

http://www.bps.go.id

Tabel 3.3
Jumlah Keluarga dan Persentase Kepala Keluarga berdasarkan Hasil SUPAS 2015

	Kepala Keluarga	Keluarga	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	61.756.759	76,05
	Perempuan	19.453.471	23,95
Umur	< 18	1.769.088	2,18
	18 – 60	63.180.667	77,80
	> 60	16.260.475	20,02
	Jumlah	**81.210.230**	**100,00**

Sumber data : SUPAS 2015

LAMPIRAN

http://www.bps.go.id

Tabel L.3.1

Jumlah Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	2.492.164	2.501.221	4.993.385
12 Sumatera Utara	6.947.776	6.975.486	13.923.262
13 Sumatera Barat	2.579.452	2.611.125	5.190.577
14 Riau	3.250.975	3.079.966	6.330.941
15 Jambi	1.733.366	1.663.798	3.397.164
16 Sumatera Selatan	4.087.186	3.955.856	8.043.042
17 Bengkulu	955.463	916.673	1.872.136
18 Lampung	4.161.543	3.948.058	8.109.601
19 Kepulauan Bangka Belitung	711.607	658.724	1.370.331
21 Kepulauan Riau	1.006.167	962.146	1.968.313
31 DKI Jakarta	5.102.215	5.051.919	10.154.134
32 Jawa Barat	23.675.943	22.992.271	46.668.214
33 Jawa Tengah	16.740.035	17.012.988	33.753.023
34 DI Yogyakarta	1.817.912	1.857.856	3.675.768
35 Jawa Timur	19.159.063	19.668.998	38.828.061
36 Banten	6.088.958	5.845.415	11.934.373
51 Bali	2.088.926	2.059.662	4.148.588
52 Nusa Tenggara Barat	2.342.329	2.487.789	4.830.118
53 Nusa Tenggara Timur	2.532.509	2.580.251	5.112.760
61 Kalimantan Barat	2.437.748	2.345.461	4.783.209
62 Kalimantan Tengah	1.299.013	1.191.165	2.490.178
63 Kalimantan Selatan	2.017.617	1.966.698	3.984.315
64 Kalimantan Timur	1.791.432	1.631.244	3.422.676
65 Kalimantan Utara	340.463	299.176	639.639
71 Sulawesi Utara	1.230.094	1.179.827	2.409.921
72 Sulawesi Tengah	1.467.651	1.405.206	2.872.857
73 Sulawesi Selatan	4.155.741	4.356.867	8.512.608
74 Sulawesi Tenggara	1.252.651	1.242.597	2.495.248
75 Gorontalo	566.892	564.778	1.131.670
76 Sulawesi Barat	642.175	637.819	1.279.994
81 Maluku	849.628	834.228	1.683.856
82 Maluku Utara	592.072	568.203	1.160.275
91 Papua Barat	457.258	411.561	868.819
94 Papua	1.657.865	1.485.223	3.143.088
INDONESIA	128.231.889	126.950.255	255.182.144

Sumber data : SUPAS 2015

Tabel L.3.2
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi
Tahun 1990-2000, 2000-2010 dan 2010-2015 (Persen)

Provinsi	1990-2000	2000-2010	2010-2015
(1)	(2)	(3)	(4)
11 Aceh	1,46	2,23	2,13
12 Sumatera Utara	1,32	1,1	1,41
13 Sumatera Barat	0,62	1,34	1,38
14 Riau	4,27	3,58	2,71
15 Jambi	1,83	2,56	1,90
16 Sumatera Selatan	1,24	1,85	1,54
17 Bengkulu	2,2	1,67	1,76
18 Lampung	1,17	1,24	1,28
19 Kepulauan Bangka Belitung	-	3,14	2,30
21 Kepulauan Riau	-	4,95	3,23
31 DKI Jakarta	0,13	1,41	1,11
32 Jawa Barat	2,24	1,9	1,63
33 Jawa Tengah	0,94	0,37	0,83
34 DI Yogyakarta	0,72	1,04	1,23
35 Jawa Timur	0,7	0,76	0,71
36 Banten	-	2,78	2,34
51 Bali	1,31	2,15	1,29
52 Nusa Tenggara Barat	1,81	1,17	1,42
53 Nusa Tenggara Timur	1,63	2,07	1,77
61 Kalimantan Barat	2,28	0,91	1,70
62 Kalimantan Tengah	2,98	1,79	2,40
63 Kalimantan Selatan	1,45	1,99	1,90
64 Kalimantan Timur	2,8	3,81	2,48
65 Kalimantan Utara	-	-	4,04
71 Sulawesi Utara	1,4	1,28	1,20
72 Sulawesi Tengah	2,52	1,95	1,74
73 Sulawesi Selatan	1,48	1,17	1,16
74 Sulawesi Tenggara	3,14	2,08	2,25
75 Gorontalo	-	2,26	1,70
76 Sulawesi Barat	-	2,68	2,01
81 Maluku	0,67	2,8	1,89
82 Maluku Utara	-	2,47	2,25
91 Papua Barat	-	3,71	2,70
94 Papua	3,1	5,39	2,10
Indonesia	**1,44**	**1,49**	**1,43**

Sumber data: Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010, dan SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Tabel L.3.3
Distribusi Penduduk menurut Pulau Tahun 2015

Region	Jumlah Penduduk			Persentase		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	27.925.699	27.273.053	55.198.752	21,8	21,5	21,6
Jawa	72.584.126	72.429.447	145.013.573	56,6	57,1	56,8
Bali & Nusa Tenggara	6.963.764	7.127.702	14.091.466	5,4	5,6	5,5
Kalimantan	7.886.273	7.433.744	15.320.017	6,2	5,9	6,0
Sulawesi	9.315.204	9.387.094	18.702.298	7,3	7,4	7,3
Maluku dan Papua	3.556.823	3.299.215	6.856.038	2,8	2,6	2,7
Total	**128.231.889**	**126.950.255**	**255.182.144**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Tabel L.3.4.
Kepadatan Penduduk menurut Provinsi
Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015

Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)			
	2000	2005	2010	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Aceh	68	-	78	86
12 Sumatera Utara	160	160	178	191
13 Sumatera Barat	101	108	115	124
14 Riau	45	52	64	73
15 Jambi	48	52	62	68
16 Sumatera Selatan	68	74	81	88
17 Bengkulu	73	78	86	94
18 Lampung	194	205	220	234
19 Kepulauan Bangka Belitung	55	63	74	83
21 Kepulauan Riau	127	155	205	240
31 DKI Jakarta	12.592	13.312	14.469	15.292
32 Jawa Barat	1.010	1.099	1.217	1.319
33 Jawa Tengah	952	972	987	1.029
34 DI Yogyakarta	996	1.065	1.104	1.173
35 Jawa Timur	727	754	784	812
36 Banten	838	932	1.100	1.235
51 Bali	545	584	673	718
52 Nusa Tenggara Barat	216	225	242	260
53 Nusa Tenggara Timur	78	87	96	105
61 Kalimantan Barat	27	27	30	32
62 Kalimantan Tengah	12	12	14	16
63 Kalimantan Selatan	77	84	94	103
64 Kalimantan Timur	12	22	17	27
65 Kalimantan Utara	-	-	-	8
71 Sulawesi Utara	144	153	164	174
72 Sulawesi Tengah	35	37	43	46
73 Sulawesi Selatan	153	181	172	182
74 Sulawesi Tenggara	48	52	59	66
75 Gorontalo	74	82	92	101
76 Sulawesi Barat	53	-	69	76
81 Maluku	25	27	33	36
82 Maluku Utara	25	28	32	36
91 Papua Barat	5	-	8	9
94 Papua	5	8	9	10
Indonesia	**107**	**112**	**124**	**134**

Sumber data: Sensus Penduduk 2000, 2010, dan SUPAS 2005, 2015

http://www.bps.go.id

Ringkasan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil SUPAS 2015 adalah sebanyak 255,18 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen per tahun. Struktur penduduk Indonesia pada tahun 2015 masih cenderung mengikuti tipe ekpansif, dimana mayoritas penduduk masih merupakan penduduk berusia muda. Rasio jenis kelamin masih diatas 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, walaupun di beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, rasio jenis kelamin berada di bawah 100 yang berarti jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di provinsi tersebut. Tingkat kepadatan penduduk pada SUPAS 2015 meningkat yaitu 134 penduduk per km persegi jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk di hasil SP 2010 (124 penduduk per km persegi). Pulau Jawa masih menjadi pulau terpadat di Indonesia dengan 57 persen penduduk, walaupun wilayahnya hanya mencakup 7 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Rasio ketergantungan dari hasil SUPAS 2015 sebesar 49,2 persen menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi yang merupakan kesempatan besar untuk dimanfaatkan karena penduduk Indonesia didominasi penduduk usia produktif. Namun demikian, SUPAS 2015 juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia Indonesia meningkat menjadi 8,5 persen dari 7,6 persen dari hasil SP 2010.

http://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 1996. *Laporan Eksekutif Nasional*. SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS 1995. Seri: S1. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2006. *Estimasi Parameter Demografi: Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Estimasi Parameter Demografi: Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Measure DHS, ICF International. 2012. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Laporan Pendahuluan*. Jakarta.

http://www.bps.go.id

4. Fertilitas dan Keluarga Berencana

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

4.1 Fertilitas

4.1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)

TFR adalah jumlah dari angka kelahiran menurut kelompok umur dan merupakan ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya.

TFR Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015 sebesar 2,28

Tingkat fertilitas Indonesia hasil Sensus Penduduk 1971-2010 maupun SUPAS 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.1 yang menyajikan hasil estimasi penghitungan TFR dengan metode Anak Kandung (*Own Children Method*). Estimasi TFR yang dihitung menggambarkan keadaan tiga tahun sebelum tahun sensus/survei yaitu tahun 1968, 1977, 1987, 1997, 2007, dan 2012. TFR secara nasional menunjukkan tren yang terus menurun, dari angka 5,61 anak pada tahun 1971 menjadi 2,41 anak pada tahun 2010, dan menurun lagi menjadi 2,28 anak pada tahun 2015.

http://www.bps.go.id

Gambar 4.1
Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia

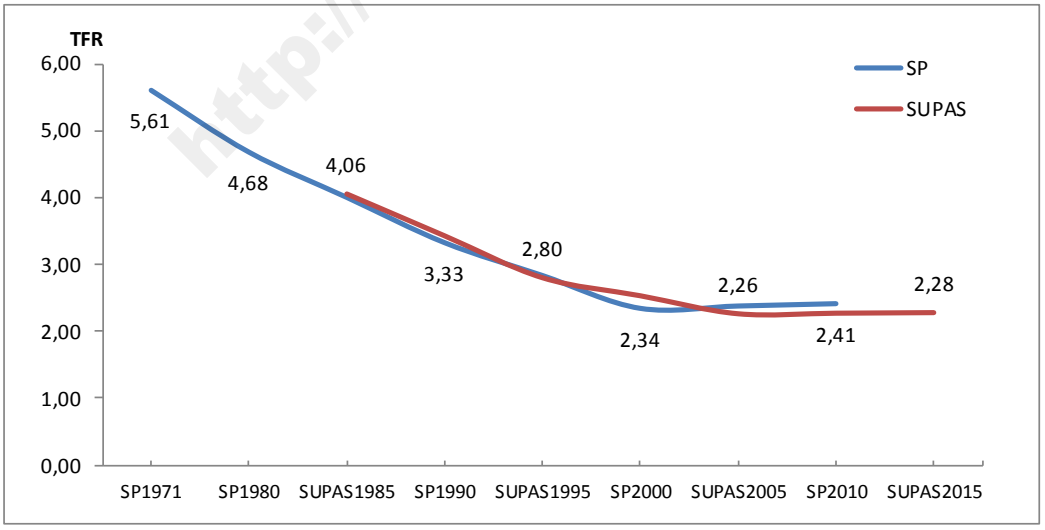

Sumber data: SP 1971, SP 1980, SP 1990, SP 2000, SP 2010, dan SUPAS 2015

4.1.2 *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)

ANGKA fertilitas menurut kelompok umur (*Age Specific Fertility Rate* atau ASFR) untuk periode tiga tahun terakhir sebelum SUPAS 2015 disajikan pada Gambar 4.2 ASFR menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok usia tertentu per 1000 perempuan pada kelompok usia tersebut. Grafik ASFR berbentuk U terbalik, yang artinya pada kelompok usia muda anak yang dilahirkan rendah, semakin bertambah umur semakin banyak, dan puncaknya pada perempuan umur 25-29 tahun, kemudian setelah kelompok umur tersebut anak yang dilahirkan mengalami penurunan.

Puncak ASFR terletak pada wanita umur 25-29 tahun

Gambar 4.2
Angka Fertilitas menurut Kelompok Umur (ASFR) Indonesia

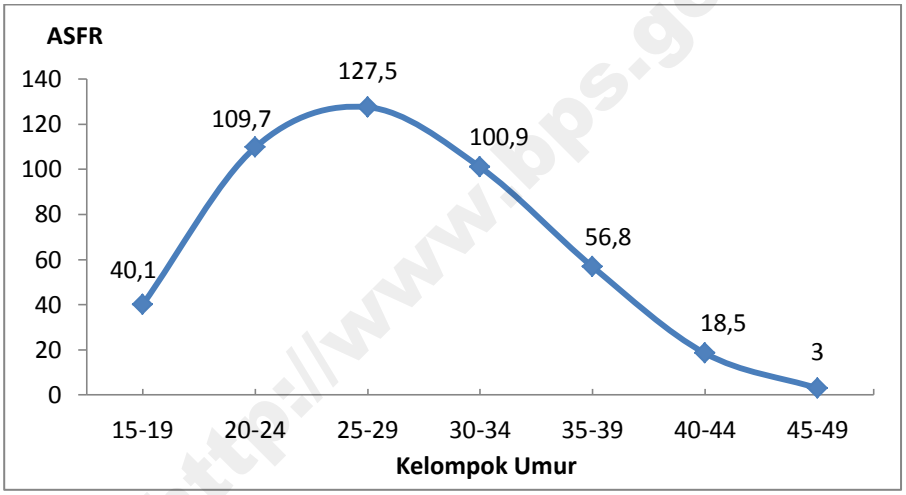

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

4.1.3 *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM)

RRATA-RATA umur kawin pertama merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat fertilitas, karena semakin muda seseorang melakukan perkawinan maka semakin panjang masa reproduksinya, sehingga akan semakin besar peluang melahirkan anak yang lebih banyak.

Umur kawin pertama (SMAM) wanita Indonesia sekitar 23,1 tahun

Dari hasil SUPAS 2015 rata-rata umur kawin pertama wanita Indonesia sekitar 23,1 tahun. Jika dirinci menurut daerah, rata-rata umur perkawinan pertama di daerah perdesaan masih lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan yaitu 21,8 tahun di perdesaan dan 24,1 tahun di perkotaan. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa hasil SP 2010 SMAM Indonesia untuk daerah perkotaan 23,3 tahun dan daerah perdesaan 21,1 tahun. Dari hasil SP 2000 rata-rata umur kawin pertama untuk daerah perkotaan adalah 23,9 tahun dan 21,3 tahun untuk daerah perdesaan. Dapat disimpulkan bahwa peluang jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita di perdesaan akan lebih besar dibandingkan jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita di perkotaan.

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 secara umum tingkat pendidikan seorang wanita mempengaruhi rata-rata umur kawin pertamanya. Dari hasil SP 2010 rata-rata umur kawin pertama wanita yang berpendidikan SD adalah 20,4 tahun dan hasil SUPAS 2015 adalah 20,8 tahun. Terjadi peningkatan usia perkawinan pertama wanita yang berpendidikan SMP yaitu hasil SP 2010 adalah 21,2 tahun dan 21,4 tahun berdasarkan hasil SUPAS 2015. Sementara itu untuk wanita yang berpendidikan SMA rata-rata umur kawin pertama hasil SP 2010 adalah 23,5 tahun dan hasil SUPAS 2015 adalah 24,0 tahun. Untuk yang berpendidikan sarjana/universitas rata-rata umur kawin pertama wanita sudah diatas 25 tahun. Dapat dikatakan bahwa makin tinggi pendidikan seorang wanita maka makin tinggi pula usia perkawinan pertamanya.

Gambar 4.3
Umur Kawin Pertama (SMAM) Wanita menurut Pendidikan, Tahun 2010-2015

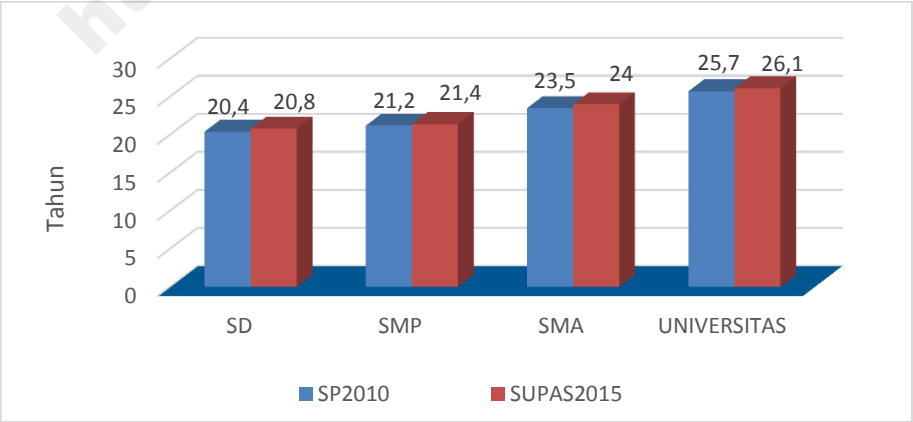

Sumber data: SP 2010 dan SUPAS 2015

4.2 Keluarga Berencana

4.2.1 Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB

HASIL SUPAS 2015 menyajikan informasi tentang prevalensi pemakaian kontrasepsi di antara wanita berstatus kawin/hidup bersama berusia 15-49 tahun menurut beberapa variabel karakteristik latar belakang.

CPR Indonesia sebesar 61,60 persen

Pada tahun 2015 terdapat 61,6 persen wanita berstatus kawin/hidup bersama usia 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB. Wanita yang menggunakan alat/cara KB tersebut, sebagian besar di antaranya menggunakan metode kontrasepsi modern (98,5 persen) dan 1,5 persen menggunakan metode kontrasepsi tradisional. Di antara cara KB modern yang dipakai, suntik KB merupakan alat kontrasepsi terbanyak digunakan oleh wanita berstatus kawin/hidup bersama (59,0 persen), diikuti oleh pil KB hampir 21,6 persen. Pemakaian alat kontrasepsi pada wanita kawin/hidup bersama tertinggi pada kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebesar 67,3 persen dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 45,2 persen. Wanita dari semua umur cenderung untuk memakai alat kontrasepsi modern jangka pendek seperti suntikan dan pil KB.

http://www.bps.go.id

Gambar 4.4
***Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) Wanita Indonesia**
Tahun 2015

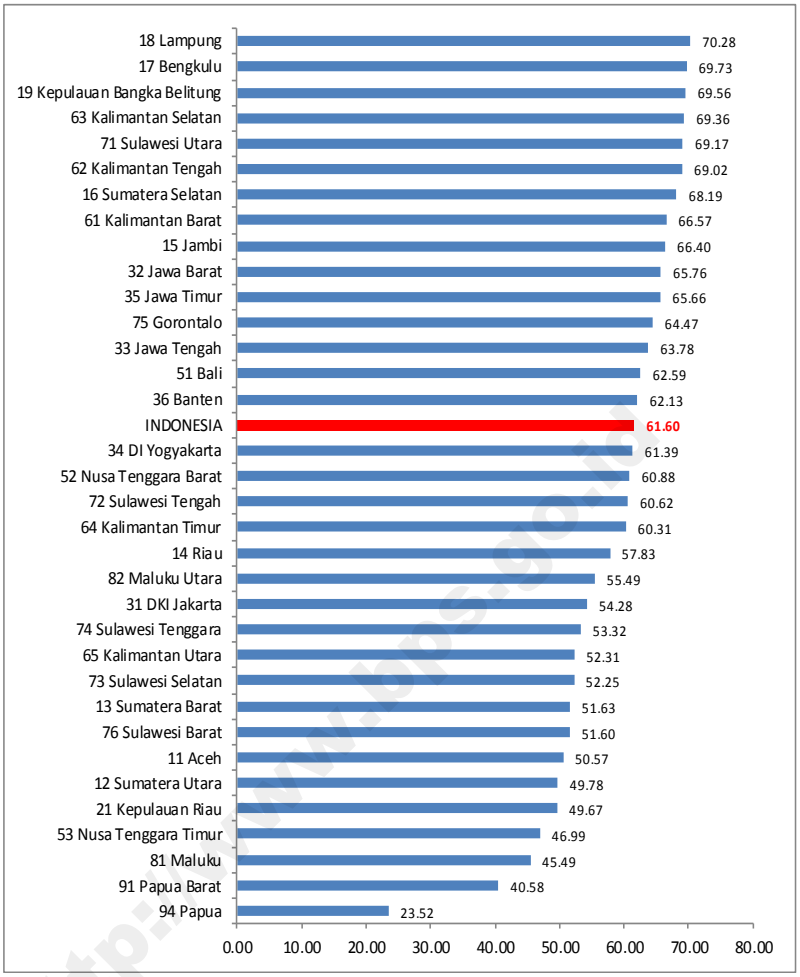

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

4.2.2 Keinginan Mempunyai Anak

SUPAS 2015 memuat informasi mengenai wanita pernah kawin berdasarkan keinginan mempunyai anak (lagi). Secara nasional, sebagian besar wanita pernah kawin tidak menginginkan anak lagi (45,80 persen), sedangkan sisanya ingin menunda lebih dari 24 bulan (31,49 persen), ingin segera mempunyai anak (18,52 persen), dan lainnya (4,20 persen). Hal yang sama juga terdapat pada sebagian besar provinsi, dimana sebagian besar wanita pernah kawin tidak menginginkan anak (lagi), kecuali Provinsi Aceh, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara dimana sebagian besar wanita pernah kawin ingin segera mempunyai anak.

Gambar 4.5
Keinginan Mempunyai Anak di Indonesia, 2015

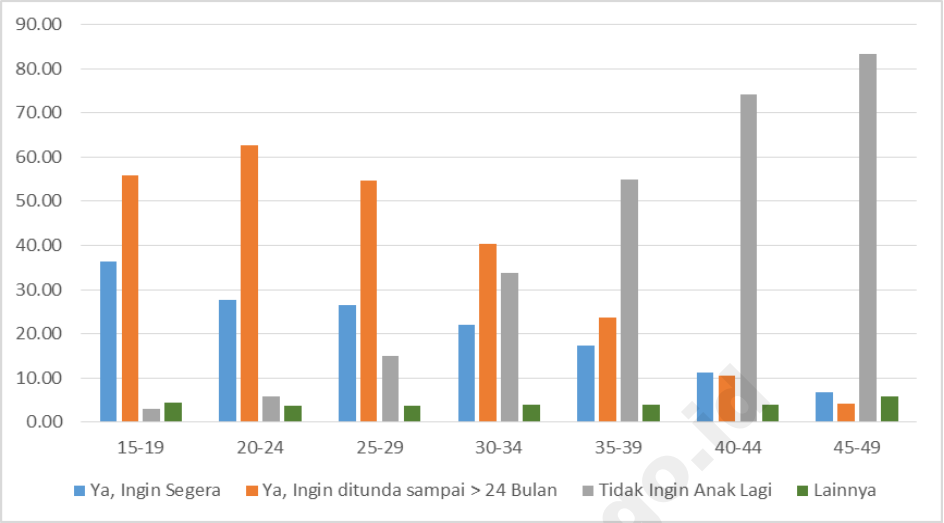

Sumber data: SUPAS 2015

Wanita muda (15-34 tahun) cenderung ingin menunda punya anak > 24 bulan, sedangkan di usia yang lebih tua cenderung tidak ingin anak lagi

Berdasarkan kelompok umur, wanita umur 15-34 tahun mayoritas ingin menunda lebih dua tahun, sedangkan wanita umur 35-49 tahun cenderung tidak ingin mempunyai anak lagi. Sementara itu, keinginan untuk segera mempunyai anak tertinggi adalah wanita umur 15-19 tahun dan terendah pada umur 45-49 tahun, hal ini dapat dipahami karena wanita muda khususnya umur 15-19 tahun pada umumnya belum mempunyai anak, sedangkan wanita umur 45-49 tahun sudah mempunyai anak sehingga keinginan untuk mempunyai anak lagi sangat kecil.

http://www.bps.go.id

Ringkasan

Jika dilihat dari tren fertilitas di Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk dan SUPAS, terlihat bahwa ada kecenderungan untuk turun. Namun demikian, sejak Sensus Penduduk 2000 terjadi stagnasi TFR pada 2,3. Bahkan hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 2,4, walaupun hasil SUPAS 2015 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 2,3 kembali. Rata-rata umur perkawinan pertama wanita adalah 23,1 tahun, serta prevalensi penggunaan alat KB untuk wanita kawin adalah 61,60.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

5. Mortalitas

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

5.1 Kematian Bayi

KEMATIAN bayi adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun). Angka kematian bayi Indonesia menurun tajam, dari 47 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2000 menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup pada SUPAS 2005, 26 per 1000 kelahiran hidup pada SP 2000 dan 22 per 1000 kelahiran hidup pada SUPAS 2015 (Gambar 5.1). Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita Indonesia membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

IMR Indonesia tahun 2015 sekitar 22 anak per 1000 kelahiran hidup

Gambar 5.1
Angka Kematian Bayi (IMR) Indonesia

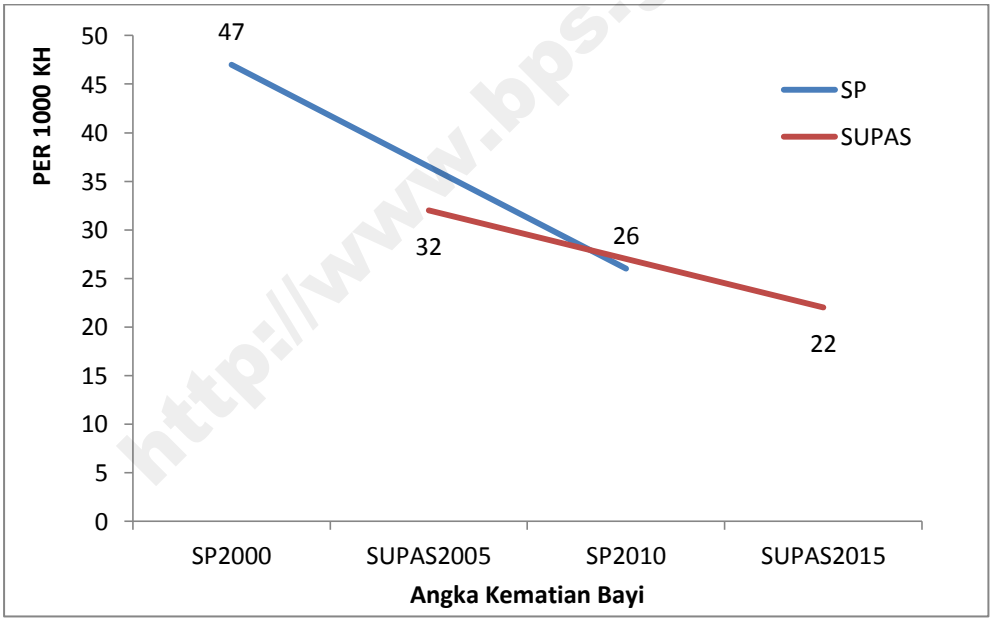

Keterangan : KH = Kelahiran Hidup
Sumber data : SP 2000, SUPAS 2005, SP 2010, dan SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

5.2 Angka Harapan Hidup

ANGKA harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan Angka harapan hidup, yang dimaksud adalah rata- rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Dari hasil SUPAS 2015 angka harapan hidup di Indonesia sebesar 72,1 artinya setiap anak yang dilahirkan akan mempunyai harapan hidup secara rata-rata sampai berumur 72,1 tahun. Bila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka harapan hidup perempuan selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 74,36 tahun untuk perempuan dan 70,26 tahun untuk laki-laki.

Berdasarkan hasil SP 2000 angka harapan hidup Indonesia sebesar 65 tahun yang kemudian naik menjadi 69,2 tahun pada SUPAS 2005, 71 tahun pada SP 2010 dan 72,1 tahun pada SUPAS 2015 (Gambar 5.2).

Gambar 5.2
Angka Harapan Hidup Indonesia

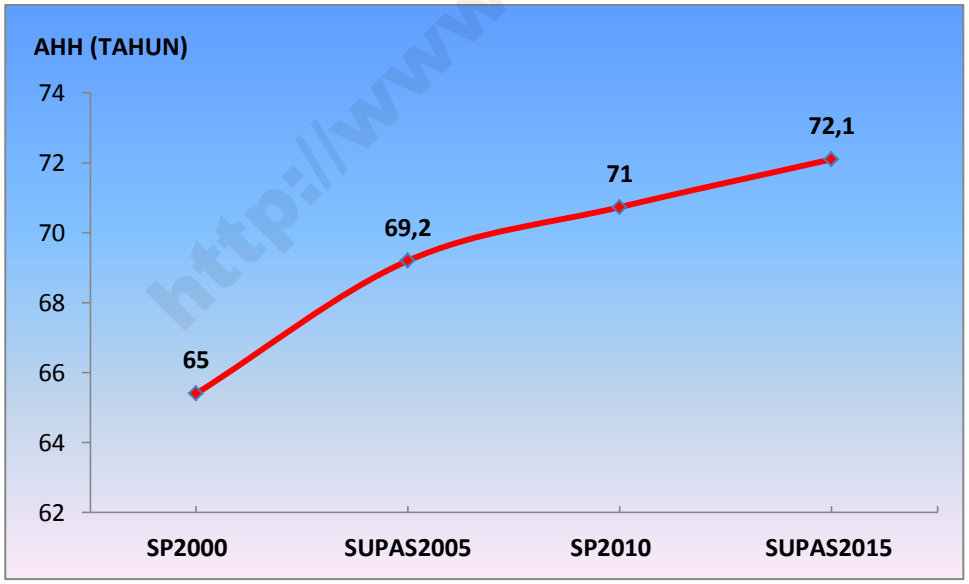

Sumber data: SP 2000, SUPAS 2005, SP 2010, dan SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

5.3 Kematian Anak

ANGKA kematian anak/*Child Mortality Rate* (CMR) adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Berbeda dengan Angka Kematian Balita (*Under Five Mortality*), angka kematian anak tidak mencakup kematian bayi sedangkan angka kematian balita termasuk kematian bayi. Di Indonesia, angka kematian anak pada tahun 2015 sebesar 4,03 yang artinya terdapat sekitar 4 anak umur 1-4 tahun yang meninggal per 1000 anak pada umur yang sama.

5.4 Kematian Balita

ANGKA kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Penghitungan angka kematian balita mencakup angka kematian bayi dan angka kematian anak. Hasil SUPAS 2015 menunjukkan angka kematian balita sebesar 25,74 yang artinya terdapat sekitar 26 anak umur 0-4 tahun yang meninggal per 1000 anak pada umur yang sama.

http://www.bps.go.id

5.5 Kematian Dewasa

KEMATIAN dewasa merupakan kematian pada usia 15-45 tahun per 1000 penduduk pada waktu tertentu di suatu daerah. Hasil SUPAS 2015 menunjukkan angka kematian dewasa laki-laki sebesar 171,06 per 1000 penduduk, sedangkan perempuan sebesar 122,03 per 1000 penduduk.

Dibandingkan dengan kematian dewasa tahun 2010, kematian dewasa tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 angka kematian dewasa laki-laki sebesar 180,36 per 1000 penduduk sedangkan perempuan sebesar 130,17 per 1000 penduduk.

5.6 Kematian Ibu

KEMATIAN Maternal (MMR) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain.

Angka Kematian Ibu tahun 2015 sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup

Hasil SP 2010 menunjukkan Angka Kematian Ibu di Indonesia sebesar 346 yang artinya terdapat 346 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu hasil SUPAS 2015 lebih rendah daripada hasil SP 2010, yaitu sebesar 305.

http://www.bps.go.id

Ringkasan

Mortalitas hasil SUPAS 2015 terbagi menjadi angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian balita, angka kematian dewasa serta angka kematian ibu. Karena asumsi *completeness* yang tidak terpenuhi maka penghitungan angka kematian menggunakan metode tidak langsung untuk mengatasi kekurangan tersebut. Angka kematian bayi menurut hasil SUPAS 2015 adalah sebesar 22 bayi per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami penurunan dari hasil sensus penduduk yang dilaksanakan sebelumnya. Hasil SUPAS 2015 juga menunjukkan angka kematian anak sebesar 4 anak per 1000. Sedangkan Angka Kematian Balita yang mencakup kematian bayi dan kematian anak hasil SUPAS 2015 adalah 26 per 1000 Balita. Angka kematian dewasa laki-laki hasil SUPAS 2015 adalah 171 per 1000 penduduk, sedangkan angka kematian dewasa perempuan adalah 122 per 1000 penduduk. Angka Kematian Ibu yang merupakan salah satu indikator SDGs yang juga dihitung dari SUPAS 2015 menghasilkan angka 305 kematian ibu per 100 000 kelahiran hidup.

http://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 1996. *Laporan Eksekutif Nasional*. SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS 1995. Seri : S1. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2006. *Estimasi Parameter Demografi : Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Estimasi Parameter Demografi : Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Measure DHS, ICF International. 2012. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Laporan Pendahuluan*. Jakarta.

http://www.bps.go.id

6. Mobilitas

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Mobilitas

SUPAS 2015 menangkap fenomena mobilitas permanen dan non permanen. Mobilitas permanen mencakup migrasi seumur hidup, migrasi risen, dan migrasi total. Sementara mobilitas non permanen meliputi kegiatan ulang-alik (*commuting*) dan mobilitas musiman.

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (1958) pengertian migrasi adalah bentuk dari mobilitas geografi atau mobilitas ke ruangan dari satu unit geografi ke unit geografi lainnya yang menyangkut perubahan tempat tinggal yang bersifat permanen dari tempat asal ke tempat tujuan. Migrasi juga tidak hanya menyangkut perpindahan internal dalam suatu negara tetapi juga antarnegara, antarregion, dan bahkan antarbenua. Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan transportasi telah menyebabkan kedekatan antarwilayah dan membuka peluang bagi penduduk untuk mengenal berbagai daerah dan membaca peluang daerah tersebut, baik peluang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Lee (1966) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mendasari seseorang memutuskan untuk bermigrasi yaitu faktor di tempat asal, faktor di tempat tujuan, rintangan antara, dan faktor individu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun politik. Faktor-faktor di daerah asal maupun daerah tujuan tersebut bekerja sama untuk menahan atau justru mendorong seseorang untuk melakukan migrasi. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor individu yang sangat menentukan seseorang untuk mengambil keputusan pindah atau tinggal ditempat.

Dewasa ini, mobilitas penduduk telah berubah dari mobilitas yang permanen ke mobilitas yang tidak permanen. Penduduk tidak harus menetap di daerah baru, tetapi cukup berintegrasi dengan perekonomian di daerah baru. Mereka mempengaruhi pasar kerja, pola konsumsi, pola produksi, dan pola pembiayaan daerah yang mereka datangi (Ananta dan Chotib, 1998). Seiring dengan perkembangan jaman dan pembangunan di segala bidang, maka fenomena pergerakan manusia juga semakin berkembang dan maju. Berbagai aktivitas ekonomi, dan sosial tidak lagi dilakukan dengan harus berpindah tempat tinggal. Ketersediaan transportasi serta sarana lain yang memadai memungkinkan orang berkegiatan tidak di kabupaten/kota tempat tinggalnya, sebaliknya berkegiatan di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya dengan melakukan perjalanan ulang-alik,

http://www.bps.go.id

pergi/pulang pada hari yang sama. Fenomena mobilitas ulang-alik menjadi semakin biasa dan berkembang. Mobilitas ulang-alik umumnya dilakukan pada tenaga kerja. Selain itu, mobilitas ulang alik terjadi karena mahalnya biaya hidup termasuk mahalnya harga rumah di pusat kota yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga para komuter ini memilih tinggal di wilayah pinggiran sekitar pusat kota.

6.1 Mobilitas Permanen

6.1.1 Migrasi Seumur Hidup

MIGRASI Seumur Hidup menangkap perbedaan tempat tinggal seseorang dengan tempat lahirnya. Dari tahun ke tahun, volume migran seumur hidup selalu meningkat. Jenis migrasi ini sangat besar dalam volume maupun dari segi *rate*/angka. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan rujukan waktu. Jika tempat lahir seseorang berbeda dengan tempat tinggalnya saat diwawancarai, maka orang tersebut sudah dikatakan sebagai migran. Bisa jadi waktu lahirnya seseorang tersebut sudah sangat lama atau bahkan masih terbilang baru selama orang tersebut di dalam konsep penduduk tercatat sudah berpindah tempat tinggal.

Pola migrasi seumur hidup dari waktu ke waktu hampir sama, beberapa provinsi terlihat sebagai daerah pengirim migran dan sebagian lainnya berpola sebagai daerah penerima migran. Angka migrasi neto positif menunjukkan lebih banyak migran yang masuk daripada yang keluar dari suatu daerah, sehingga daerah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah penerima migran. Migrasi neto positif terbesar masih terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat, masing-masing sebesar 397, 247, 285 dan 254, migran per 1,000 penduduk. Ini menunjukkan lebih besarnya migran yang datang ke wilayah-wilayah ini dibandingkan penduduk yang keluar dari wilayah tersebut. Provinsi Kepulauan Riau masih dengan daya tariknya sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar yang berbatasan dengan negara Singapura. Sementara, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki daya tarik penghasil minyak bumi dan industri. Provinsi Kalimantan Utara juga cukup besar, namun hal ini masih terkait dengan wilayah asalnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur.

http://www.bps.go.id

Tabel 6.1
Jumlah dan Angka Migrasi Masuk, Keluar, dan Neto Seumur Hidup menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Migran			Angka Migrasi		
	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	209.815	257.736	-47.921	42	52	-10
Sumater utara	519.843	2.207.072	-1.687.229	37	159	-121
Sumatera Barat	358.123	1.148.930	-790.807	69	221	-152
Riau	1.881.07	319.558	1.561.521	297	50	247
Jambi	710.428	197.263	513.165	209	58	151
Sumatera Selatan	966.060	737.585	228.475	120	92	28
Bengkulu	337.041	110.837	226.204	180	59	121
Lampung	1.362.38	740.854	621.533	168	91	77
Kep, Bangka Belitung	192.729	106.125	86.604	141	77	63
Kep, Riau	881.035	99.975	781.060	448	51	397
DKI Jakarta	3.647.32	2.701.145	946.183	359	266	93
Jawa Barat	4.961.54	2.348.128	2.613.413	106	50	56
Jawa Tengah	1.015.61	6.551.768	-5.536.153	30	194	-164
DI Yogyakarta	571.948	912.407	-340.459	156	248	-93
Jawa Timur	924.152	3.821.692	-2.897.540	24	98	-75
Banten	2.491.58	579.790	1.911.799	209	49	160
Bali	428.511	264.702	163.809	103	64	39
Nusa Tenggara Barat	121.828	209.269	-87.441	25	43	-18
Nusa Tenggara Timur	176.608	253.712	-77.104	35	50	-15
Kalimantan Barat	293.992	185.924	108.068	61	39	23
Kalimantan Tengah	527.473	105.598	421.875	212	42	169
Kalimantan Selatan	509.967	302.936	207.031	128	76	52
Kalimantan Timur	1.120.01	144.527	975.490	327	42	285
Kalimantan Utara	189.396	43.214	146.182	296	68	229
Sulawesi Utara	188.136	195.544	-7.408	78	81	-3
Sulawesi Tengah	465.614	121.928	343.686	162	42	120
Sulawesi Selatan	346.168	1.415.688	-1.069.520	41	166	-126
Sulawesi Tenggara	443.602	191.917	251.685	178	77	101
Gorontalo	64.448	103.892	-39.444	57	92	-35
Sulawesi Barat	175.283	108.643	66.640	137	85	52
Maluku	134.500	215.078	-80.578	80	128	-48
Maluku Utara	106.920	61.971	44.949	92	53	39
Papua Barat	272.151	51.759	220.392	313	60	254
Papua	491.656	89.261	402.395	156	28	128

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Sementara, angka migrasi neto negatif menunjukkan lebih banyak migran yang keluar daripada yang masuk ke suatu daerah, sehingga daerah tersebut bisa kita katakan sebagai daerah pengirim migran. Provinsi dengan migrasi neto negatif yang besar terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, masing-masing sebesar 152, 121, 164, 126 migran per 1,000 penduduk.

Bila dilihat menurut arus migrasi masuk ke Provinsi Kepulauan Riau, maka pendatang terbesar berasal dari dua provinsi sekitar Kepulauan Riau yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta satu lagi berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Sementara, arus migrasi keluar dari Jawa Tengah, selain ke Provinsi Kepulauan Riau, maka sebagian besar migran Jawa Tengah menuju provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada wilayah timur Indonesia, arus migrasi keluar dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah ke Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

6.1.2 Migrasi Risen

MIGRASI Risen menangkap perbedaan tempat tinggal sekarang dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu dari seseorang. Migrasi risen lebih menggambarkan fenomena perpindahan terkini, sehingga banyak studi atau penelitian yang menggunakan jenis ukuran migrasi ini. Beberapa provinsi menunjukkan pola migrasi risen yang sama dengan hasil SP 2010. Angka migrasi risen neto positif terbesar masih dipegang oleh tiga provinsi yang sama: Kepulauan Riau, Papua Barat, dan D.I Yogyakarta, masing-masing sebesar 70, 51, dan 36 migran per 1,000 penduduk. Papua Barat menjadi daya tarik karena wilayahnya yang subur serta merupakan daerah pertambangan, sementara D.I Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar. Migrasi risen neto negatif yang besar selama 5 tahun terakhir diduduki oleh provinsi-provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Maluku, masing-masing sebesar 22, 10, dan 8 migran per 1,000 penduduk. Ketiga provinsi ini merupakan daerah pengirim migran. Besarnya migran yang keluar dari DKI Jakarta umumnya menuju provinsi sekitarnya yaitu Jawa Barat dan Banten. Sementara yang keluar dari provinsi Sumatera Utara adalah ke Riau dan Kepulauan Riau, serta untuk wilayah Maluku pada umumnya banyak keluar ke Papua Barat dan Papua.

Alasan pindah dapat dilihat pada Gambar 6.1. Dari jumlah migran risen sebesar 4,813,397 orang, ada dua alasan pindah yang utama. Pertama adalah

http://www.bps.go.id

alasan Ikut suami/istri/orangtua/anak sebanyak 40 persen. Persentase ini cukup besar, karena dalam satu rumah tangga, bila ada KRT yang pindah dengan alasan pekerjaan, maka istri dan juga anak-anaknya yang ikut pindah pasti akan memberikan jawaban pada kategori ini. Pola pada setiap provinsi juga memberikan indikasi yang hampir sama, kecuali pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Alasan pindah yang kedua yang memang umum adalah karena pekerjaan dan mencari pekerjaan, masing-masing sebesar 27 dan 12 persen.

Gambar 6.1
Persentase Alasan Pindah Migran Risen

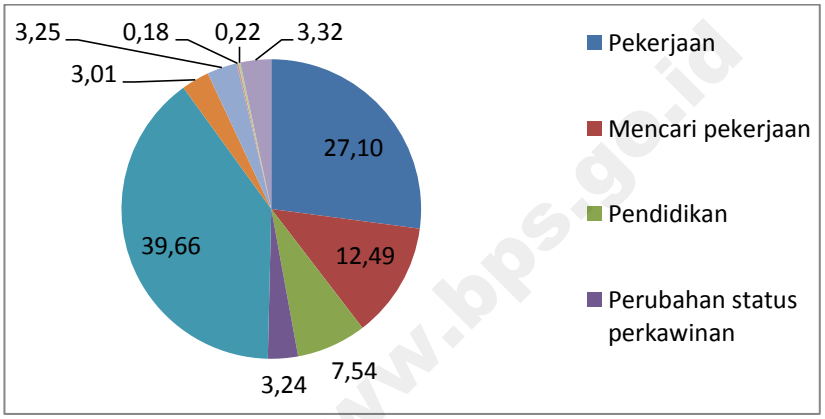

Sumber data: SUPAS 2015

Alasan pindah untuk bekerja bagi migran DKI Jakarta sangat besar (41%). Hal ini dapat dimengerti karena Jakarta merupakan provinsi yang memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Firman (1994), mengatakan bahwa migrasi merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Todaro (1976), menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk bermigrasi disebabkan oleh usaha untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Migrasi dianggap sebagai suatu bentuk investasi individu, yang diputuskan setelah yang bersangkutan terlibat dalam kalkulasi biaya dan manfaat. Demikian juga dengan alasan pindah migran di Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Barat yang juga menyatakan motif ekonomi sebagai alasan pindah (39 % dan 38 %). Namun untuk kasus kedua provinsi ini mungkin agak berbeda dengan yang ada di Jakarta, migran di kedua provinsi ini umumnya melakukan perpindahan ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI.

http://www.bps.go.id

Tabel 6.2
Jumlah dan Angka Migrasi Masuk, Keluar dan Neto Risen menurut Provinsi
Hasil SUPAS 2015

Provinsi	Jumlah Migran			Angka Migrasi		
	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	40.616	39.649	967	9	9	0
Sumatera tara	142.774	270.157	-127.383	11	22	-10
Sumatera Barat	138.826	139.548	-722	30	30	0
Riau	215.350	131.711	83.639	38	23	15
Jambi	67.574	66.794	780	22	22	0
Sumatera Selatan	75.760	110.308	-34.548	10	15	-5
Bengkulu	38.574	27.477	11.097	23	16	7
Lampung	81.200	124.478	-43.278	11	17	-6
Kep. Bangka Belitung	32.417	21.554	10.863	26	17	9
Kep. Riau	189.498	67.520	121.978	108	39	70
DKI Jakarta	499.101	706.353	-207.252	54	76	-22
Jawa Barat	750.999	506.573	244.426	18	12	6
Jawa Tengah	518.103	647.482	-129.379	17	21	-4
DI Yogyakarta	208.257	84.915	123.342	61	25	36
Jawa Timur	315.543	421.349	-105.806	9	12	-3
Banten	324.472	207.385	117.087	30	19	11
Bali	139.849	50.887	88.962	37	13	23
Nusa Tenggara Barat	105.470	46.504	58.966	24	11	14
Nusa Tenggara Timur	66.123	66.115	8	15	15	0
Kalimantan Barat	37.359	34.994	2.365	9	8	1
Kalimantan Tengah	78.396	52.463	25.933	35	23	11
Kalimantan Selatan	86.621	55.117	31.504	24	15	9
Kalimantan Timur	120.005	101.169	18.836	38	32	6
Kalimantan Utara	34.691	18.478	16.213	61	32	28
Sulawesi Utara	33.559	35.851	-2.292	15	16	-1
Sulawesi Tengah	62.862	37.416	25.446	24	14	10
Sulawesi Selatan	136.430	177.336	-40.906	18	23	-5
Sulawesi Tenggara	57.523	46.234	11.289	26	21	5
Gorontalo	15.034	17.110	-2.076	15	17	-2
Sulawesi Barat	33.941	27.439	6.502	30	24	6
Maluku	25.317	37.157	-11.840	17	25	-8
Maluku Utara	20.173	14.617	5.556	20	14	5
Papua Barat	59.777	20.188	39.589	78	26	51
Papua	61.203	47.849	13.354	22	17	5

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Tabel 6.3 Karakteristik Migran Risen

Karakteristik	Persentase
(1)	(2)
Jenis kelamin	
Laki-laki	51,34
Perempuan	48,66
Umur	
5-14	12,20
15-19	8,38
20-24	21.02
25-29	20,13
30-34	14,04
35-39	9,40
40+	14.83
Status Perkawinan	
Belum kawin	35,60
Kawin	59,85
Cerai Hidup+Cerai Mati	4,55
Pendidikan	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3,66
Tidak/Belum Tamat SD	11,80
Tamat SD	15,55
Tamat SMP	19,17
Tamat SMA	37,16
Tamat Universitas ke Atas	12,66
Kegiatan Utama	
Bekerja	59,43
Sekolah	9,07
Mengurus rumah tangga	29,01
Lainnya	2,49
Sektor Pekerjaan	
Pertanian	15,75
Manufaktur	25,33
Jasa-jasa	58,92
Status Pekerjaan	
Berusaha sendiri	15,16
Berusaha dibantu buruh tetap/tidak tetap	8,85
Buruh/karyawan	62,02
Pekerja bebas di pertanian dan non	7,26
Pekerja Keluarga	6,71

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Secara umum, komposisi migran risen laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 106. Namun, bila dilihat menurut provinsi komposisi ini berbeda-beda. Tujuh puluh tiga persen migran berada pada kelompok umur sangat produktif antara 15-40 tahun, dengan puncak sebesar 21 persen berada di kelompok umur 20-24 tahun. Enam puluh persen migran berstatus kawin dan 36 persen migran berstatus belum kawin. Pola ini hampir sama antara migran laki-laki dan perempuan. Migran berpendidikan mayoritas tamat SMA, tamat SMP, dan juga tamat SD, masing-masing sebesar 37, 19, dan 16 persen.

Lima puluh sembilan persen migran kegiatan utamanya adalah bekerja dan 29 persen mengurus rumah tangga. Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka migran perempuan, 56 persen mempunyai kegiatan utama mengurus rumah tangga. Bagi migran yang bekerja, 59 persen bekerja di sektor jasa-jasa, 25 persen di sektor manufaktur, dan 16 persen di sektor pertanian. Enam puluh dua persen migran yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan. Keberadaan buruh/karyawan ini mendominasi provinsi-provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten dimana kelima provinsi ini merupakan sentra perusahaan industri dan jasa.

6.1.3 Migrasi Total

MIGRASI total secara absolut dan *rate* angkanya cukup besar, karena migrasi total menangkap semua jenis perpindahan tanpa melihat referensi waktu pindahnya kapan. Migrasi total menangkap perubahan tempat tinggal sebelumnya dengan tempat tinggal saat pencacahan. Sehingga secara teori perpindahan ini juga dapat mencakup migran seumur hidup maupun migran risen.
Angka migrasi total neto positif terbesar masih dimiliki oleh tiga provinsi: Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan kalimantan Timur, masing-masing sebesar 331, 227 dan 219 migran per 1,000 penduduk. Sementara, migrasi total neto negatif yang besar diduduki oleh provinsi-provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 113, 98, dan 89 migran per 1,000 penduduk.

http://www.bps.go.id

Tabel 6.4
Jumlah dan Angka Migrasi Total Masuk, Keluar, dan Neto Menurut Provinsi
Hasil SUPAS 2015

Provinsi	Jumlah Migran			Angka Migrasi		
	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	234.976	257.496	-22.520	47,06	51,57	-4,51
Sumatera utara	650.431	1.896.0	-1.245.600	46,72	136,18	-89,46
Sumatera Barat	588.527	973.964	-385437	113,38	187,64	-74,26
Riau	1.754.5	509.265	1.245.324	277,15	80,44	196,70
Jambi	692.876	280.018	412858	203,96	82,43	121,53
Sumatera Selatan	974.293	745.396	228.897	121,13	92,68	28,46
Bengkulu	344.133	133.864	210.269	183,82	71,50	112,32
Lampung	1.266.0	771.352	494.694	156,12	95,12	61,00
Kep. Bangka Belitung	193.486	101.752	91.734	141,20	74,25	66,94
Kep. Riau	873.587	223.034	650.553	443,83	113,31	330,51
DKI Jakarta	3.468.7	4.620.9	-1.152.219	341,61	455,08	-113,47
Jawa Barat	5.100.2	2.642.5	2.457.705	109,29	56,62	52,66
Jawa Tengah	2.140.8	5.457.9	-3.317.165	63,43	161,70	-98,28
DI Yogyakarta	694.839	849.419	-154.580	189,03	231,09	-42,05
Jawa Timur	1.360.8	3.400.4	-2.039.539	35,05	87,58	-52,53
Banten	2.413.4	871.219	1.542.264	202,23	73,00	129,23
Bali	440.135	315.958	124.177	106,09	76,16	29,93
Nusa Tenggara Barat	311.167	202.639	108.528	64,42	41,95	22,47
Nusa Tenggara Timur	288.462	235.158	53304	56,42	45,99	10,43
Kalimantan Barat	306.109	198.598	107.511	64,00	41,52	22,48
Kalimantan Tengah	519.901	193.608	326.293	208,78	77,75	131,03
Kalimantan Selatan	511.515	354.242	157.273	128,38	88,91	39,47
Kalimantan Timur	1.055.3	307.052	748.321	308,35	89,71	218,64
Kalimantan Utara	187.248	73.370	113.878	292,74	114,71	178,03
Sulawesi Utara	205.592	208.694	-3.102	85,31	86,60	-1,29
Sulawesi Tengah	723.069	147.534	575.535	251,69	51,35	200,34
Sulawesi Selatan	1.521.1	1.342.8	178.385	178,70	157,74	20,96
Sulawesi Tenggara	768.286	201.882	566.404	307,90	80,91	226,99
Gorontalo	160.163	106.971	53.192	141,53	94,52	47,00
Sulawesi Barat	302.108	117.688	184.420	236,02	91,94	144,08
Maluku	147.608	215.280	-67.672	87,66	127,85	-40,19
Maluku Utara	120.763	68.838	51.925	104,08	59,33	44,75
Papua Barat	264.944	83.819	181.125	304,95	96,47	208,47
Papua	467.411	165.081	302.330	148,71	52,52	96,19

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

6.2 Mobilitas Non Permanen

6.2.1 Komuter

KEMUDAHAN transportasi serta akses yang dapat dijangkau menyebabkan fenomena perjalanan ulang-alik semakin berkembang dewasa ini. Menurut Abler, Adam dan Gould (1972), gerak ulang alik pada hakekatnya adalah interaksi antara satu daerah dengan daerah lainnya yang timbul akibat adanya kebutuhan di suatu daerah dan adanya pemasokan di daerah lainnya, tidak adanya sumber lain di antara daerah-daerah yang berinteraksi memberikan distorsi terhadap interaksi kedua daerah tersebut; dan adanya kemungkinan melakukan gerak dalam kaitannya dengan kemampuan sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya interaksi antara dua daerah tersebut.

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang melakukan perjalanan ulang-alik sebesar 3,17 persen atau secara absolut kira-kira sekitar 7,4 juta orang. Meskipun jumlah ini sedikit turun dari hasil SUPAS 2005 yang mencapai 7,6 juta jiwa. Keberadaan komuter yang cukup besar ada di provinsi-provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Banten, Bali, dan Jawa Barat. Pola ini hampir sama dengan hasil SUPAS 2005. Keberadaan komuter biasanya terdapat pada wilayah-wilayah pinggiran yang mengelilingi kota-kota besar di Indonesia.

Komuter DKI Jakarta terpusat pada wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat, masing-masing berkisar 33 persen dan 26 persennya. Komuter DKI Jakarta banyak berkegiatan di wilayah lain di dalam DKI Jakarta sendiri atau berkegiatan di luar DKI Jakarta. Oleh sebab itu, persentase komuter di DKI Jakarta cukup besar (12,09%). Dari jumlah ini, 81 persen melakukan kegiatan di wilayah DKI Jakarta sendiri, sementara 19 persen komuter DKI Jakarta melakukan kegiatan di luar provinsi DKI Jakarta utamanya ke kabupaten Bekasi, kabupaten Tangerang, kota Tangerang dan kota Depok.

Komuter D.I. Yogyakarta mayoritas berasal dari Bantul dan Sleman, sebesar 44 dan 31 persen. Komuter Banten sebagian besar berasal dari kabupaten Tangerang, kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, masing-masing sebesar 21, 33, dan 27 persen. Komuter Bali umumnya berasal dari Kota Denpasar, Tabanan, Badung, dan Gianyar, masing-masing sebesar 32, 17, 25, dan 15 persen. Sementara di Jawa Barat, empat kabupaten/kota penyumbang komuter terbesar adalah kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, masing-masing sebesar 18 dan 11 persen, serta kota Bekasi dan kota Depok, masing-masing sebesar 20 persen.

Tabel 6.5
Persentase Komuter dan Mobilitas Musiman
Hasil SUPAS 2015

Provinsi	Persentase Komuter	Persentase Mobilitas Musiman	Penduduk 5 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,63	14,37	4.471.644
Sumatera Utara	2,94	17,37	12.487.319
Sumatera Barat	1,70	19,21	4.664.941
Riau	1,04	42,68	5.661.657
Jambi	1,69	30,37	3.080.808
Sumatera Selatan	0,82	22,65	7.292.238
Bengkulu	0,94	30,02	1.700.178
Lampung	1,72	24,32	7.357.586
Kepulauan Bangka Belitung	1,74	20,22	1.241.999
Kepulauan Riau	0,29	60,56	1.751.954
DKI Jakarta	12,09	65,98	9.257.691
Jawa Barat	4,44	20,07	42.622.759
Jawa Tengah	2,96	9,97	31.022.185
DI Yogyakarta	9,97	22,07	3.415.599
Jawa Timur	2,09	13,22	35.973.876
Banten	7,01	27,31	10.791.606
Bali	6,16	30,68	3.812.166
Nusa Tenggara Barat	1,59	11,67	4.320.986
Nusa Tenggara Timur	0,37	14,18	4.537.557
Kalimantan Barat	0,95	13,77	4.319.121
Kalimantan Tengah	0,21	28,13	2.255.165
Kalimantan Selatan	2,70	23,03	3.594.137
Kalimantan Timur	0,49	40,19	3.117.528
Kalimantan Utara	0,04	34,29	571.886
Sulawesi Utara	2,17	23,63	2.209.380
Sulawesi Tengah	0,76	23,78	2.602.490
Sulawesi Selatan	1,37	20,60	7.733.194
Sulawesi Tenggara	0,58	34,23	2.217.132
Gorontalo	2,84	10,98	1.025.312
Sulawesi Barat	0,33	23,12	1.143.180
Maluku	0,97	30,96	1.504.894
Maluku Utara	0,19	17,21	1.031.569
Papua Barat	0,56	53,84	770.849
Papua	0,19	25,29	2.842.547
Total	**3,17**	**21,52**	**232.403.133**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bpsgo.id

6.2.2 Mobilitas Musiman

Mobilitas musiman merupakan bagian dari mobilitas non permanen. Di dalam berbagai survei kependudukan BPS baru kali ini jenis mobilitas musiman dicakup. Pertanyaan yang diajukan kepada responden berumur 5 tahun ke atas adalah apakah responden melakukan pulang kampung di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya. Momen pulang kampung tidak selalu berkaitan dengan hari raya keagamaan, namun bisa kapan saja dilakukan oleh responden. Selanjutnya frekuensi pulang kampung yang dilakukan secara periodik juga ditanyakan kepada yang pernah pulang kampung. Dua puluh dua persen responden mengatakan pernah pulang kampung. Persentase ini cukup besar dan kelihatannya sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia dimana kekerabatan dan silaturahmi dalam keluarga masih dijunjung tinggi oleh penduduk Indonesia.

Bila dilihat menurut provinsi, persentase penduduk yang melakukan mobilitas musiman tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Barat, masing-masing sebesar 66, 61, dan 54 persen. Dalam sejarah, arus migrasi masuk seumur hidup ke DKI Jakarta pada era tahun 90-an sangat tinggi. Fenomena arus migrasi masuk ke Kepulauan Riau dan Papua Barat sampai saat ini juga masih tinggi. Apakah pola migrasi ini ada kaitannya dengan daerah asal responden, dimana responden akan selalu pulang kampung ke tempat dia dilahirkan. Hal ini masih perlu kajian yang lebih mendalam lagi.

Dilihat dari frekuensi mengunjungi kampung halaman, 10 persen responden menyatakan pulang kampung paling sedikit sebulan sekali, 14 persen paling sedikit 6 bulan sekali, 37 persen paling sedikit pulang kampung setahun sekali, dan sisanya 39 persen menyatakan jarang sekali pulang kampung. Responden di wilayah Jawa seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menyatakan paling sering pulang kampung. Responden Jawa Tengah yang pulang kampung menyatakan 24 persen pulang kampung paling sedikit sebulan sekali, 23 persen pulang kampung paling sedikit 6 bulan sekali, dan 35 persen pulang kampung paling sedikit setahun sekali. Responden DI Yogyakarta yang pulang kampung menyatakan 30 persen pulang kampung paling sedikit sebulan sekali, 25 persen pulang kampung paling sedikit 6 bulan sekali, dan 28 persen pulang kampung paling sedikit setahun sekali. Sementara, responden Jawa Timur yang pulang kampung menyatakan 20 persen pulang kampung paling sedikit sebulan sekali, 24 persen pulang kampung paling sedikit 6 bulan sekali, dan 39 persen pulang kampung paling sedikit setahun sekali.

http://www.bps.go.id

Ringkasan

Profil mobilitas yang diolah dari SUPAS 2015 terdiri dari migrasi mobilitas permanen (seumur hidup dan risen) dan migrasi non-permanen (ulang-alik dan musiman). Indikator mobilitas seumur hidup yang digambarkan dengan angka migrasi neto positif menunjukkan lebih banyak migran yang masuk daripada yang keluar dari suatu daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Sedangkan migrasi neto negative, dimana lebih banyak migran yang keluar, paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Angka migrasi risen neto positif terbesar terdapat pada tiga provinsi yang sama: Kepulauan Riau, Papua Barat, dan D.I Yogyakarta. Migrasi risen neto negatif yang besar selama 5 tahun terakhir diduduki oleh provinsi-provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Maluku. Alasan utama untuk melakukan migrasi adalah karena pekerjaan dan mencari pekerjaan. Selanjutnya, jika dilihat dari migrasi total, migrasi total neto positif terbesar dipegang oleh tiga provinsi: Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Sementara, migrasi total neto negatif yang besar diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara masing-masing. Pada migrasi non-permanen yang diolah dari SUPAS 2015 kejadian komuter dari hasil SUPAS 2015 yang cukup besar ada di provinsi-provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Banten, Bali, dan Jawa Barat. Sedangkan, untuk migrasi musiman dilihat menurut provinsi, persentase penduduk yang melakukan mobilitas musiman tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.

http://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Abler, R., J,S, Adams and P, Gould, 1972, *Spatial organization: The geographer's view of the world*, London: Prentice-Hall International.

Ananta, Aris & Chotib, 1998, *Mobilitas penduduk dan pembangunan daerah analisis SUPAS 1995 (Indonesia)*, Jakarta: LDFEUI dan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.

Firman, T., 1994, *Migrasi Antar Provinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia*, Jurnal Prisma No,7 Juli 1994.

Lee, E, S., 1966, *A Theory of Migration*, Demography, 3(1):47-57.

Todaro, Michael P., 1976, *International Migration in Development Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priority*, Geneva:BIT.

United Nations, 1958, *Multilingual Demographic Dictionary*, English Section, New York.

http://www.bps.go.id

7. Disabilitas

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

7.1 Konsep dan Definisi Disabilitas

INFORMASI mengenai disabilitas yang dikumpulkan dalam SUPAS 2015 dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan program kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Secara nasional, hak-hak yang terkait dengan penyandang disabilitas diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU ini, Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas, yang juga mengacu pada definisi yang dikeluarkan *World Health Organization* (WHO), adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mencakup disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan atau disabilitas sensorik.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015 (SUPAS 2015) yang mengakomodir informasi mengenai penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai informasi awal untuk mengetahui karakteristik lengkap, seperti umur dan jenis kelamin dari penduduk yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan dasar kehidupan mencakup melihat, mendengar, berjalan, menggerakkan tangan/jari, mengingat, perilaku/emosional, berkomunikasi, dan mengurus diri sendiri.

Berikut adalah konsep definisi tingkat kesulitan/gangguan fungsional/disabilitas yang ada dalam SUPAS 2015:

i. **Kesulitan Fungsional atau *functional difficulty*** adalah ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari. Ada delapan kesulitan fungsional yang dicakup dalam SUPAS 2015, yaitu: (1) kesulitan melihat, (2) kesulitan mendengar, (3) kesulitan berjalan/naik tangga, (4) kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari, (5) kesulitan dalam hal mengingat atau berkonsentrasi, (6) gangguan perilaku dan atau emosional, (7) kesulitan/gangguan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, dan (8) kesulitan mengurus diri sendiri. Kedelapan jenis kesulitan tersebut diukur menjadi empat menurut tingkat kesulitannya, yaitu (1) Selalu mengalami kesulitan, (2) Seringkali mengalami kesulitan, (3) sedikit mengalami kesulitan, atau (4) Tidak mengalami kesulitan. Khusus untuk kesulitan/gangguan berjalan/naik tangga dibagi menjadi lima tingkat kesulitan, yaitu (1) sepenuhnya membutuhkan bantuan orang lain, (2) sudah memakai alat bantu tapi perlu bantuan

http://www.bps.go.id

orang lain, (3) dengan memakai alat bantu, (4) tidak memakai alat bantu, dan (5) tidak mengalami kesulitan.

ii. **Penyandang disabilitas penglihatan** adalah seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas sehingga objek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. ART dikategorikan mengalami disabilitas penglihatan jika masih mengalami kesulitan penglihatan walaupun memakai kacamata/lensa kontak.

Yang termasuk kesulitan/gangguan penglihatan adalah:

(1) Buta total: kondisi dimana dua mata tidak dapat melihat sama sekali;
(2) Kurang penglihatan (low vision) adalah kondisi dimana dua mata tidak dapat menghitung jari-jari yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau cukup cahaya;
(3) Buta warna adalah kondisi dua mata responden tidak dapat membedakan warna.

iii. **Kesulitan Mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran** jika tidak dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume, dan kualitas suara sehingga tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. Seseorang yang menggunakan alat bantu sehingga dapat mendengar dengan normal, maka orang tersebut dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Termasuk kategori ini adalah para penyandang cacat rungu/wicara.

iv. **Kesulitan berjalan atau naik tangga** bila tidak dapat berjalan dengan normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami kesulitan.

v. **Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental** jika mengalami kesulitan dalam mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan berkomunikasi bila dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali karena gangguan fisik dan mental. Termasuk kategori ini adalah para penyandang cacat rungu/wicara dan autis.

vi. **Kesulitan mengurus diri sendiri** jika mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. Kesulitan makan maksudnya

http://www.bps.go.id

dalam hal makan sendiri (disuapi orang lain, menggunakan sendok, garpu untuk mengambil makanan atau minuman). Kesulitan membersihkan seluruh tubuh, kesulitan berpakaian maksudnya dalam hal mengambil pakaian dari tempat penyimpanan, mengancingkan baju, mengikat simpul, dan lain lain. Kesulitan tangan maksudnya dalam hal mengambil/memegang barang (tangan lemah, jari kurang lengkap).

vii. Survei Penduduk Antar Sensus hanya mengumpulkan data secara normatif dengan pengamatan, pengetahuan, dan pengakuan anggota rumah tangga (ART).

7.2 Keterbatasan Data Disabilitas

DATA kesulitan/gangguan fungsional hasil SUPAS 2015 memiliki keterbatasan dalam penyajiannya, di antaranya adalah:

1. Pengumpulan data SUPAS 2015 dilakukan oleh petugas pencacah yang tidak memiliki kemampuan medis dalam menilai ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari. Pengumpulan data ini hanya dilakukan berdasarkan pengamatan, pengetahuan, dan pengakuan responden yang mungkin dapat berbeda dengan konsep dan definisi kesulitan fungsional dari aspek kesehatan. Idealnya, pengumpulan data kesulitan fungsional dilakukan oleh petugas kesehatan karena membutuhkan pemeriksaan medis.
2. Karena keterbatasan kemampuan petugas SUPAS 2015 dalam pengumpulan data kesulitan fungsional, informasi penduduk usia 10 tahun ke bawah yang mengalami kesulitan fungsional tidak disajikan dalam publikasi ini karena dikhawatirkan akan dapat menyebabkan kesalahan dalam penyimpulannya.

http://www.bps.go.id

7.3 Gambaran Penyandang Disabilitas

HASIL SUPAS 2015 menunjukkan secara nasional penduduk 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan fungsional sekitar 8,56 persen. Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penyandang disabilitas terbanyak adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Sementara tiga provinsi dengan penyandang disabilitas paling sedikit adalah Banten, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Secara detail, persentase penyandang disabiltas menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Tingkat Kesulitan

Provinsi	Persentase	
	Tidak Disabilitas	Disabilitas
(1)	(2)	(3)
Aceh	90,02	9,98
Sumatera Utara	91,96	8,04
Sumatera Barat	90,58	9,42
Riau	91,86	8,14
Jambi	90,56	9,44
Sumatera Selatan	91,00	9,00
Bengkulu	91,01	8,99
Lampung	92,34	7,66
Kepulauan Bangka Belitung	92,47	7,53
Kepulauan Riau	93,53	6,47
DKI Jakarta	92,71	7,29
Jawa Barat	91,83	8,17
Jawa Tengah	91,38	8,62
DI Yogyakarta	91,85	8,15
Jawa Timur	90,60	9,40
Banten	93,82	6,18
Bali	90,43	9,57
Nusa Tenggara Barat	90,60	9,40
Nusa Tenggara Timur	90,40	9,60
Kalimantan Barat	91,75	8,25
Kalimantan Tengah	91,96	8,04
Kalimantan Selatan	91,97	8,03
Kalimantan Timur	93,69	6,31
Kalimantan Utara	92,39	7,61
Sulawesi Utara	88,10	11,90
Sulawesi Tengah	88,56	11,44
Sulawesi Selatan	89,78	10,22
Sulawesi Tenggara	91,33	8,67
Gorontalo	88,29	11,71
Sulawesi Barat	92,24	7,76
Maluku	92,24	7,76
Maluku Utara	92,92	7,08
Papua Barat	92,70	7,30
Papua	91,40	8,60
Total	91,44	8,56

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

7.3.1 Kesulitan Melihat

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan 0,13 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang sama sekali tidak bisa melihat, sekitar 0,72 persen mengalami banyak kesulitan melihat dan 5,51 persen penduduk yang mengalami sedikit kesulitan melihat. Tabel 7.2 menunjukkan adanya kecendrungan semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan melihat baik yang sama sekali tidak bisa melihat, banyak kesulitan, maupun sedikit kesulitan. Kesulitan melihat, baik dengan tingkat sama sekali tidak bisa melihat, banyak maupun sedikit kesulitan, lebih banyak dialami oleh penduduk lanjut usia (lansia).

Berdasarkan jenis kelamin, persentase perempuan usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan melihat lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 7.1). Secara nasional, perempuan usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan melihat sebesar 7,04 persen, sedangkan laki-laki sebesar 5,69 persen.

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Melihat menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

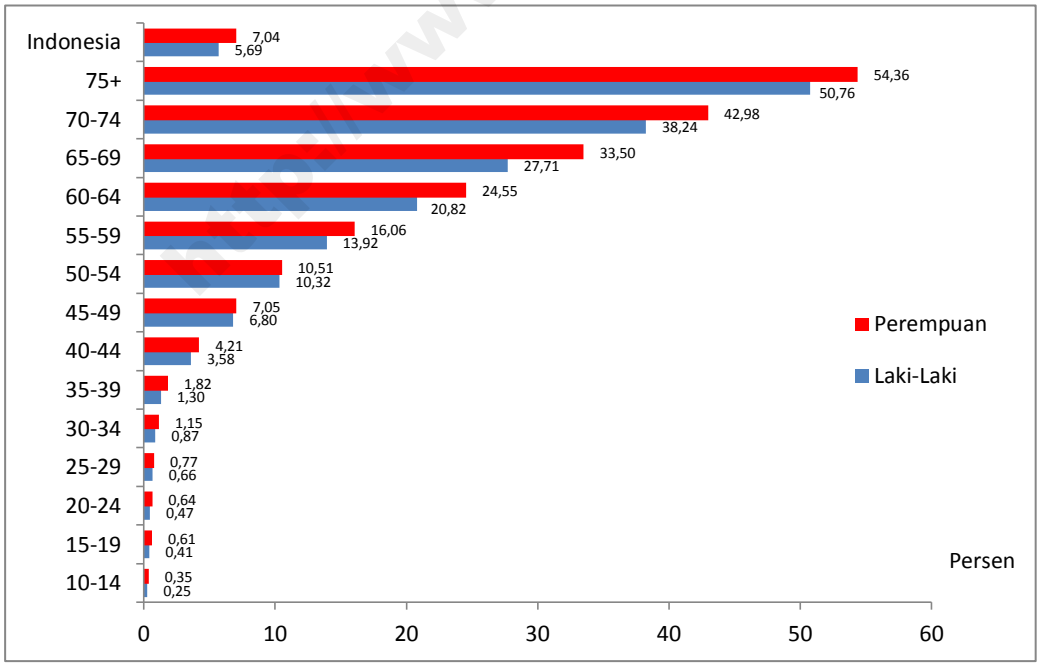

Sumber data: SUPAS 2015

Tabel 7.2
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat

Kelompok Umur	Sama Sekali Tidak Bisa Melihat	Banyak	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,03	0,05	0,22	99,70	100,00
15-19	0,04	0,07	0,40	99,49	100,00
20-24	0,05	0,07	0,43	99,45	100,00
25-29	0,06	0,08	0,58	99,28	100,00
30-34	0,05	0,09	0,88	98,99	100,00
35-39	0,06	0,13	1,37	98,44	100,00
40-44	0,07	0,21	3,61	96,11	100,00
45-49	0,09	0,36	6,48	93,08	100,00
50-54	0,11	0,56	9,74	89,59	100,00
55-59	0,13	0,99	13,88	85,00	100,00
60-64	0,25	1,85	20,56	77,34	100,00
65-69	0,44	3,49	26,82	69,25	100,00
70-74	0,73	6,43	33,70	59,14	100,00
75+	1,87	12,47	38,51	47,15	100,00
Total	**0,13**	**0,72**	**5,51**	**93,64**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

7.3.2 Kesulitan Mendengar

Secara nasional persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang sama sekali tidak bisa mendengar sebesar 0,09 persen, banyak kesulitan sebesar 0,57 persen dan sedikit kesulitan sebesar 2,69 persen (Tabel 7.3). Kondisi dalam kesulitan mendengar sama halnya dengan kesulitan melihat, ada kecenderungan semakin tua usia maka semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan mendengar.

Secara nasional, persentase penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan mendengar sebesar 2,82 persen dan perempuan sebesar 3,87 persen. Di hampir semua kelompok umur, persentase perempuan yang mengalami kesulitan mendengar lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 7.2). Perbedaan persentase laki-laki dan perempuan semakin nyata terlihat pada kelompok lansia.

Tabel 7.3
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar

Kelompok Umur	Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar	Banyak	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,03	0,05	0,12	99,79	100,00
15-19	0,05	0,06	0,13	99,76	100,00
20-24	0,07	0,05	0,14	99,74	100,00
25-29	0,07	0,07	0,20	99,66	100,00
30-34	0,04	0,06	0,27	99,62	100,00
35-39	0,04	0,07	0,36	99,54	100,00
40-44	0,06	0,09	0,60	99,25	100,00
45-49	0,05	0,17	1,08	98,70	100,00
50-54	0,05	0,22	2,25	97,49	100,00
55-59	0,07	0,49	4,87	94,58	100,00
60-64	0,10	1,00	10,11	88,79	100,00
65-69	0,22	2,37	17,08	80,33	100,00
70-74	0,37	5,33	25,85	68,44	100,00
75+	1,11	13,15	34,30	51,43	100,00
Jumlah	**0,09**	**0,57**	**2,69**	**96,65**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.2
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mendengar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

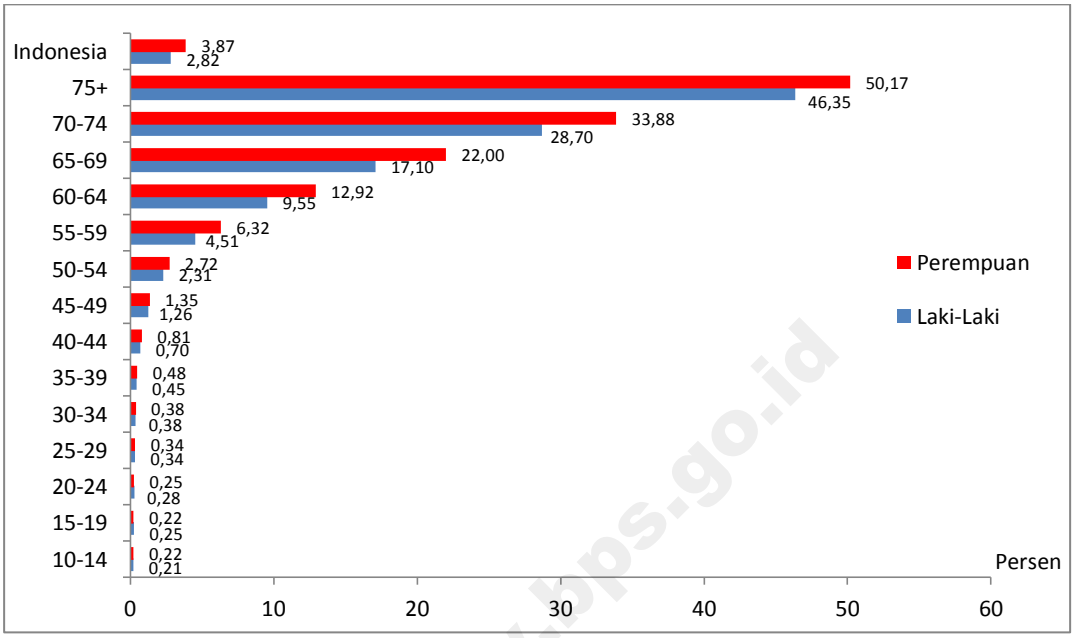

Sumber data: SUPAS 2015

7.3.3 Kesulitan Berjalan/Naik Tangga

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga sebesar 3,76 persen dengan rincian 0,32 persen sepenuhnya membutuhkan bantuan orang lain, 0,16 persen memakai alat bantu dan bantuan orang lain, 0,53 persen memakai alat bantu, dan 2,75 persen tidak memakai alat bantu. Sama dengan jenis kesulitan melihat dan mendengar, semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga. Kesulitan berjalan atau naik tangga terutama banyak dialami oleh penduduk lansia yang mungkin disebabkan pengaruh umur menyebabkan perubahan struktur fisik dan tulang seseorang terutama pada usia lanjut.

Persentase perempuan yang mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 7.3). Hal ini terjadi hampir di semua kelompok umur dengan perbedaan yang cukup tinggi antara persentase laki-laki maupun perempuan di kelompok lanjut usia. Secara nasional, laki-laki yang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga sebesar 3,09 persen dan perempuan sebesar 4,43 persen.

http://www.bps.go.id

Tabel 7.4

Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan/Naik Tangga

Kelompok Umur	Sepenuhnya Membutuh-kan Bantuan Orang lain	Memakai Alat Bantu dan Bantuan Orang Lain	Memakai Alat Bantu	Tidak Memakai Alat Bantu	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-14	0,08	0,01	0,02	0,64	99,25	100,00
15-19	0,09	0,01	0,03	0,65	99,23	100,00
20-24	0,06	0,01	0,03	0,75	99,14	100,00
25-29	0,06	0,01	0,04	0,81	99,08	100,00
30-34	0,04	0,02	0,05	0,82	99,06	100,00
35-39	0,05	0,02	0,08	0,98	98,86	100,00
40-44	0,07	0,04	0,11	1,28	98,51	100,00
45-49	0,14	0,05	0,18	1,81	97,82	100,00
50-54	0,22	0,10	0,29	2,78	96,61	100,00
55-59	0,39	0,17	0,62	5,04	93,78	100,00
60-64	0,69	0,38	1,34	8,81	88,78	100,00
65-69	1,25	0,70	2,54	13,25	82,25	100,00
70-74	2,30	1,45	5,09	19,74	71,42	100,00
75+	6,36	3,20	10,31	25,13	55,00	100,00
Total	**0,32**	**0,16**	**0,53**	**2,75**	**96,24**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.3
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

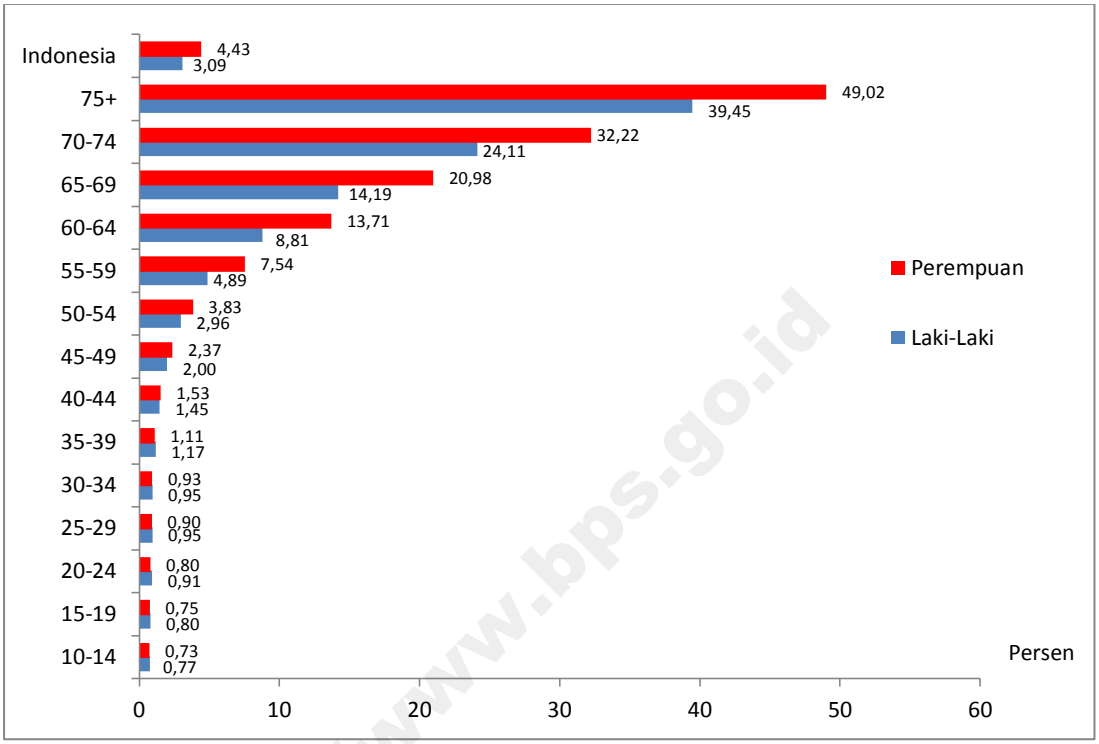

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

7.3.4 Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari sebesar 1,31 persen dengan kondisi 0,06 persen sama sekali tidak bisa menggunakan/menggerakkan tangan/jari, 0,25 persen banyak mengalami kesulitan, dan 0,99 persen sedikit mengalami kesulitan. Berdasarkan kelompok umur, semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari.

Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan jari sebesar 1,08 persen dan perempuan sebesar 1,53 persen. Di hampir semua kelompok umur, persentase perempuan yang mengalami kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 7.4), dan perbedaan tertinggi terjadi pada kelompok umur 75 ke atas.

Tabel 7.5
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari

Kelompok Umur	Sama Sekali Tidak Bisa Menggunakan/ Menggerakkan Tangan/Jari	Banyak	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,02	0,05	0,07	99,86	100,00
15-19	0,03	0,07	0,08	99,82	100,00
20-24	0,03	0,04	0,08	99,85	100,00
25-29	0,02	0,06	0,10	99,82	100,00
30-34	0,02	0,04	0,11	99,84	100,00
35-39	0,02	0,05	0,17	99,75	100,00
40-44	0,02	0,08	0,32	99,58	100,00
45-49	0,04	0,14	0,54	99,27	100,00
50-54	0,07	0,25	1,03	98,66	100,00
55-59	0,10	0,40	1,69	97,81	100,00
60-64	0,16	0,66	3,23	95,95	100,00
65-69	0,21	1,02	5,19	93,59	100,00
70-74	0,32	1,71	8,56	89,41	100,00
75+	0,78	4,06	13,72	81,44	100,00
Jumlah	**0,06**	**0,25**	**0,99**	**98,69**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.4
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Menggunakan/Menggerakkan Tangan/Jari menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

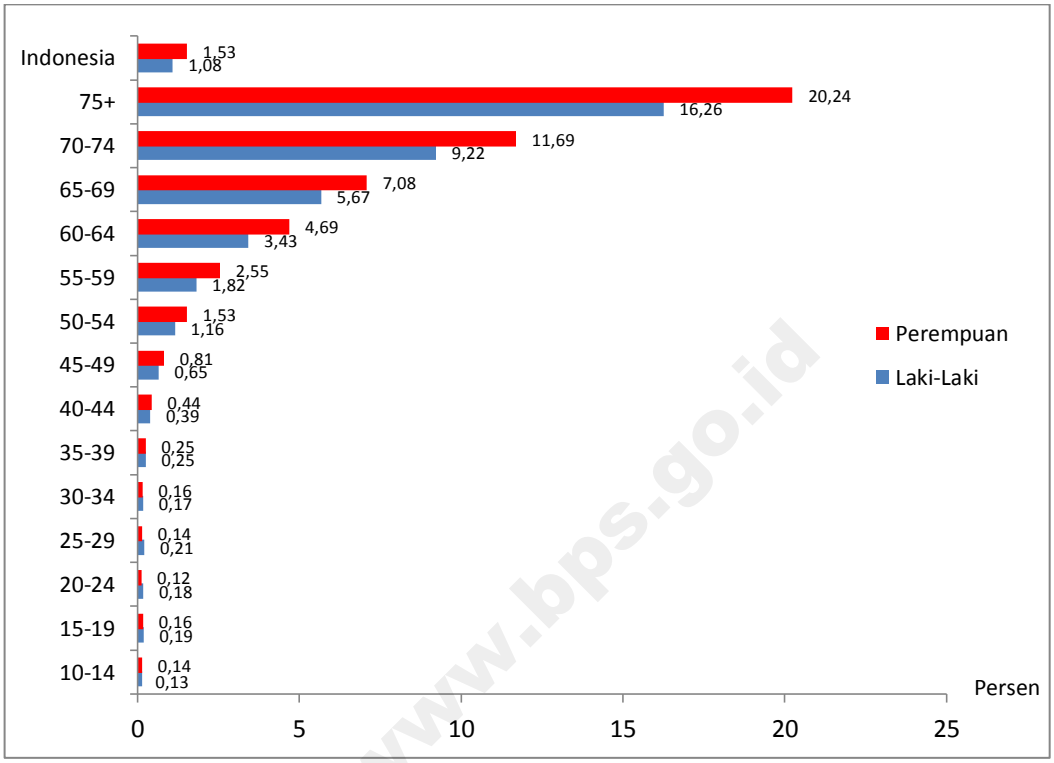

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

7.3.5 Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi

Penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi secara nasional sebesar 2,82 persen. Penduduk yang selalu mengalami kesulitan sebesar 0,21 persen, 0,49 persen seringkali mengalami kesulitan, dan 2,11 persen sedikit mengalami kesulitan. Semakin tua umur, semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi. Peningkatan persentase penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi mulai terlihat besar pada penduduk lanjut usia.

Persentase penduduk perempuan yang mengalami kesulitan mengingat/ berkonsentrasi lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 7.5). Secara nasional, perempuan yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi sebesar 3,36 persen, sedangkan laki-laki sebesar 2,27 persen. Perbedaan terjadi pada setiap kelompok umur dan tertinggi terjadi pada kelompok umur 75 atau lebih.

Tabel 7.6
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/ Berkonsentrasi

Kelompok Umur	Selalu	Seringkali	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,12	0,09	0,19	99,60	100,00
15-19	0,14	0,10	0,18	99,59	100,00
20-24	0,12	0,10	0,23	99,55	100,00
25-29	0,12	0,11	0,26	99,51	100,00
30-34	0,13	0,10	0,32	99,45	100,00
35-39	0,11	0,10	0,44	99,34	100,00
40-44	0,10	0,13	0,66	99,11	100,00
45-49	0,10	0,17	1,07	98,65	100,00
50-54	0,14	0,24	1,91	97,71	100,00
55-59	0,15	0,42	3,61	95,82	100,00
60-64	0,23	0,91	7,24	91,63	100,00
65-69	0,45	1,97	11,92	85,66	100,00
70-74	0,86	4,03	19,27	75,84	100,00
75+	3,29	10,22	26,08	60,41	100,00
Indonesia	**0,21**	**0,49**	**2,11**	**97,18**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.5
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mengingat/ Berkonsentrasi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

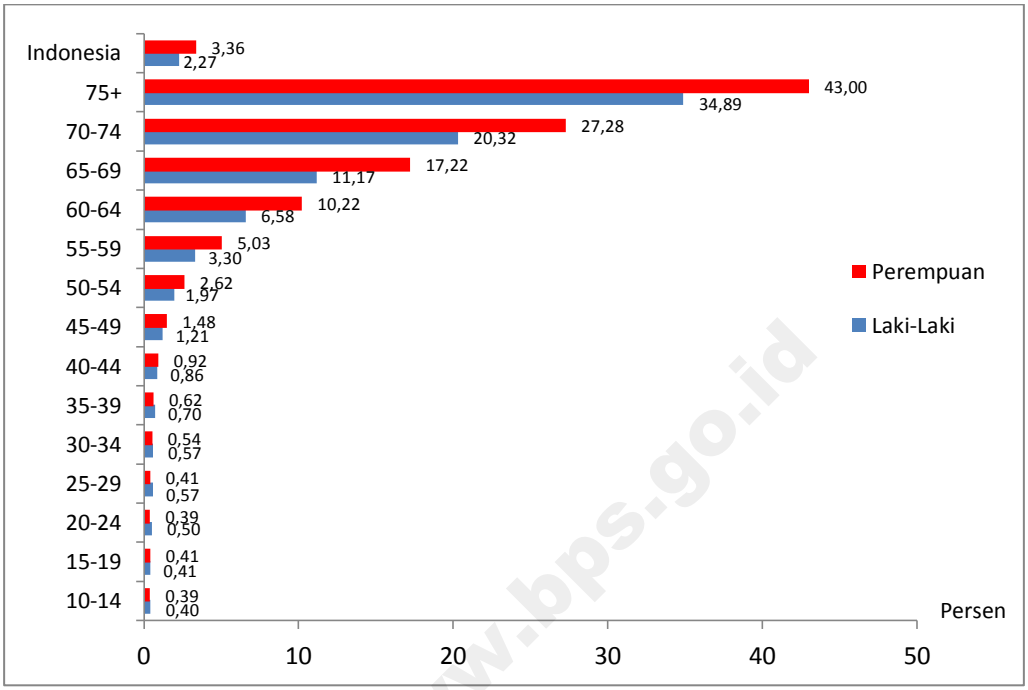

Sumber data: SUPAS 2015

7.3.6 Gangguan Perilaku dan atau Emosional

Penduduk yang mengalami gangguan perilaku dan atau emosional secara nasional sebesar 1,32 persen. Penduduk yang selalu mengalami gangguan sebesar 0,13 persen, 0,23 persen seringkali mengalami kesulitan, dan 1,04 persen sedikit mengalami kesulitan. Semakin tua umur, semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi. Peningkatan persentase penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi mulai terlihat besar pada penduduk lanjut usia.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang mengalami gangguan perilaku dan atau emosional sebesar 1,27 persen, dan penduduk perempuan sebesar 1,55 persen (Gambar 5). Pada kelompok umur 50 tahun ke atas, persentase penduduk perempuan yang mengalami gangguan perilaku dan atau emosional lebih tinggi dibandingkan laki-laki , sedangkan kelompok umur di bawahnya laki-laki yang mengalami gangguan lebih tinggi persentasenya dibanding perempuan. Perbedaan terlihat sangat mencolok pada kelompok umur 75 tahun ke atas.

http://www.bps.go.id

Tabel 7.7
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Gangguan Perilaku dan atau Emosional

Kelompok Umur	Selalu	Seringkali	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,07	0,08	0,22	99,63	100,00
15-19	0,10	0,10	0,25	99,55	100,00
20-24	0,09	0,09	0,27	99,54	100,00
25-29	0,09	0,11	0,30	99,50	100,00
30-34	0,10	0,10	0,32	99,48	100,00
35-39	0,10	0,11	0,40	99,40	100,00
40-44	0,08	0,11	0,48	99,32	100,00
45-49	0,09	0,15	0,62	99,15	100,00
50-54	0,09	0,15	0,93	98,83	100,00
55-59	0,10	0,23	1,57	98,10	100,00
60-64	0,16	0,42	2,92	96,49	100,00
65-69	0,24	0,71	4,76	94,29	100,00
70-74	0,39	1,36	7,78	90,47	100,00
75+	1,31	3,50	12,14	83,05	100,00
Jumlah	**0,13**	**0,23**	**1,04**	**98,59**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.6
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Gangguan Perilaku dan atau Emosional menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

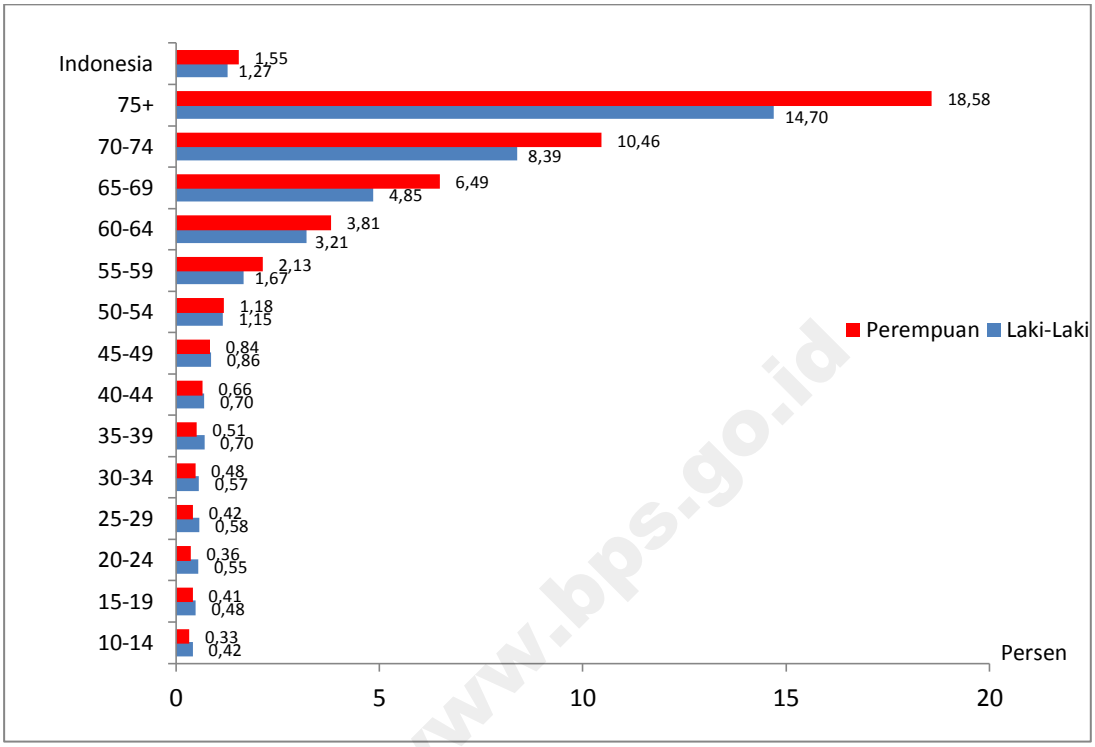

Sumber data: SUPAS 2015

7.3.7 Kesulitan Berbicara dan atau Memahami/Berkomunikasi dengan Orang Lain

Penduduk yang mengalami kesulitan berbicara dan atau memahami/ berkomunikasi dengan orang lain secara nasional sebesar 1,52 persen. Penduduk yang sama sekali tidak bisa memahami/dipahami/berkomunikasi sebesar 0,13 persen; 0,34 persen banyak mengalami kesulitan; dan 1,05 persen sedikit mengalami kesulitan. Semakin tua umur, semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain. Peningkatan persentase penduduk yang mengalami kesulitan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain mulai terlihat besar pada penduduk lanjut usia.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain sebesar 1,26 persen, dan penduduk perempuan sebesar 1,79 persen. Pada kelompok umur 50 tahun ke atas, persentase penduduk perempuan yang mengalami kesulitan berbicara

http://www.bps.go.id

dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan kelompok umur di bawahnya laki-laki yang mengalami kesulitan lebih tinggi persentasenya dibanding perempuan. Perbedaan terlihat sangat mencolok pada kelompok umur 75 tahun ke atas.

Tabel 7.8
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Kesulitan Berbicara dan atau Memahami/Berkomunikasi dengan Orang Lain

Kelompok Umur	Sama Sekali Tidak Bisa Memahami/ Dipahami/ Berkomunikasi	Banyak	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,11	0,13	0,15	99,62	100,00
15-19	0,12	0,14	0,14	99,60	100,00
20-24	0,12	0,14	0,16	99,58	100,00
25-29	0,11	0,15	0,16	99,57	100,00
30-34	0,10	0,12	0,20	99,57	100,00
35-39	0,08	0,14	0,23	99,55	100,00
40-44	0,08	0,13	0,26	99,52	100,00
45-49	0,07	0,16	0,41	99,36	100,00
50-54	0,11	0,19	0,61	99,09	100,00
55-59	0,10	0,31	1,26	98,33	100,00
60-64	0,14	0,51	2,87	96,48	100,00
65-69	0,23	0,98	5,34	93,44	100,00
70-74	0,39	2,05	9,81	87,75	100,00
75+	1,15	5,62	17,26	75,98	100,00
Indonesia	**0,13**	**0,34**	**1,05**	**98,48**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.7
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Gangguan Perilaku dan atau Emosional menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

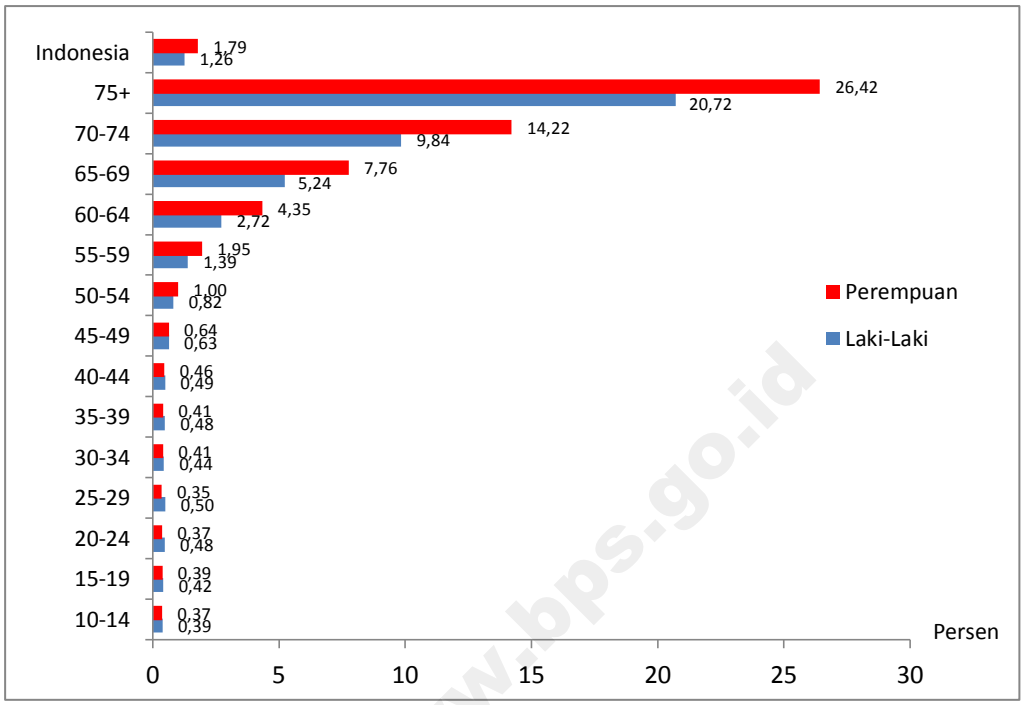

Sumber data: SUPAS 2015

7.3.8 Kesulitan Mengurus Diri Sendiri

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri sebesar 1,02 persen, dengan 0,23 persen sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri; 0,22 persen mengalami banyak kesulitan, dan 0,57 persen yang mengalami sedikit kesulitan. Kelompok lansia merupakan persentase tertinggi penduduk yang mengalami kesulitan mengurus diri. Dengan meningkatnya usia, semakin rentan penduduk untuk mengalami kesulitan mengurus diri sendiri.

Secara nasional, penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri sebesar 0,84 persen, sementara itu penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya yaitu sebesar 1,20 persen. Pada kelompok usia muda (di bawah 54 tahun) persentase perempuan yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Namun pada kelompok usia 55 tahun ke atas, persentase perempuan yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kelompok usia yang memiliki perbedaan persentase tertinggi antara laki-laki dan perempuan adalah kelompok usia 75 ke atas.

http://www.bps.go.id

Tabel 7.9
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri

Kelompok Umur	Sama Sekali Tidak Bisa Mengurus Diri Sendiri	Banyak	Sedikit	Tidak Mengalami	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	0,11	0,05	0,09	99,75	100,00
15-19	0,10	0,06	0,08	99,76	100,00
20-24	0,08	0,04	0,08	99,80	100,00
25-29	0,07	0,07	0,09	99,78	100,00
30-34	0,06	0,05	0,09	99,80	100,00
35-39	0,06	0,05	0,10	99,79	100,00
40-44	0,06	0,06	0,11	99,77	100,00
45-49	0,09	0,11	0,20	99,60	100,00
50-54	0,17	0,14	0,30	99,40	100,00
55-59	0,27	0,24	0,58	98,92	100,00
60-64	0,45	0,42	1,47	97,67	100,00
65-69	0,73	0,77	2,61	95,89	100,00
70-74	1,35	1,41	5,32	91,92	100,00
75+	3,85	4,30	10,60	81,26	100,00
Indonesia	**0,23**	**0,22**	**0,57**	**98,98**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Gambar 7.8
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mengurus Diri Sendiri menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

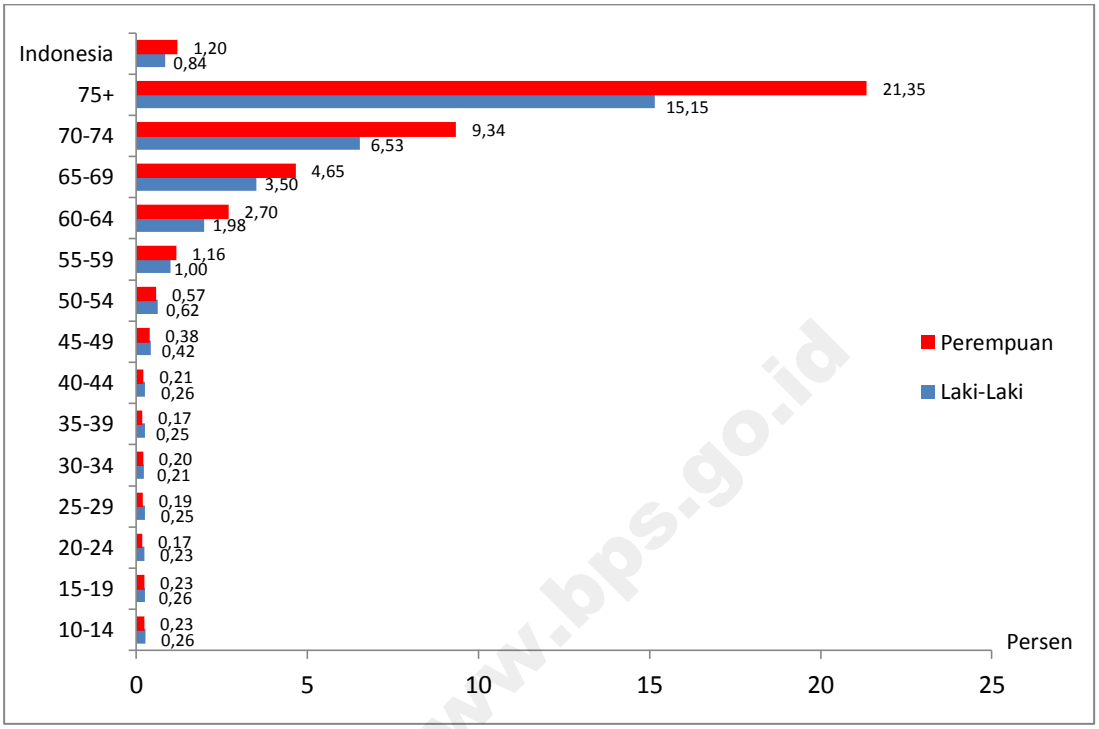

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Ringkasan

Disabilitas yang diolah dari hasil SUPAS 2015 meliputi kesulitan melihat, mendengar, menggunakan tangan/jari, mengingat/berkonsentrasi, gangguan perilaku/ emosional, berbicara, serta mengurus diri sendiri. Menurut data SUPAS 2015 terdapat 8,56 persen penduduk yang memiliki disabilitas, dimana yang tertinggi terdapat di Sulawesi Utara dan terendah di Banten. Jika dilihat pada kesulitan melihat, terdapat 0,13 persen penduduk yang sama sekali tidak bisa melihat, 0,72 persen yang memiliki tingkat kesulitas melihat yang berat, serta 5,51 persen yang sedikit mengalami kesulitan melihat. Persentase penduduk yang mengalami kesulitan mendengar adalah 0,09 persen yang sama sekali tidak mendengar, 0,57 persen yang mengalami banyak kesulitan mendengar serta 2,69 persen yang mengalami sedikit kesulitan mendengar. Persentase penduduk yang mengalami kesulitan berjalan/naik tangga adalah 3,76 persen, sedangkan penduduk yang mengalami kesulitan menggerakkan tangan/jari adalah sebesar 1,31 persen. Penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi sebesar 2,82 persen, sedangkan yang mengalami ganguan perilaku/emosional sebanyak juga 2,82 persen, serta yang mengalami kesulitan berbicara adalah sebesar 1,52 persen.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

8. Perumahan

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Perumahan

RUMAH merupakan satu dari tiga kebutuhan dasar manusia selain makanan dan pakaian. Karena merupakan kebutuhan dasar, pemerintah Indonesia mengatur perumahan dalam UU No.1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Sedangkan pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional bidang perumahan dan pemukiman (Pasal 12).

Dari undang-undang tersebut terlihat jika rumah tak hanya menjadi tempat berlindung tetapi juga menjadi sarana bagi manusia untuk meningkatkan mutu dan produktifitas. Untuk dapat menunjang perannya, rumah memerlukan karakteristik yang baik, yaitu rumah layak huni. Kementerian Perumahan Rakyat mendefinisikan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Permen Perumahan Rakyat No. 22/Permen/M/2008). Karakteristik rumah sehat dapat dilihat pada UU No. 23 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat manusia yang optimal dilakukan antara lain dengan peningkatan sanitasi lingkungan tempat tinggal. Namun selain sanitasi, kualitas air minum, dan sumber penerangan juga merupakan unsur penting dalam membentuk rumah sehat. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan lanjutan dari program global *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menyejahterakan rakyat juga memberikan perhatian yang besar terhadap perumahan, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan akses terhadap energi yang terjangkau. Perhatian tersebut tertuang dalam target ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, target ke-7 yaitu memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan, dan target ke-11 yaitu membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Bab ini akan membahas tentang gambaran perumahan di Indonesia yang mencakup luas lantai, kondisi atap, lantai dan dinding rumah, bahan bakar yang digunakan untuk memasak, sumber penerangan, air bersih, sarana buang air besar dan kepemilikan barang selain mengulas pemenuhan kebutuhan untuk perumahan yang bersumber dari data SUPAS 2015.

8.1 Keadaan Perumahan

PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Sedangkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (UU No. 1 Tahun 2011).

Kondisi fisik tempat tinggal dapat mempengaruhi tingkat kesehatan penghuninya. Rumah yang tidak sehat dapat menjadi media berkembangnya berbagai penyakit. Beberapa indikator yang dapat melihat kondisi fisik tempat tinggal adalah luas lantai, jenis atap, lantai, dan dinding.

Tabel 8.1
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan (m^2) dan Tipe Daerah

Kategori Besaran Luas Lantai Rumah (m^2)	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
≤19	6,34	2,08	4,34
20-49	27,79	34,10	30,76
50-99	43,64	49,08	46,20
100-149	13,55	10,42	12,08
≥150	8,67	4,32	6,62
Total	100,0	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Berdasarkan hasil SUPAS 2015, mayoritas rumah tangga di Indonesia memiliki luas lantai bangunan 50-99 m^2 dengan nilai 46,20 persen. Sepertiga dari keseluruhan rumah tangga memiliki luas lantai 20-49 m^2, sedangkan proporsi paling kecil rumah tangga dengan luas lantai ≤19 m^2 yaitu 4,34 persen dan selebihnya rumah tangga dengan luas lantai di atas 100 m^2. Menurut wilayah tempat tinggalnya, proporsi rumah tangga dengan luas lantai 50-99 m^2 di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Namun sebaliknya, pada rumah tangga dengan luas lantai di atas 100 m^2 proporsi di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

http://www.bps.go.id

Salah satu kriteria dari rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2 (WHO), atau minimal 8 m^2 (Kementrian Kesehatan). Pada tabel 8.2 terlihat sebanyak 19,54 persen rumah tangga di Indonesia memiliki luas lantai perkapita kurang dari 10 m^2, dan yang paling dominan adalah rumah tangga dengan luas lantai perkapita 10-19 m^2 yaitu sekitar 39,18 persen. Jika dicermati berdasarkan daerah tempat tinggalnya, maka baik daerah perkotaan maupun perdesaan masing-masing kategori memiliki proporsi yang hampir sama.

Tabel 8.2
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perkapita (m^2) dan Tipe Daerah

Kategori Besaran Luas Lantai Rumah Perkapita(m2)	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 10	20,05	18,97	19,54
10-19	37,56	40,99	39,18
20-29	19,22	19,62	19,41
30+	23,16	20,42	21,87
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Tujuan penggunaan atap selain untuk melindungi dari panas dan dingin juga untuk menahan benda atau kotoran yang jatuh ke dalam rumah. Bangunan rumah dengan atap bukan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya merupakan salah satu kriteria rumah layak huni. Berdasarkan data SUPAS 2015, lebih dari lima puluh persen rumah tangga di Indonesia menggunakan atap genteng dan sekitar 36 persen menggunakan atap asbes/seng. Rumah tangga yang belum memenuhi kriteria layak huni dengan atap jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya secara nasional masih sekitar 1,97 persen.

Dilihat menurut wilayah tempat tinggalnya, rumah tangga dengan jenis atap genteng, asbes/seng mempunyai proporsi yang hampir sama. Rumah tangga dengan jenis atap beton di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan, namun untuk jenis atap kayu/sirap, ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya daerah perdesaan proporsinya lebih tinggi daripada perkotaan.

Tabel 8.3
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Rumah Terluas dan Tipe Daerah

Jenis Atap Rumah Terluas	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	2,44	0,99	1,76
Kayu/Sirap	0,92	1,48	1,18
Genteng	61,94	55,60	58,96
Asbes/Seng	34,30	38,20	36,14
Ijuk/Daun-Daunan/Rumbia	0,33	3,57	1,85
Lainnya	0,08	0,16	0,12
Total	100,00	100,000	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Kriteria lain yang dapat menentukan suatu bangunan rumah tidak layak adalah lantai rumah. Rumah dengan lantai bukan tanah termasuk ke dalam rumah layak huni dan sebaliknya. Menurut data SUPAS 2015, secara nasional tiga jenis lantai yang paling banyak digunakan rumah tangga di Indonesia secara berurutan keramik/marmer/granit, semen/bata merah, dan kayu/papan, masing-masing 45,19 persen, 27,37 persen, dan 10,40 persen.

Menurut wilayah, daerah perkotaan tiga jenis lantai yang paling banyak digunakan adalah keramik/marmer/granit, semen/bata merah, dan ubin/ tegel/ teraso. Berbeda dengan rumah di perdesaan, jenis lantai yang paling banyak digunakan adalah Semen/Bata Merah, Kramik/Marmer/Granit, dan Kayu/Papan.

Jika dikategorikan berdasarkan kelayakan hunian suatu rumah, maka masih terdapat sekitar 6,89 persen rumah tangga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni (berlantaikan tanah). Menurut wilayah tempat tinggal, rumah tangga yang tidak layak huni (lantai tanah) di daerah perdesaan masih cukup banyak yaitu sekitar 11,67 persen, sedangkan di daerah perkotaan proporsinya lebih kecil sekitar 2,63 persen.

Tabel 8.4
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas dan Tipe Daerah

Jenis Lantai Rumah Terluas	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kramik/Marmer/Granit	60,29	28,21	45,19
Ubin/Tegel/Teraso	10,80	7,28	9,15
Semen/Bata Merah	20,72	34,84	27,37
Kayu/Papan	5,19	16,26	10,40
Bambu	0,31	1,59	0,91
Tanah	2,63	11,67	6,89
Lainnya	0,06	0,14	0,10
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Karakteristik dinding yang dijadikan salah satu kriteria rumah layak huni adalah bangunan rumah dengan dinding bukan kayu/bambu atau lainnya. Data SUPAS 2015 memperlihatkan rumah dengan jenis dinding tembok paling dominan di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Urutan berikutnya jenis dinding kayu, bambu, dan lainnya. Rumah dengan jenis dinding tembok di perkotaan lebih besar proporsinya dibanding daerah perdesaan, sedangkan dinding kayu lebih besar di daerah perdesaan dibanding perkotaan.

http://www.bps.go.id

Tabel 8.5
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas dan Tipe Daerah

Jenis Dinding Rumah Terluas	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok	86,02	58,05	72,86
Kayu	9,41	30,31	19,25
Bambu	3,64	9,60	6,44
Lainnya	0,93	2,03	1,45
Total	100,0	100,0	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Target SDG's ke-7 adalah memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang bersumber dari listrik, karena penerangan dari listrik mampu memberikan pencahayaan yang optimal. Data SUPAS 2015 menunjukkan hampir semua rumah tangga sudah dapat menikmati penerangan dengan listrik baik PLN maupun non PLN. Secara nasional hanya sekitar 2,38 persen rumah tangga yang memiliki sumber penerangan bukan listrik, proporsinya di daerah perdesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan.

Tabel 8.6
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah

Sumber Penerangan Utama	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN Meteran	92,01	77,19	85,03
Listrik PLN Tanpa Meteran	7,46	13,37	10,24
Listrik Non-PLN	0,33	4,61	2,34
Bukan Listrik	0,20	4,84	2,38
Total	100,0	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Penggunaan bahan bakar untuk memasak juga terkait dengan pemanfaatan energi pada rumah tangga. Penggunaan kayu bakar pada rumah tangga memiliki dampak negatif seperti gangguan kesehatan, polusi udara, berkurangnya sumber daya hutan, dan efek rumah kaca. Data SUPAS 2015 menunjukkan bahan bakar yang banyak digunakan oleh rumah tangga adalah gas dan kayu bakar. Secara nasional, rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas sekitar 64,13 persen dan kayu bakar sekitar 28,34 persen.

Dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, mayoritas rumah tangga di perkotaan menggunakan bahan bakar gas yaitu mencapai 80,28 persen dan kayu bakar hanya 10,24 persen. Sedangkan di perdesaan lebih banyak rumah tangga yang menggunakan kayu bakar dibanding gas, yaitu 48,69 persen berbanding 45,98 persen.

Tabel 8.7
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-Hari dan Tipe Daerah

Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-Hari	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik	2,19	1,38	1,81
Gas	80,28	45,98	64,13
Minyak Tanah	5,08	3,00	4,10
Arang/Briket/Batu Bara	0,15	0,48	0,30
Kayu Bakar	10,24	48,69	28,34
Tidak Pakai	1,65	0,39	1,06
Lainnya	0,42	0,09	0,27
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Target SDGs ke-6 adalah menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Program Nawacita ke-5 target ke-2 indikator ke-14 menargetkan bahwa pada tahun 2019 seluruh penduduk harus memiliki akses ke air minum yang berkualitas. Air minum yang berkualitas dapat berupa air bersih. Air bersih merupakan air minum yang dibeli (air kemasan bermerek atau isi ulang), PAM/PDAM, air yang diperoleh dari mata air terlindung, dan air yang diperoleh dari sumur terlindung (Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS).

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan tiga sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah sumur terlindung yaitu 25,31 persen, kemudian air isi ulang (21,86 persen), dan pompa (10,95 persen). Di daerah perkotaan, air isi ulang menduduki urutan pertama dengan nilai 30,05 persen, kemudian secara berurutan sumur terlindung (20,12 persen), air kemasan (14,29 persen), leding sampai rumah (12,35 persen), pompa (12,16 persen), dan selebihnya menggunakan sumber air minum yang lain. Sementara itu di perdesaan, mayoritas rumah tangga menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung dengan persentase 31,14 persen, kemudian secara berturut-turut mata air terlindung (13,73 persen), air isi ulang (12,65 persen), dan selebihnya menggunakan sumber air minum yang lain.

Tabel 8.8
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah

Sumber Air Minum Utama	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan	14,29	1,76	8,39
Air Isi Ulang	30,05	12,65	21,86
Leding Sampai Rumah	12,35	6,28	9,49
Leding Eceran	2,91	1,52	2,26
Pompa	12,16	9,60	10,95
Sumur Terlindung	20,12	31,14	25,31
Sumur Tak Terlindung	2,78	9,82	6,09
Mata Air Terlindung	3,50	13,73	8,32
Mata Air Tak Terlindung	0,61	5,67	2,99
Air Sungai	0,24	3,53	1,79
Air Hujan	0,87	4,09	2,39
Lainnya	0,12	0,22	0,17
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat idealnya 10 meter, dengan tujuan agar air aman aman dari bakteri yang berasal dari kotoran/tinja. Secara nasional, hasil SUPAS 2015 menunjukkan 56,24 rumah tangga memiliki sumber air minum dari pompa/sumur/mata air dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter, sedangkan yang kurang dari 10 meter masih ada 28,01 persen, dan yang lainnya menjawab tidak tahu.

Jarak rumah yang semakin berdekatan di daerah perkotaan menjadikan jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja semakin dekat, yaitu mencapai 35,33 persen rumah tangga. Berbeda dengan di daerah perdesaan, yang jaraknya kurang dari 10 meter lebih sedikit yaitu sekitar 23,40 persen.

Tabel 8.9
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Utama Pompa, Sumur, atau Mata Air menurut Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat dan Tipe Daerah

Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<10	35,33	23,40	28,01
≥ 10	51,50	59,22	56,24
Tidak Tahu	13,16	17,38	15,75
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Penyediaan fasilitas tempat buang air besar merupakan bagian dari upaya mewujudkan sanitasi yang baik. Program Nawacita ke-5 target ke-2 indikator ke-17 menargetkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar yang layak mencapai 80 persen di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2019. Berdasarkan SUPAS 2015, terdapat 77,46 rumah tangga di Indonesia yang menggunakan jamban sendiri sebagai tempat buang air besar, sedangkan 8,01 persen menggunakan jamban bersama; 2,48 persen menggunakan jamban umum, dan 12,06 persen tidak ada jamban. Jamban sendiri dan jamban bersama lebih banyak digunakan oleh rumah tangga yang tinggal di perkotaan daripada di perdesaan, namun sebaliknya jamban umum dan tidak ada jamban lebih banyak di perdesaan.

http://www.bps.go.id

Tabel 8.10
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban Sendiri	84,80	69,20	77,46
Jamban Bersama	8,31	7,67	8,01
Jamban Umum	1,89	3,13	2,48
Tidak Ada	4,99	20,00	12,06
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Pengelolaan sistem pembuangan akhir tinja yang buruk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga mencemari lingkungan dan sumber air. Pengelolaan sistem pembuangan akhir tinja dilakukan melalui ketersediaan jamban dengan tangki septik. Data SUPAS 2015 menunjukkan secara nasional 75,50 persen rumah tangga menggunakan tangki septik, sedangkan selebihnya 17,77 persen menggunakan bukan tangki septik, dan 6,73 tidak punya tempat pembuangan akhir tinja. Persentase rumah tangga pengguna tangki septik di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan sebaliknya, yang menggunakan bukan tangki septik dan yang tidak punya pembuangan akhir tinja di perdesaan lebih tinggi proporsinya daripada di perkotaan.

Tabel 8.11
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki Septik	84,41	63,59	75,50
Bukan Tangki Septik	10,63	27,31	17,77
Tidak punya	4,95	9,10	6,73
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Dalam rumah tangga, data kepemilikan barang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan. Rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan rumah tangga yang tidak memiliki. Data SUPAS 2015 menunjukkan bahwa dari berbagai jenis barang lebih banyak dimiliki oleh rumah tangga yang tinggal di perkotaan daripada rumah tangga yang tinggal di perdesaan. Barang-barang tersebut antara lain mobil/truk, sepeda motor, sepeda, radio/tape/VCD/DVD, televisi, lemari es, AC/pendingin ruangan, dan mesin cuci. Sedangkan barang-barang lainnya seperti perahu motor, sampan, dan antenna parabola lebih banyak dimiliki oleh rumah tangga yang tinggal di perdesaan daripada di perkotaan. Secara lebih rinci, lihat pada Tabel 8.12.

Tabel 8.12
Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Barang dan Tipe Daerah

Jenis Barang	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mobil/Truk	74,21	25,79	100,00
Sepeda Motor	56,20	43,80	100,00
Perahu Motor	33,55	66,45	100,00
Sepeda	60,53	39,47	100,00
Sampan	23,60	76,40	100,00
Radio/Tape/VCD/DVD	60,33	39,67	100,00
Televisi	56,53	43,47	100,00
Lemari Es	69,11	30,89	100,00
AC/Pendingin Ruangan	80,28	19,72	100,00
Mesin Cuci	76,63	23,37	100,00
Antena Parabola	31,35	68,65	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

8.1 Perumahan

NEGARA bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perwujudan tanggung jawab ini dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mengurangi kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni dari 7,6 juta menjadi 5 juta jiwa.

Berdasarkan hasil SUPAS 2015, indikator *backlog* tidak bisa dihitung. Oleh karena itu indikator kekurangan tempat tinggal didekati dengan status kepemilikan rumah berdasarkan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal dapat melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Sehingga penduduk yang belum memiliki bangunan tempat tinggal milik sendiri seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Data SUPAS 2015 menunjukkan 84,41 persen rumah milik sendiri, sewa 3,92 persen, kontrak 4,64 persen, dan 7,03 persen status kepemilikan rumah lainnya. Rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri di perkotaan sebesar 76,84 persen, sedangkan di perdesaan proporsinya lebih tinggi yaitu mencapai 92,92 persen.

Tabel 8.13
Tabel Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah dan Tipe Daerah

Status Kepemilikan Rumah	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	76,84	92,92	84,41
Sewa	6,66	0,84	3,92
Kontrak	8,02	0,83	4,64
Lainnya	8,48	5,41	7,03
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber data: SUPAS 2015

Ringkasan

Profil perumahan hasil SUPAS 2015 mencakup luas lantai, kondisi atap, lantai dan dinding rumah, bahan bakar yang digunakan untuk memasak, sumber penerangan, air bersih, sarana buang air besar dan kepemilikan barang. Hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia memiliki luas lantai bangunan 50-99 m^2 (46,20 persen), sepertiga rumah tangga memiliki luas lantai 20-49 m2, sedangkan 4,34 memiliki luas lantai ≤19 m^2 dan selebihnya memiliki luas lantai di atas 100 m^2. Dilihat dari penggunaan atap, lebih dari lima puluh persen rumah tangga di Indonesia menggunakan atap genteng, sekitar 36 persen menggunakan atap asbes/seng, dan sisanya masih menggunakan bahan yang tidak layak huni, seperti jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia. Hasil SUPAS 2015 juga menunjukkan bahwa tiga jenis lantai yang paling banyak digunakan rumah tangga di Indonesia secara berurutan adalah keramik/marmer/granit, semen/bata merah, dan kayu/papan, masing-masing 45,19 persen; 27,37 persen, dan 10,40 persen, sedangkan sisanya masih menggunakan tanah. Dilihat dari penggunaan dinding, mayoritas rumah tangga sudah menggunakan tembok (72,86 persen), sisanya menggunakan kayu, bambu, dan lainnya. Dari sisi penerangan, mayoritas rumah tangga sudah menggunakan listrik, tetapi masih ada sebesar 2,38 persen rumah tangga yang masih belum menggunakan listrik. Dilihat dari keperluan sehari-hari tumah tangga, hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga sudah menggunakan gas sebagai bahan bakar (64,13 persen), serta mayoritas menggunakan air minum dari sumur terlindung, air isi ulang, dan air kemasan. Dari sisi kebersihan, mayoritas rumah tangga sudah menggunakan jamban sendiri (77,46 persen), dan mempunyai tempat pembuangan tangka septik (75,50 persen). Untuk kepemilikan barang, hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa kepemilikan barang rumah tangga lebih banyak dimiliki penduduk perkotaan, kecuali antena parabola.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

9. Perubahan Iklim

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Perubahan Iklim

Perubahan iklim dalam penggunaan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* mengacu pada perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi (misalnya dengan menggunakan uji statistik) oleh perubahan *mean* dan / atau variabilitas sifat-sifatnya, dan yang berlangsung selama jangka waktu yang panjang, biasanya dalam dekade atau lebih. Ini mengacu pada setiap perubahan iklim dari waktu ke waktu, apakah karena variabilitas alam atau sebagai akibat dari aktivitas manusia. Penggunaan ini berbeda dari yang di Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), di mana perubahan iklim mengacu pada perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan itu adalah selain variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu.

9.1 Pengetahuan Tentang Perubahan Iklim

SUHU udara bumi yang semakin panas sebagai akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Sifat dari GRK adalah menahan/menyerap radiasi gelombang panas dari sinar matahari yang dipantulkan bumi keluar dari atmosfer, sehingga panas matahari tersebut terperangkap di bumi yang mengakibatkan suhu udara bumi menjadi panas. Suhu udara yang lebih panas tidak hanya dirasakan pada siang hari, namun juga pada malam hari.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak ganda perubahan iklim. Meskipun kepastian mengenai besarnya bahaya masih belum dapat dipastikan, namun beberapa yang diperkirakan akan sangat signifikan adalah kenaikan temperatur yang tinggi. Diperkirakan, akibat perubahan iklim, Indonesia akan mengalami kenaikan curah hujan 2-3 persen per tahun, serta musim hujan yang lebih pendek (lebih sedikit jumlah hari hujan dalam setahun), yang menyebabkan risiko banjir meningkat secara signifikan. Hal ini akan merubah keseimbangan air di lingkungan dan mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air dan suplai air minum (World Bank, 2009).

http://www.bps.go.id

Hasil SUPAS 2015 pada Gambar 9.1, menunjukkan bahwa rumah tangga yang merasakan suhu udara yang lebih panas selama lima tahun terakhir di Indonesia sebesar 77,4 persen. Di perkotaan merasakan suhu udara yang lebih panas sebesar 83,5 persen, lebih besar dibandingkan di perdesaan sebesar 70,4 persen. Hal ini bisa menjadi alasan bahwa salah satu kegiatan penanaman pohon di wilayah perkotaan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak pemasanan global terutama di wilayah perkotaan.

Gambar 9.1
Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara yang Lebih Panas Selama Lima Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal

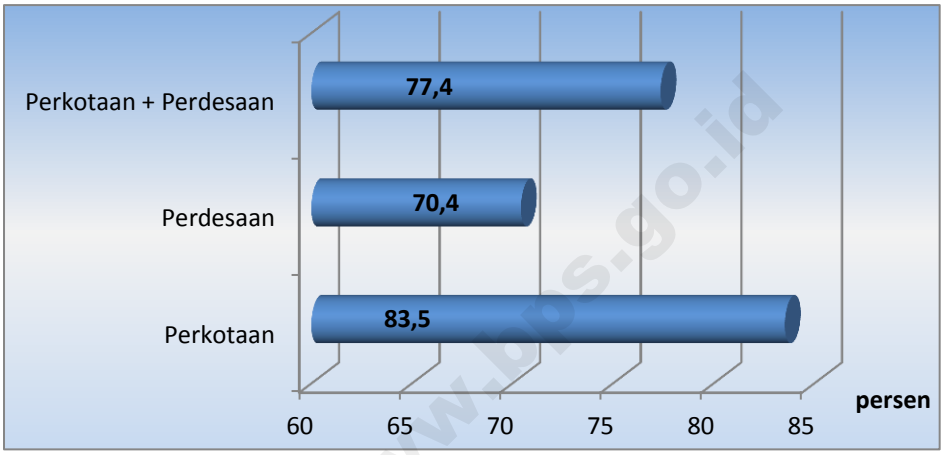

Sumber data: SUPAS 2015

Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jakarta merupakan wilayah dimana persentase rumah tangga yang merasakan suhu udara yang lebih panas selama lima tahun terakhir yang terbesar (95,6 persen), sedangkan yang terendah Provinsi Papua (4,3 persen). Pada Gambar 9.2. dapat kita lihat bahwa persentase rumah tangga yang merasakan musim hujan yang tidak menentu selama lima tahun terakhir ternyata cukup besar yaitu 82 persen. Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan dua provinsi yang presentase rumah tangga yang merasakan musim hujan tidak menentu selama lima tahun terakhir cukup besar, masing-masing 94,5 persen dan 93,1 persen (Tabel 9.1).

http://www.bps.go.id

Gambar 9.2
Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan yang Tidak Menentu Selama Lima Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal

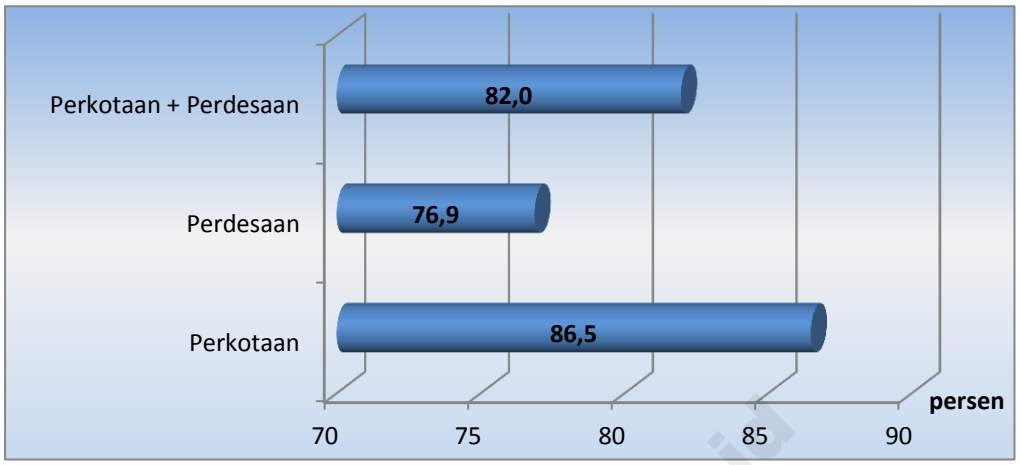

Sumber data: SUPAS 2015

Selain pengetahuan mengenai merasakan suhu udara yang lebih panas dan musim hujan yang tidak menentu selama lima tahun terakhir, pengetahuan tentang merasakan kelangkaan air bersih selama lima tahun terakhir juga ditanyakan pada SUPAS 2015. Persentase rumah tangga yang merasakan kelangkaan air bersih selama lima tahun terakhir sebesar 24,9 persen. Kelangkaan air bersih di perdesaan persentasenya lebih besar (28,8 persen) dibandingkan di perkotaan (21,5 persen).

Gambar 9.3
Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Kelangkaan Air Bersih Selama Lima Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal

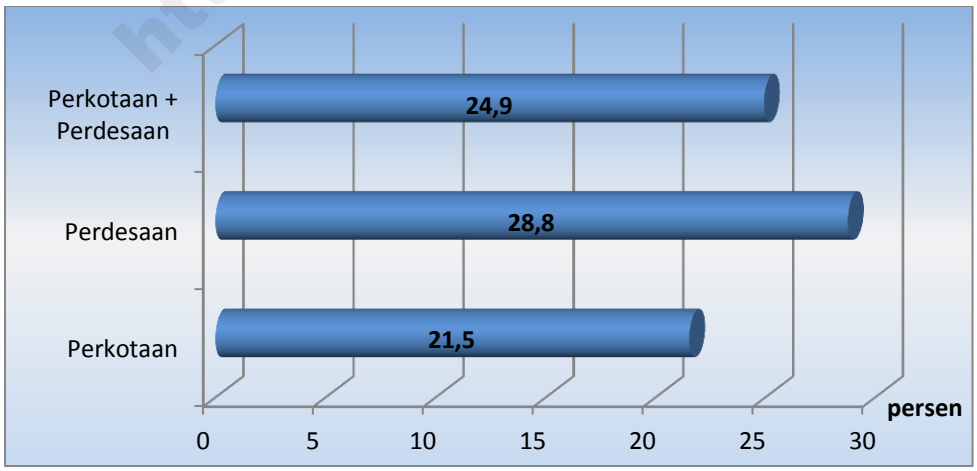

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Persentase rumah tangga yang memiliki pengetahuan bahwa suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu, dan kelangkaan air bersih sebagai akibat dari terjadinya perubahan iklim masih sangat sedikit yaitu hanya 23,9 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan rumahtangga mengenai dampak perubahan iklim masih belum banyak, sehingga perlu adanya sosialisasi dari pemerintah, LSM, atau lembaga terkait kepada masyarakat akan dampak mengenai perubahan iklim dan pemanasan global ini agar masyarakat luas juga ikut menjaga bumi agar tidak semakin panas dengan berbagai aksi.

9.1.1 Rumah Tangga yang Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim

Saat ini istilah perubahan iklim sering diperdengarkan baik lewat televisi ataupun media komunikasi lainnya sehingga kemungkinan banyak masyarakat yang sudah pernah mendengar istilah ini bahkan memahami maknanya. Pertanyaan ini ditujukan bagi semua rumah tangga yang minimal sekali dalam hidupnya pernah mendengar istilah perubahan iklim, jadi tidak sampai mengerti makna dari perubahan iklim tersebut. Tabel 9.4 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang pernah mendengar informasi tentang perubahan iklim hanya mencapai 38,0 persen. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang pernah mendengar tentang perubahan iklim dibanding yang tinggal di perdesaan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase di wilayah perkotaan sebesar 46,8 persen dibanding perdesaaan sebesar 28,1 persen. Akses dan fasilitas media komunikasi entah itu televisi, koran, internet, media sosial yang mudah diakses di wilayah perkotaaan lebih memudahkan rumah tangga untuk mendengar informasi terkait perubahan iklim dibanding di perdesaan. Jika dilihat berdasarkan provinsi, DI Yogyakarta merupakan provinsi yang mempunyai persentase terbesar sebesar 60,8 persen, lebih dari 50 persen responden pernah mendengar tentang perubahan iklim, sementara persentase terkecil ada di Provinsi Papua. Karakteristik Provinsi Papua yang mempunyai banyak daerah dengan geografis yang sulit dijangkau mendukung kecilnya persentase ini. Penyuluhan, pelatihan, bahkan seminar tentang perubahan iklim mungkin belum banyak ke daerah tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin responden, Tabel 9.4.a SUPAS 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 39,7 persen responden laki-laki lebih banyak yang pernah mendengar informasi tentang perubahan iklim dibanding responden perempuan yang memiliki persentase hanya sebesar 28,8 persen. Tingkat pendidikan responden juga menentukan apakah responden pernah mendengar informasi tentang perubahan iklim atau tidak. Hal ini dibuktikan oleh Tabel 9.4.b SUPAS 2015 terkait perubahan iklim menurut tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka responden semakin sering mendengar informasi terkait perubahan iklim. Responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi mempunyai persentase sebesar 71,6 persen, diikuti berturut-turut,

http://www.bps.go.id

persentase SMA 56,7 persen, SMP 39, 7, dan terakhir yang berpendidikan SD ke bawah persentasenya 22, 7 persen.

Jika dilihat dari faktor umur, semakin muda umur responden, maka makin besar kesempatannya untuk mendengar informasi terkait perubahan iklim. Sehingga faktor umur merupakan salah satu faktor penting yang bisa menentukan pengetahuan responden terkait perubahan iklim. Hal ini dibuktikan oleh persentase yang ada di tabel 9.4c. Responden yang berumur kurang dari 20 tahun lebih banyak yang pernah mendengar informasi terkait perubahan iklim, persentasenya sebesar 65,9 persen, sementara usia 20-39 sebesar 44,2 persen, usia 40-59 sebesar 38,8 persen, dan usia lebih 60 tahun mempunyai persentase sebesar 26, 4 persen. Usia 20 ke bawah merupakan usia sekolah sehingga banyak responden yang pernah mendengar informasi terkait perubahaan iklim saat di bangku sekolah.

9.1.2 Rumah Tangga yang Mengetahui tentang Perubahan Iklim

Yang dimaksud dengan pertanyaan "rumah tangga yang mengetahui tentang perubahan iklim" adalah rumah tangga yang benar-benar mengetahui apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Tabel 9.5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mengetahui tentang perubahan iklim adalah sebesar 26,5 persen. Angka yang relatif kecil ini mencerminkan bahwa pengetahuan/pemahaman masyarakat luas tentang perubahan iklim masih kurang untuk itu pemerintah atau pihak lainnya perlu meningkatkan lagi sosialisasi tentang perubahan iklim, baik itu melalui pelatihan, seminar, dari level RT sampai level nasional.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, rumah tangga yang ada di perkotaan lebih banyak yang mengetahui apa arti dari perubahan iklim yaitu sebesar 35,2 persen dibanding rumah tangga yang tinggal di perdesaan yaitu sebesar 16,8 persen. Hal ini bisa dipahami mengingat fasilitas dan akses untuk mengetahui informasi tentang perubahan iklim lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan.

Jika dilihat berdasarkan provinsi pada Gambar 9.4, persentase tertinggi rumah tangga yang mengetahui bahwa suhu udara yang lebih panas atau musim hujan tidak menentu atau kelangkaan air bersih merupakan akibat dari perubahan iklim yaitu Provinsi DI Yogyakarta (47,6 persen) dan DKI Jakarta (44,7 persen), sedangkan yang terendah yaitu Provinsi Papua (12,1 persen) dan Gorontalo (13 persen).

http://www.bps.go.id

Gambar 9.4

Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Provinsi

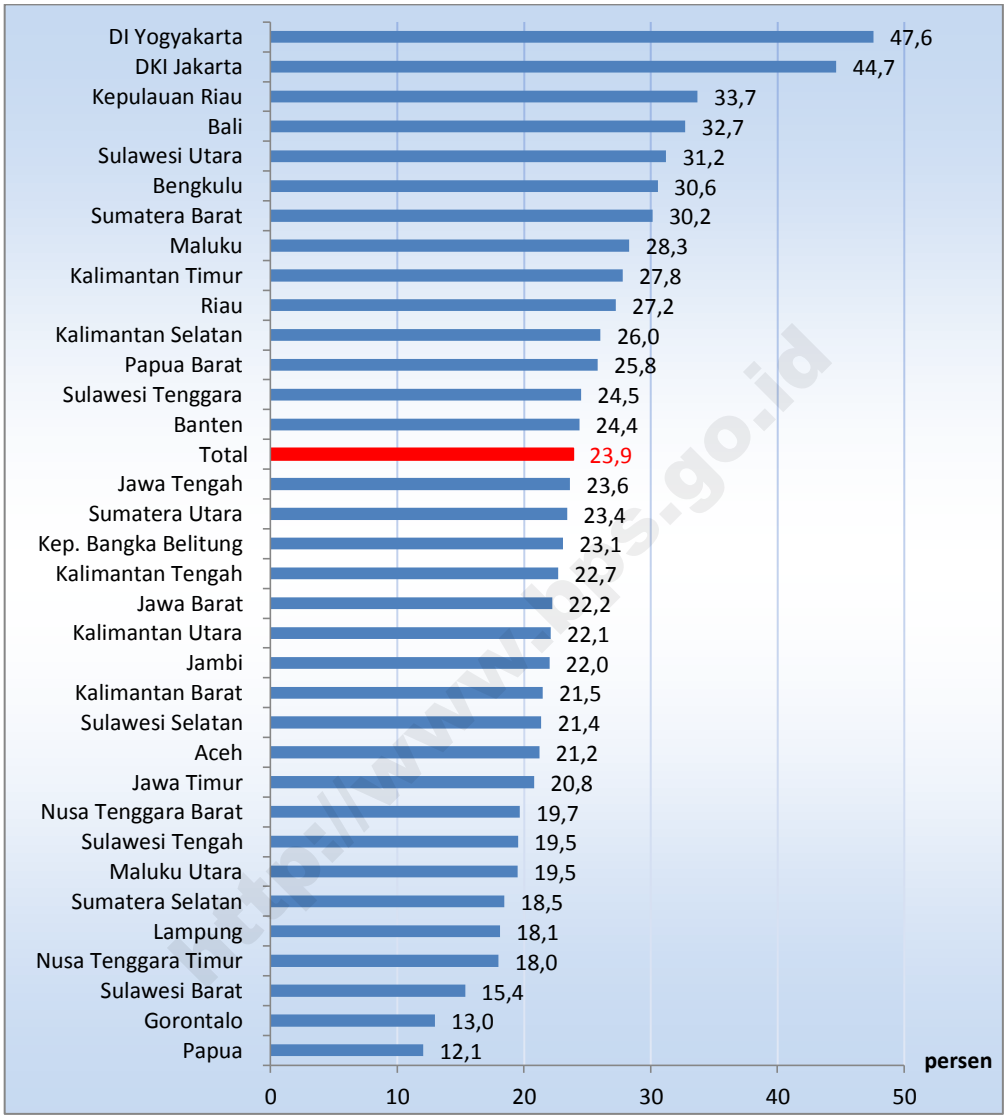

Sumber data: SUPAS 2015

Gambar 9.5
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Jenis Kelamin Responden

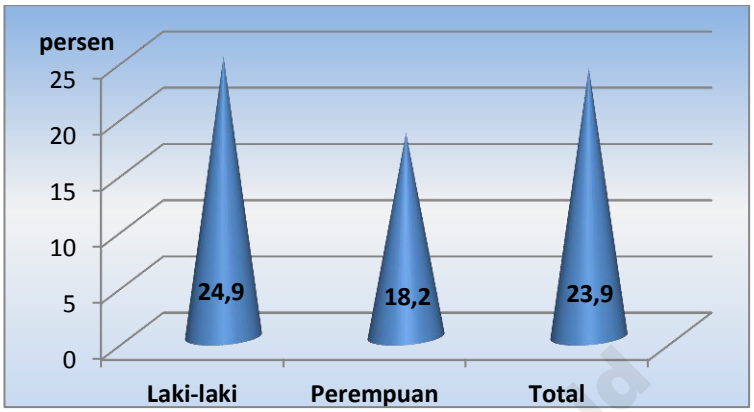

Sumber data: SUPAS 2015

Douglas (2013) menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam kebijakan dan respon perubahan iklim berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan grafik pada Gambar 9.5, terlihat bahwa pada umumnya laki-laki lebih tahu dibandingkan kaum perempuan dalam hal pengetahuan dan akibat perubahan iklim. Persentase rumah tangga yang mengetahui bahwa suhu udara yang lebih panas atau musim hujan tidak menentu atau kelangkaan air yang bersih merupakan akibat dari perubahan iklim pada responden laki-laki sebesar 24,9 persen, sedangkan pada responden perempuan lebih rendah (18,2 persen).

Gambar 9.6
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Pendidikan Responden

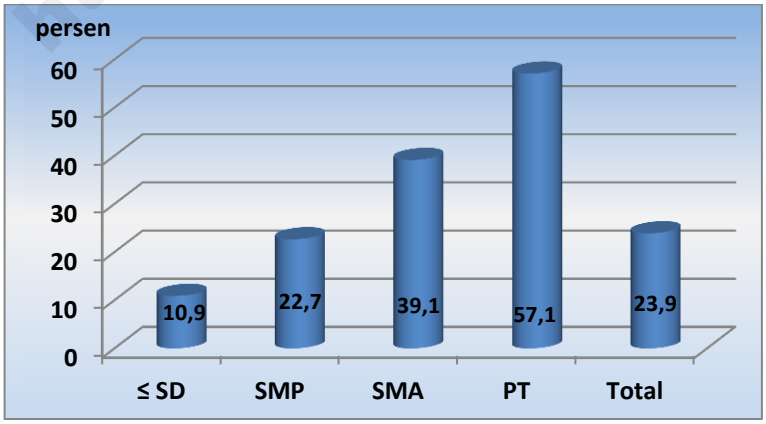

Sumber data: SUPAS 2015

Pengetahuan rumah tangga mengenai perubahan ikllim jika diamati berdasarkan tingkat pendidikan responden, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka akan semakin banyak tahu mengenai pengetahuan dan dampak dari perubahan iklim. Presentase rumah tangga yang mengetahui bahwa suhu udara yang lebih panas atau musim hujan yang tidak menentu atau kelangkaan air bersih merupakan akibat dari perubahan iklim tertinggi pada responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebesar 57,1 persen diikuti dengan responden yang berpendidikan SMA sebesar 39,1 persen. Sedangkan yang terendah pada responden berpendidikan SD kebawah sebesar 10,9 persen (Gambar 9.6.).

Inez,et al (2003), dalam penelitiannya mengkaji pengetahuan tentang pendapat perubahan iklim pada kelompok umur 16-17 tahun pada 188 siswa sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang ilmu perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi opini tentang perubahan iklim. Dengan kata lain bahwa, siswa yang diberikan pengetahuan tentang perubahan iklim secara signifikan berdampak meningkatkan pengembangan pengetahuan pada opini siswa mengenai perubahan iklim tersebut.

Gambar 9.7
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui bahwa Suhu Udara yang Lebih Panas atau Musim Hujan yang Tidak Menentu atau Kelangkaan Air yang Bersih Merupakan Akibat dari Perubahan Iklim Menurut Kelompok Umur Responden

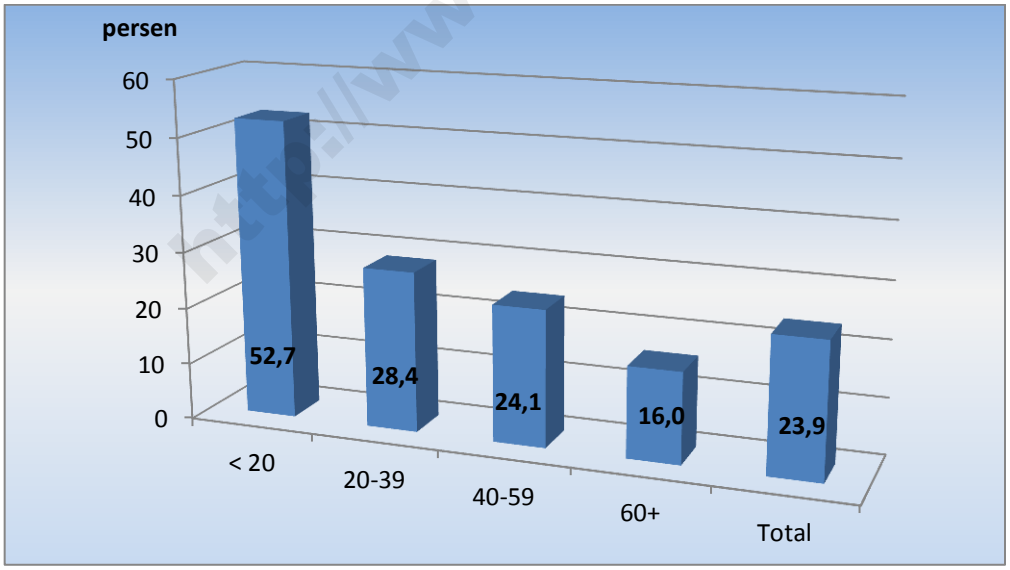

Sumber data: SUPAS 2015

http://www.bps.go.id

Pada Gambar 9.7 menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengetahui bahwa suhu udara yang lebih panas atau musim hujan yang tidak menentu atau kelangkaan air yang bersih merupakan akibat dari perubahan iklim pada responden berumur kurang dari 20 tahun merupakan yang tertinggi (52,7 persen), berikutnya responden usia 20-39 tahun mempunyai persentase sebesar 28,4 persen sedangkan yang terendah yaitu pada responden berumur diatas 60 tahun (16,0 persen). Hal ini dimungkinkan karena usia 20 tahun ke bawah merupakan usia pendidikan sehingga akses, fasilitas, dan informasi yang didapat dari bangku sekolah terkait perubahan iklim mudah untuk didapat, apalagi kurikulum pendidikan juga mengajarkan tentang perubahan iklim sehingga hal ini tentunya tidak asing lagi bagi responden yang berusia 20 tahun ke bawah.

9.2 Adaptasi Perubahan Iklim

9.2.1 Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim

Bumi semakin memanas, IPCC memprediksikan jika tidak ada upaya yang dilakukan secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka pada tahun 2100 suhu bumi akan meningkat hingga 5,8◦C, terhitung dari tahun 1990. Pada Gambar 9.8 menunjukkan persentase rumah tangga yang merasakan suhu udara yang lebih panas selama lima tahun terakhir sekitar 77,4 persen.

Suhu udara yang lebih panas dari biasanya tentunya menimbulkan ketidaknyamanan. Keberadaan yang tidak nyaman di sekitar kita biasanya akan mendorong kita melakukan sesuatu agar kita bisa merasakan keadaan yang lebih nyaman, hal ini termasuk juga dalam keadaan lingkungan di sekitar kita. Tahun 1986 Hines, Hungerford, dan Tomera mempublikasikan model *Responsible Environmental Behavior,* salah satu variabel dalam modelnya adalah *knowledge of action strategies* yaitu seseorang mengetahui bagaimana bertindak untuk mengurangi dampak dari masalah lingkungan.

SUPAS Tahun 2015 juga mengumpulkan data upaya yang dilakukan rumah tangga untuk mengurangi akibat dari suhu udara yang lebih panas seperti memasang/menggunakan AC atau kipas angin, menanam pohon di pekarangan rumah yang membuat rumah lebih sejuk, tidak membakar sampah, dan sebagainya.

http://www.bps.go.id

Berdasarkan Gambar 9.8 ada sekitar 44,4 persen rumah tangga melakukan upaya, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal sejalan dengan rumah tangga yang merasakan suhu udara yang lebih panas selama lima tahun terakhir daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan yaitu sebesar 54,8 berbanding 32,8 persen.

Gambar 9.8
Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara yang Lebih Panas Selama Lima Tahun Terakhir dan Rumah Tangga yang Melakukan Upaya

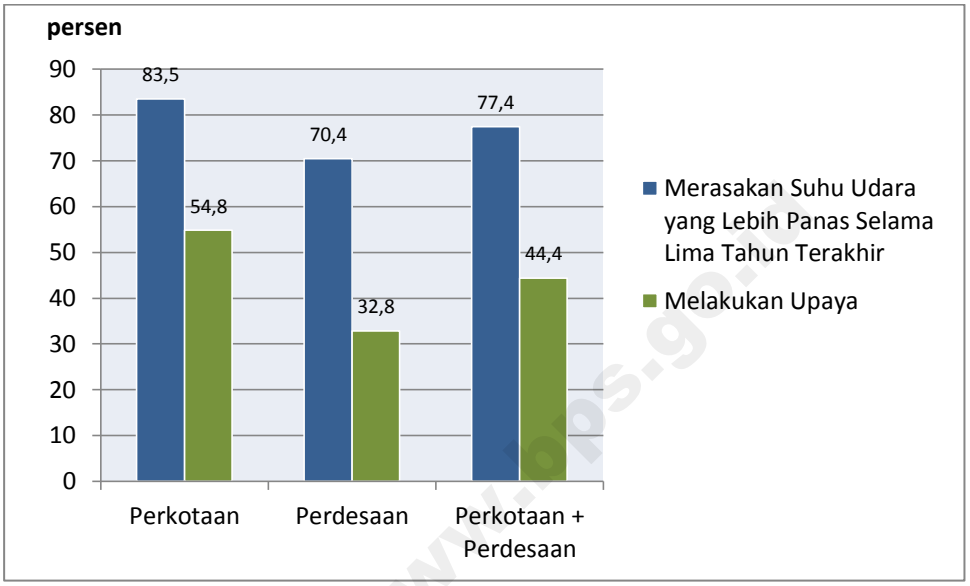

Sumber data: SUPAS 2015

Temperatur yang meningkat dan udara yang semakin hangat mengakibatkan semakin banyak uap dari daratan dan laut naik ke atmosfer. Volume uap yang meningkat tersebut yang mengakibatkan curah hujan turun dengan volume yang besar yang berpotensi besar menyebabkan bencana banjir di berbagai daerah. Dari hasil SUPAS 2015 menunjukkan perubahan musim hujan yang tidak menentu dirasakan sekitar 82 persen rumah tangga selama lima tahun terakhir. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang merasakan musim hujan yang tidak menentu selama lima tahun terakhir di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di pedesaan yaitu sebesar 86,5 berbanding 76,9 persen (Gambar 9.9).

Gambar 9.9
Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan yang Tidak Menentu Selama Lima Tahun Terakhir dan Rumah Tangga yang Melakukan Upaya

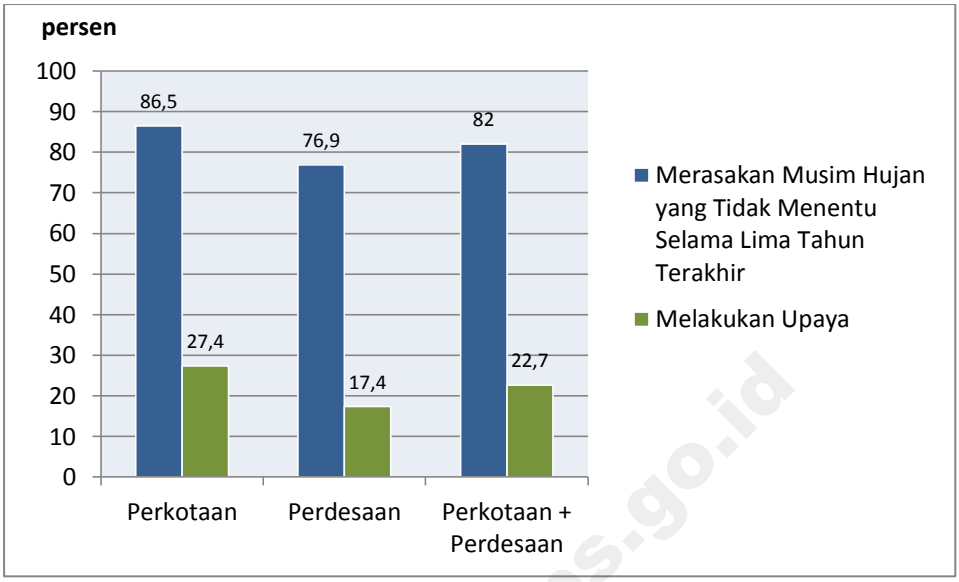

Sumber data: SUPAS 2015

Ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan musim hujan yang tidak menentu juga menimbulkan upaya yang akan dilakukan seperti membersihkan saluran air/got dari sampah, sehingga kalau saluran air lancar diharapkan tidak terjadi banjir walaupun hujan lebat. Upaya lain bisa dengan memperbesar saluran air yang ada atau meninggikan struktur bangunan rumah, dan sebagainya. Berbeda dengan persentase rumah tangga dalam melakukan upaya mengurangi akibat dari suhu udara yang lebih panas yang mencapai 44,4 persen, di sisi lain persentase rumah tangga dalam melakukan upaya mengurangi akibat dari musim hujan yang tidak menentu hanya mencapai 22,7 persen, padahal persentase rumah tangga yang merasakan suhu udara yang lebih panas dan merasakan musim hujan yang tidak menentu lebih sedikit dari rumah tangga yang merasakan musim hujan yang tidak menentu selama lima tahun terakhir. Hal ini mungkin dikarenakan upaya akibat musim hujan yang tidak menentu lebih bersifat kegiatan bersama antar warga bukan kegiatan pribadi sehingga banyak orang yang enggan untuk mengerjakannya, seperti pada survey OECD tentang *Environmental Policy and Household Behaviour* tahun 2011 bahwa ada kecenderungan seseorang untuk tidak akan melakukan suatu kegiatan jika orang lain tidak ikut serta melakukannya.

http://www.bps.go.id

Berdasarkan Gambar 9.9, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak melakukan upaya dibandingkan daerah perdesaan yaitu 27,4 berbanding 17,4 persen. Persentase rumah tangga yang melakukan upaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.8.

Gambar 9.10
Persentase Rumah Tangga yang Merasakan Kelangkaan Air Bersih Selama Lima Tahun Terakhir dan Rumah Tangga Biasa Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain

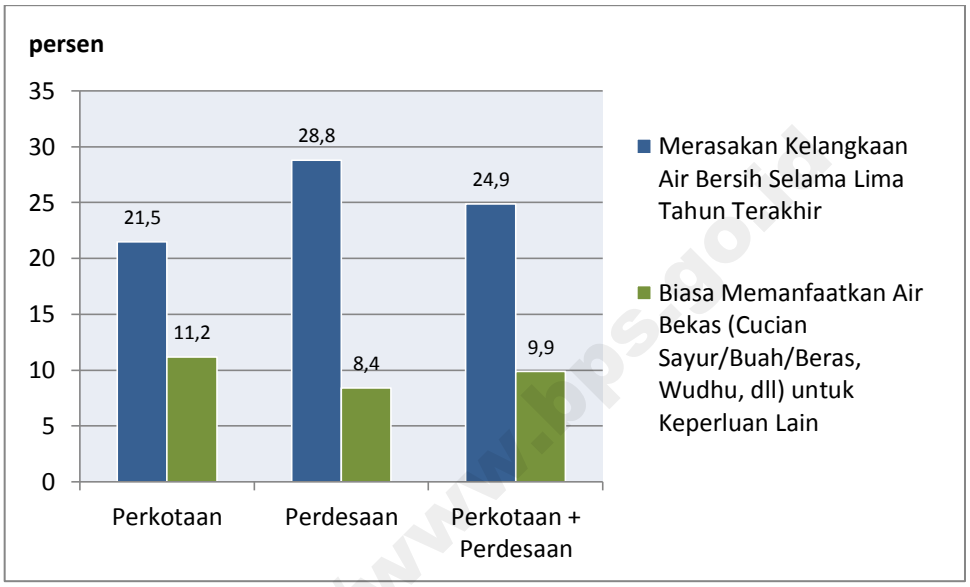

Sumber data: SUPAS 2015

Kelangkaan air bersih adalah kejadian di mana berkurangnya, habisnya, atau keringnya volume air bersih dari sumber air (sumur, air tanah, PAM, sungai, mata air, dan lain-lain) yang ada, sehingga konsumsi air bersih rumah tangga pada waktu tertentu menjadi terbatas ataupun langka. Perubahan iklim memberikan dampak kepada sumber air bersih baik dari persediaan, permintaan, dan kualitas air.

Berdasarkan Gambar 9.10, persentase rumah tangga yang merasakan kelangkaan air bersih selama lima tahun terakhir sekitar 24,9 persen. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, rumah tangga yang merasakan kelangkaan air bersih di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan yaitu sebesar 28,8 berbanding 21,5 persen.

http://www.bps.go.id

Kelangkaan ini tentunya mendorong upaya rumah tangga agar tetap bisa mengonsumsi air bersih secukupnya misalnya dengan memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain (menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran/buah-buahan, untuk menyiram tanaman, menggunakan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman, menggunakan air bekas membilas pakaian untuk mengepel lantai atau membersihkan lantai kamar mandi, dan sebagainya). Berdasarkan Gambar 9.10 ada sekitar 9,9 persen rumah tangga yang memanfaatkan air bekas, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan yaitu 11,2 berbanding 8,4 persen. Informasi selengkapnya dan berdasarkan provinsi dapat dilihat pada Tabel 9.9.

9.2.2 Menanam/Pemeliharaan Tanaman di Pekarangan Rumah

Keberadaan tanaman sangat penting untuk konservasi sumber daya air. Tanaman atau pohon sangat membantu dalam penyediaan udara segar dan membantu penyerapan air ke dalam tanah. Satu pohon dewasa dapat menghasilkan kira-kira 260 pon oksigen tiap tahun yang setara dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 2 orang per tahun. Selain untuk membuat rindang dan asri halaman rumah, keberadaan tanaman keras atau tanaman tahunan di pekarangan rumah juga dapat membantu penyerapan air khususnya air hujan sehingga penyediaan air tanah terjamin.

Pada Gambar 9.11, persentase rumah tangga yang menanam/memelihara tanaman tahunan di pekarangan rumah sekitar 39,1 persen. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menanam/memelihara tanaman tahunan di pekarangan rumah di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 47,6 persen berbanding 31,5 persen. Hal ini dimungkinkan karena rumah tangga di daerah perkotaan tidak memiliki lahan yang cukup untuk menanam tanaman di pekarangannya. Jika dilihat menurut provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang menamam/memelihara tanaman tahunan di pekarangan rumah yaitu sebesar 16,5 persen. Persentase rumah tangga yang menanam/memelihara tanaman tahunan di pekarangan rumah menurut provinsi dan daerah tempat tinggal ditunjukkan di Tabel 9.10.

https://www.bps.go.id

Gambar 9.11
Persentase Rumah Tangga yang Menanam/Memelihara Tanaman Tahunan di Pekarangan Rumah Menurut Daerah Tempat Tinggal

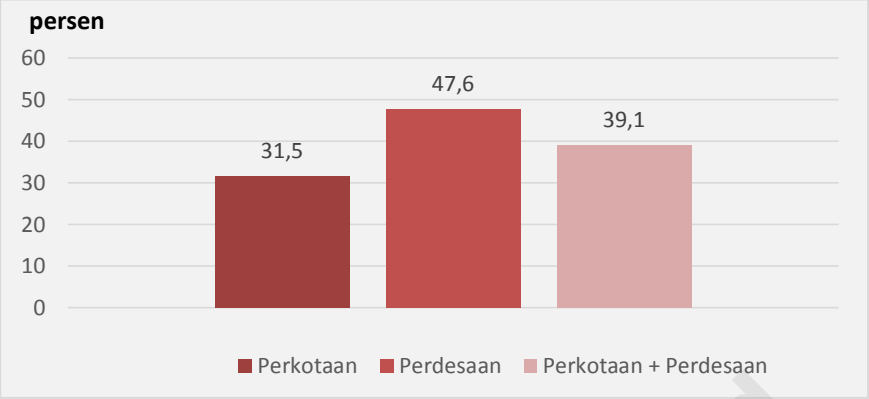

Sumber data: SUPAS 2015

9.2.3 Penyediaan Area Resapan Air

Kebutuhan rumah tangga terhadap air cukup banyak, maka rumah tangga juga perlu melakukan konservasi sumber daya air. Salah satu bentuk kepedulian terhadap sumber daya air yang dapat dilakukan dalam skala kecil oleh rumah tangga adalah dengan menyediakan area resapan air. Area resapan air memiliki fungsi sebagai penampung dan penahan air hujan, baik yang melalui atap rumah maupun yang langsung ke tanah, sehingga air hujan tidak langsung terbuang ke saluran air atau sungai, namun meresap kembali ke tanah sebagai cadangan sumber air bersih.

Pada umumnya perencanaan bangunan kurang memperhatikan aspek lingkungan, khususnya area resapan air. Lahan-lahan yang tidak terpakai untuk bangunan, khususnya di wilayah perkotaan, biasanya diperkeras dengan cara diplester atau *paving block*, sehingga ketika musim hujan banyak lahan-lahan yang tergenang air atau bahkan terjadi banjir akibat berkurangnya lahan yang dapat menyerap air ke dalam tanah. Sedangkan pada musim kemarau, cadangan air di dalam tanah semakin berkurang karena tidak ada air yang meresap ke dalam tanah, sehingga menyebabkan kekeringan atau kekurangan sumber air khususnya air tanah. Sumur resapan dan lubang resapan biopori merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sumur resapan dan lubang resapan biopori dapat meresapkan air hujan ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah dan mencegah banjir.

http://www.bps.go.id

Persentase rumah tangga yang mempunyai sumur resapan di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan di daerah perdesaan, yaitu sebanyak 4,7 persen di perkotaan dan 2,4 persen di perdesaan (Grafik 2). Jika dilihat menurut provinsi, DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang mempunyai sumur resapan yaitu sebesar 21,5 persen. Persentase rumah tangga yang mempunyai sumur resapan menurut provinsi dan daerah tempat tinggal dapat dilihat di Tabel 9.11.

Sementara rumah tangga yang memiliki lubang biopori masih sangat sedikit yaitu sebanyak 2 persen. Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang mempunyai lubang biopori yaitu masing-masing sebanyak 6,1 persen dan 4,6 persen (Tabel 9.12). Masih terbatasnya persentase rumah tangga yang memiliki sumur resapan dan lubang resapan biopori dimungkinkan karena rumah tangga belum mengetahui dan menyadari pentingnya keberadaan sumur resapan dan lubang resapan biopori.

http://www.bps.go.id

Gambar 9.12
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumur Resapan
Menurut Daerah Tempat Tinggal

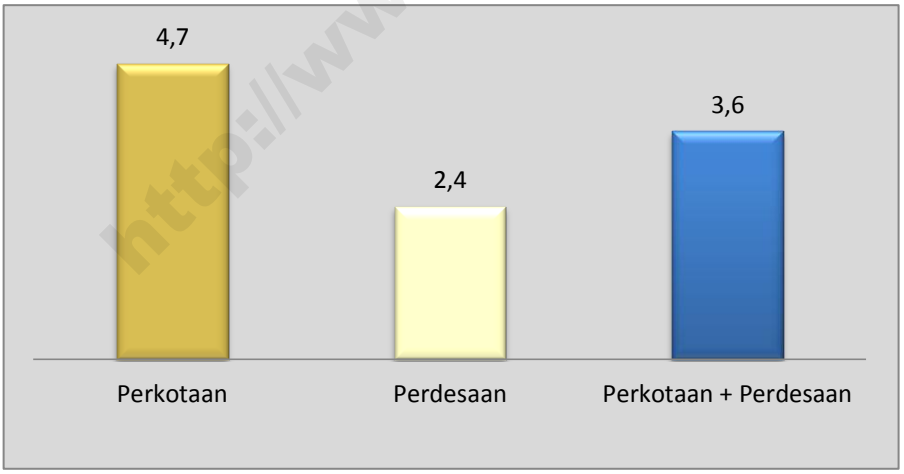

Sumber data: SUPAS 2015

Ringkasan

Perubahan iklim merupakan salah satu isu terbaru, dimana perubahan iklim mempunyai dampak pada jumlah penduduk, tidak terkecuali di Indonesia. SUPAS 2015 mengupas tentang dampak perubahan iklim terhadap penduduk, pengetahuan penduduk tentang perubahan iklim, serta adaptasi penduduk terhadap perubahan iklim. Sebagian besar penduduk sudah merasakan dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim; sebanyak 72,4 persen rumah tangga sudah merasakan meningkatnya suhu udara, 82 persen sudah merasakan musim hujan yang semakin tidak menentu, dan 24,9 persen sudah merasakan kelangkaan air bersih selama lima tahun terkahir. Dari sisi pengetahuan tentang perubahan iklim, hanya 38,0 persen rumah tangga yang pernah mendengar informasi tentang perubahan iklim, sedangkan baru 23,9 persen yang mengetahui tentang perubahan iklim. Rumah tangga yang sudah melakukan adaptasi melalui penanaman tanaman tahunan sebesar 39,1 persen, sedangkan yang menyediakan area resapan air sebesar 3,6 persen.

http://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Inez, Harker , & Bugge, Christian. 2013. *Opinions and Knowledge About Climate Change Science in High School Students*. Ambio. 2013 Oct; 42(6): 755–766.

IPCC (2006) 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IGES, Japan.

Nakashima, Douglas, et al. 2013. *Weathering Uncertainly, Traditional Knowledge for Climate Change Assesment and Adaptation*. UNDP

World Bank. 2009. Berinvestasi untuk Indonesia yang Lebih Berkelanjutan, Analisa Lingkungan Indonesia.

Climate Change: Basic Information. Diakses pada tanggal 1 April 2016. (https://www3.epa.gov/climatechange/basics/)

Changing Rain and Snow Patterns. Diakses pada tanggal 1 April 2016. (https://www3.epa.gov/climatechange/)

Climate Impacts on Water Resources. Diakses pada tanggal 1 April 2016. (https://www3.epa.gov/climatechange/)

Environmental Education Research. 2002. Mind the Gap: why do people actenvironmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?

OECD. 2013. Greening Household Behaviour : Overview from The 2011 Survey. OECD Studies on Environmental Policy and Household Behaviour. OECD Publishing.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Penutup

ISU-isu kependudukan semakin penting untuk diperhatikan terutama dengan kondisi bonus demografi yang akan dialami, dimana penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia kerja. Menurunnya tingkat kelahiran dan diiringi tingkat kematian yang juga menurun, fokus perhatian penduduk beralih pada dinamika kependudukan yang mencakup perubahan pada struktur penduduk, seperti pada penduduk usia kerja, penduduk remaja, serta penduduk usia lanjut. Selain itu, dengan berakhirnya MDGs dan dimulainya SDGs, dengan cakupannya ***no one left behind*** atau tidak ada yang ditinggalkan, ini berarti bahwa fokus perhatian pada kelompok penduduk termasuk penduduk yang mengalami disabilitas dan lainnya. Dinamika kependudukan menjadi isu utama karena dampaknya terhadap seluruh siklus kehidupan penduduk. SUPAS 2015 mencoba menggambarkan isu-isu yang sedang hangat dibahas dengan data-data terkini.

http://www.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

http://www.bps.go.id

ISBN.978-602-438-027-4

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : bpshq@bps.go.id